



RPJMD KOTA BLITAR

TAHUN 2025 - 2029



Pemerintah
Kota Blitar



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 -2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Pembangunan Jangka Atas Rencana Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);

20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

dan

WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 -2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang berpedoman pada RPJP Nasional.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk

periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden dengan berpedoman pada RPJP Nasional.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut RPJM Daerah Provinsi Jawa Timur adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah Provinsi Jawa Timur dan RPJM Nasional.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau disebut RKP Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
16. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
17. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

18. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
19. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka piker atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagi penjabaran strategi.
20. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksnaakan oleh satu atau lebih Perangkat Daerah sebsgai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatau Program dan terdiri dari sekumpulan Tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebayai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
22. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sleanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN RPJM DAERAH

Pasal 2

- (1) RPJM Daerah merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikator untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada:
 - a. RPJP Daerah;

- b. RTRW;
 - c. RPJM Nasional; dan
 - d. RPJM Daerah Provinsi Jawa Timur.
- (3) Dalam penyusunan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan RPJM Daerah kabupaten/kota sekitar.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan;
- b. Bab II Gambaran Umum Daerah;
- c. Bab III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
- d. Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah; dan
- e. Bab V Penutup.

Pasal 4

Isi beserta uraian RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KERANGKA KERJA RPJM DAERAH

Bagian Kesatu

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 5

- (1) Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
- (2) Berdasarkan konsep pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan untuk meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di bentuk dan disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan

substansinya baik untuk Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah.

- (4) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi : RPJP Daerah dijabarkan oleh RPJM Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah yang terdiri dari:
 - a. RKP Daerah; dan
 - b. Renja Perangkat Daerah.

Pasal 6

RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) disusun dengan:

- a. berpedoman RPJM Nasional yang memuat prioritas pembangunan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
- b. berpedoman RPJP Daerah yang diarahkan untuk penguatan fondasi transformasi dengan fokus pada transformasi ekonomi, sosial, lingkungan, dan pemerintahan; dan
- c. memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJM Daerah.

Bagian Kedua

Sinkronisasi dan Penyelarasan

Pasal 7

- (1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, untuk itu diperlukan penyelarasan RPJM Daerah dengan RPJM Nasional dan RPJP Daerah.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya.
- (3) Penyelarasan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. Aspek penyelarasan RPJM Daerah terhadap RPJP Daerah, Penjabaran visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih, berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah dalam RPJP Daerah adalah: *"Kota yang maju dan berkelanjutan, Cerdas, Inklusif dengan kekuatan Budaya, Religi Dan Nasionalisme"*, dengan 4 sasaran yang akan diwujudkan, yaitu:
 1. Peningkatan pendapatan per kapita;
 2. Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan;
 3. Peningkatan daya saing sumber daya manusia; dan
 4. Penurunan emisi GRK menuju *net zero emission*.

- b. Aspek penyelarasan RPJM Daerah terhadap RPJM Nasional, sebagai upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden.
- (4) Penyelarasan Periodisasi sebagaimana dimaksud ayat (2), berupa masa berlaku RPJM Daerah untuk Periodisasi tahun 2025 berakhir sampai dengan tahun 2029.

Pasal 8

- (1) RPJM Daerah disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJM Daerah Provinsi Jawa Timur.
- (2) RPJM Daerah proses penyusunannya dilakukan secara bersamaan atau simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Sebagian substansi Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian dari RPJM Daerah.

BAB V

PELAKSANAAN RPJM Daerah

Pasal 9

RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), dilaksanakan oleh:

- a. Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan melaksanakan kebijakan dan strategi, arah kebijakan, program/kegiatan/subkegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program prioritas yang tercantum di dalam RPJM Daerah; dan
- b. Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan mendukung pencapaian target kinerja visi misi dan program serta tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan RPJM Daerah.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJM Daerah, yang penyusunannya dilakukan secara bersamaan atau simultan.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagian substansinya merupakan bagian dari RPJM Daerah.
- (4) Perangkat Daerah pengampu indikator Utama Pembangunan harus membuat kertas kerja rencana pencapaian selama 5 (lima) tahun dalam bentuk Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kinerja Perangkat Daerah.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah, maka penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah yang baru.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 11

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJM Daerah dilakukan dalam rangka menjamin dan memastikan tercapainya visi dan misi Walikota yang dituangkan dalam RPJM Daerah.
- (2) Walikota melalui Kepala perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan RPJM Daerah.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah, indikasi program prioritas, dan kebutuhan pendanaan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan setiap semester.
- (5) Kepala perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah melaporkan hasil pengendalian pelaksanaan RPJM Daerah kepada Walikota.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 12

- (1) Kepala perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk mengetahui tingkat indikator kinerja, Indikasi rencana program prioritas, kebutuhan

pendanaan untuk mencapai misi, tujuan, dan sasaran dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setiap tahun, pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan RPJM Daerah.
- (4) Kepala perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah kepada Walikota.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara evaluasi dan pengendalian pelaksanaan RPJM Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PERUBAHAN RPJM DAERAH

Pasal 14

- (1) Perubahan RPJM Daerah dapat dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa terdapat substansi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - e. terdapat indikator target yang tidak dapat dihitung dan berpengaruh lebih dari 20% terhadap capaian kinerja;
 - f. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional; atau
 - g. bertentangan dengan kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Timur.
- (2) Perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf e, tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJM Daerah kurang dari 2 (dua) tahun.

- (4) Perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKP Daerah dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 15

- (1) Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam RPJM Daerah bersifat indikatif.
- (2) Perubahan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terjadi pada setiap tahun pelaksanaan RPJM Daerah, disampaikan oleh Kepala perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah kepada Walikota pada rapat Tim Perumusan Anggaran untuk mendapatkan keputusan.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam RKP Daerah.
- (4) Perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKP Daerah dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 16

- (1) Dalam hal target sasaran kinerja yang ditetapkan dalam RPJM Daerah telah tercapai, maka dirumuskan kembali besaran target sasaran kinerja baru.
- (2) Dalam hal target sasaran kinerja yang ditetapkan dalam RPJM Daerah sulit tercapai, maka dirumuskan kembali penyesuaian kembali besaran target sasaran kinerja baru.
- (3) Target sasaran kinerja baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Semua ketentuan mengenai RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku harus dibaca dan dimaknai sebagai RPJP Daerah, RPJM Daerah, RKP Daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberlakukan sebagai RPJM Daerah transisi yang menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun 2030 sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Tahun 2030-2034 yang memuat visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Pasal 19

- (1) Penyusunan RKP Daerah Tahun 2026 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Visi, Misi, dan program Walikota terpilih yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja, program yang termuat dalam RPJM Daerah 2025-2029.
- (2) Dalam hal RPJM Daerah 2025-2029 belum ditetapkan penyusunan RKP Daerah menggunakan RPJM Daerah yang masih berlaku dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan RPJP Daerah 2025-2045.
- (3) RKP Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. prioritas pembangunan daerah;
 - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - d. Program Strategis Nasional; dan
 - e. kesepakatan Rakortekbang Nasional Tahun 2025.
- (4) Penyusunan RKP Daerah Tahun 2026 dilakukan simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJM Daerah.
- (5) Dalam hal RPJM Daerah telah ditetapkan, dapat dilakukan perubahan terhadap RKP Daerah Tahun 2026 yang telah ditetapkan atau penyesuaian terhadap rancangan RKP Daerah Tahun 2026 sesuai dengan penyusunan RKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) RKP Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (7) Penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan disusun secara simultan dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- (8) RKP Daerah Tahun 2026 berpedoman pada RKP Tahun 2026 dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan Pembangunan Daerah, Walikota dan Wakil Walikota pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun RKP Daerah untuk tahun pertama periode pemerintahan Walikota berikutnya.
- (2) Penyusunan RKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada RPJP Daerah, dan target kinerja RPJM Daerah yang belum tercapai, sebelum RPJM Daerah periode berikutnya ditetapkan.



- (3) RKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode pemerintahan Walikota berikutnya.
- (4) Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 20 Agustus 2025
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 20 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 142-5/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 -2029

I. UMUM

RPJM Daerah Kota Blitar merupakan dokumen perencanaan Kota Blitar untuk periode 5 (lima) tahun yang dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kota Blitar dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.

RPJM Daerah digunakan sebagai pedoman penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dan penyusunan RKP Daerah serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029. Sehubungan dengan itu, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.



LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KOTA BLITAR
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tanggal 27 November 2024 Kota Blitar melaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota periode 2025 – 2030. Berdasarkan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada), ditetapkan pasangan H. Syauqul Muhibbin dan Elim Tyu Samba sebagai Walikota dan Wakil Walikota Blitar Periode 2025-2030 yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebagaimana diatur Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 260 Ayat (1) daerah sesuai dengan kewenangan menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

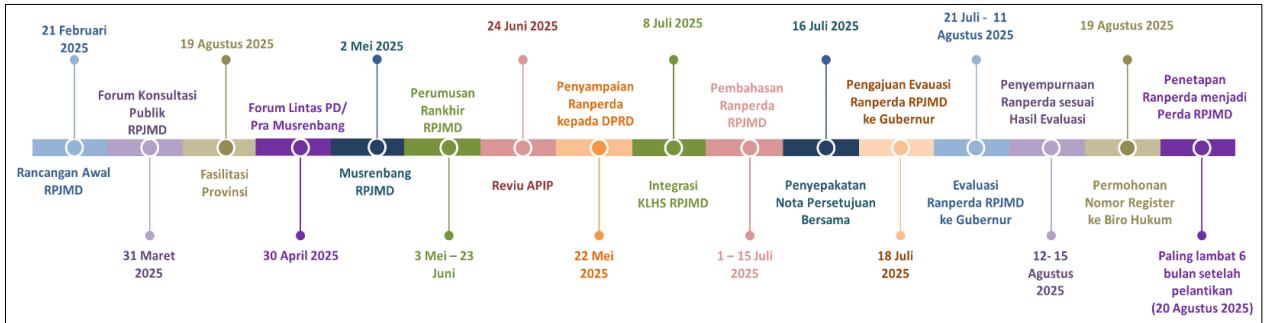
RPJMD merupakan dokumen penjabaran visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program-program pembangunan daerah termasuk di dalamnya program prioritas yang dicanangkan Walikota dalam proses Pemilihan Kepala Daerah.

Proses penyusunan RPJMD sebagaimana sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, secara faktual dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.

Tahap persiapan dilakukan pada Masa Bhakti Walikota Blitar tahun 2021 – 2024 yang meliputi:

- a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;
- b) orientasi mengenai RPJMD;
- c) penyusunan agenda tim penyusun RPJMD;
- d) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD); dan
- e) penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.

Tahap Pelaksanaan dilakukan setelah Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Masa Bhakti 2025 – 2029 dilantik. Tahapan pelaksanaan dimulai dari penyusunan Rancangan Awal sampai dengan penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.



Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar, 2025

Gambar 1.1

Timeline Penyusunan RPJMD Kota Blitar 2025 – 2029

Dalam penyusunan dokumen RPJMD Kota Blitar Tahun 2025–2029, telah dilakukan integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2018. Proses ini didukung oleh pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menilai kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan dalam RPJMD selaras dengan prinsip keberlanjutan dan memiliki ketahanan jangka panjang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kota Blitar Tahun 2025 – 2029 didasarkan sejumlah peraturan perundang – undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Pembangunan Jangka Atas Rencana Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 461);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor ...);
 21. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 1);

1.3. Hubungan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Hubungan RPJMD Kota Blitar 2025–2029 dengan dokumen perencanaan lainnya, adalah bersifat keselarasan dan saling terkait antara perencanaan satu dengan perencanaan lainnya. Pendekatan dilakukan dengan mengimplementasikan pendekatan perencanaan secara holistik, integratif dan spasial.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 pasal 160, RPJMD Kota Blitar disusun dengan mempedomani dokumen RTRW dan RPJPD. Selain itu RPJMD juga harus selaras dengan RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Timur, dan RPJMD daerah lain. Hal ini untuk menjamin keharmonisan strategi dan arah kebijakan pembangunan dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional.

1.3.1. Hubungan RPJMD Kota Blitar dengan RPJM Nasional

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 156 ayat (2) Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Selanjutnya dalam pasal 260 ayat

(1) Daerah sesuai kewenangannya menyusun rencana Pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Sehingga jelas RPJMD Kota Blitar harus selaras dan mendukung pencapaian RPJM Nasional. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan daerah mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan nasional. Sehingga RPJMD Kota Blitar disusun mengacu pada RPJM Nasional. Misi RPJMD Kota Blitar disandingkan dan diselaraskan dengan Asta Cita sebagai misi dari RPJM Nasional. Arah kebijakan Pembangunan harus selaras dengan kebijakan Pembangunan Nasional. Hal ini bertujuan agar seluruh program dan kegiatan pembangunan di tingkat daerah, termasuk di Kota Blitar, dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Sinkronisasi ini tidak hanya mencakup penyesuaian substansi perencanaan, tetapi juga menyangkut keterpaduan dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan.

1.3.2. Hubungan RPJMD Kota Blitar dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 276 ayat (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Pembangunan daerah kabupaten/kota. Sehingga secara teknis RPJMD Kota/Kabupaten Se Jawa Timur akan selaras dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur, karena pada saat Evaluasi penyusunan rancangan RPJMD Kota/Kabupaten akan diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan daerah Kota/Kabupaten dapat mendukung pembangunan provinsi Jawa Timur.

Dengan demikian RPJMD Kota Blitar pasti dan dapat dipastikan selaras dan mendukung pencapaian RPJMD Provinsi Jawa Timur. Dimana Misi RPJMD Kota Blitar disandingkan dan diselaraskan dengan Nawa Bhakti Satya sebagai misi dalam naskah RPJMD Provinsi Jawa Timur.

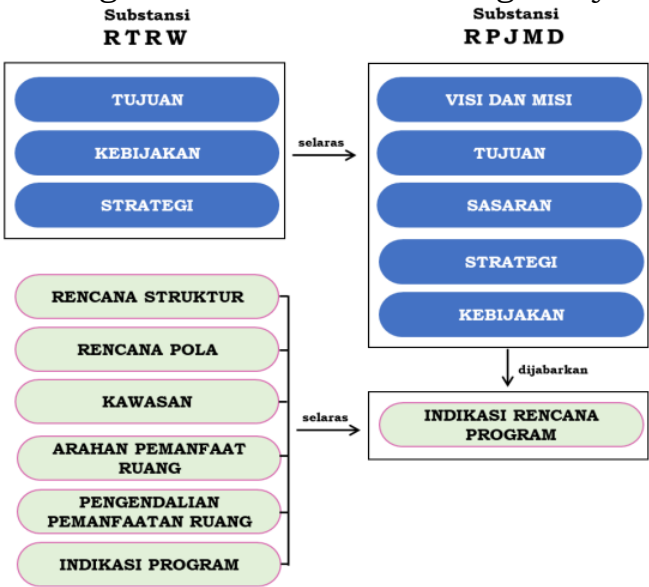
1.3.3. Hubungan RPJMD Kota Blitar dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar 2025-2045

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 263 ayat (3) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan Pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Sehingga jelas bahwa RPJMD berpedoman pada RPJPD.

1.3.4. Hubungan RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Blitar

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 263 ayat (2) menetapkan bahwa RPJPD disusun dengan

berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Sebagaimana diuraikan dalam hubungan RPJMD dengan RPJPD, berkaitan dengan pengaturan Undang Undang tersebut, maka RPJMD disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah.



Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar, 2025

Gambar 1.2

Penyelarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan RTRW

1.3.5. Hubungan RPJMD Kota Blitar dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Blitar

Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah 2025 -2029 menetapkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah analisis sistematis, menyeluruh dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan berkelanjutan ke dalam RPJMD. Dengan demikian RPJMD menjadikan KLHS sebagai bahan dasar untuk menyusun perencanaan Pembangunan yang berkelanjutan.

1.3.6. Hubungan RPJMD Kota Blitar dengan RPJMD Kabupaten Blitar

RPJMD disusun dengan memperhatikan RPJMD Daerah lain yaitu dengan cara menyelaraskan strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah dengan daerah lainnya atau daerah sekitar yang berbatasan langsung dengan Kota Blitar. Penelaahan dokumen daerah sekitar dilakukan untuk sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah sehingga dapat mendukung percepatan program strategis nasional.

1.3.7. Hubungan RPJMD Kota Blitar dengan RIPJPID

RPJMD Tahun 2025–2029 selain mengacu pada visi, misi, dan program kepala daerah terpilih, juga memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan daerah

lainnya, salah satunya adalah Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID). RIPJPID disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (SISNAS IPTEK), yang mengatur perlunya arah kebijakan dan strategi pembangunan Iptek di daerah.

Keterkaitan RPJMD dengan RIPJPID bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan daerah memperkuat ekosistem inovasi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mendukung peningkatan daya saing daerah. Program dan kegiatan dalam RPJMD diarahkan untuk selaras dengan strategi dan sasaran yang ditetapkan dalam RIPJPID, sehingga pembangunan daerah berbasis Iptek dapat terwujud secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan.

Tabel 1.1
Hubungan RPJMD Kota Blitar dengan RIPJPID

Aspek	RPJMD 2025–2029	RIPJPID	Keterkaitan
Dasar Hukum	UU No. 25/2004 tentang SPPN, Permendagri No. 86/2017	UU No. 11/2019 tentang Sisnas Iptek	Kedua dokumen disusun berdasarkan ketentuan perundangan yang saling mendukung
Ruang Lingkup	Pembangunan seluruh sektor daerah selama 5 tahun	Pemajuan Iptek daerah dalam jangka panjang	RIPJPID memperkuat aspek Iptek dalam pelaksanaan program program RPJMD
Fungsi Utama	Menjadi pedoman penyusunan RKPD tahunan, arah kebijakan pembangunan	Menjadi acuan pengembangan Iptek berbasis potensi daerah	RIPJPID menjadi landasan untuk program/kegiatan Iptek di RPJMD
Visi dan Misi	Berasal dari visi-misi Kepala Daerah	Mendukung terwujudnya ekosistem riset dan inovasi daerah	Visi-misi RPJMD harus mempertimbangkan kebutuhan pengembangan Iptek daerah dari RIPJPID
Tujuan Pembangunan	Peningkatan kesejahteraan masyarakat,	Peningkatan kapasitas Iptek dan	Program inovasi dan riset daerah dalam RPJMD

Aspek	RPJMD 2025–2029	RIPJPID	Keterkaitan
	daya saing daerah	inovasi daerah untuk kesejahteraan	merujuk pada strategi RIPJPID
Strategi dan Program	Menyusun strategi sektor pembangunan daerah	Menyusun strategi pengembangan Iptek daerah	Strategi RPJMD di sektor pendidikan, industri, kesehatan, dan lain – lain disinergikan dengan RIPJPID
Kinerja	Indikator pembangunan	Indikator kinerja Iptek daerah	Indikator bidang Iptek dalam RPJMD harus konsisten dengan target RIPJPID

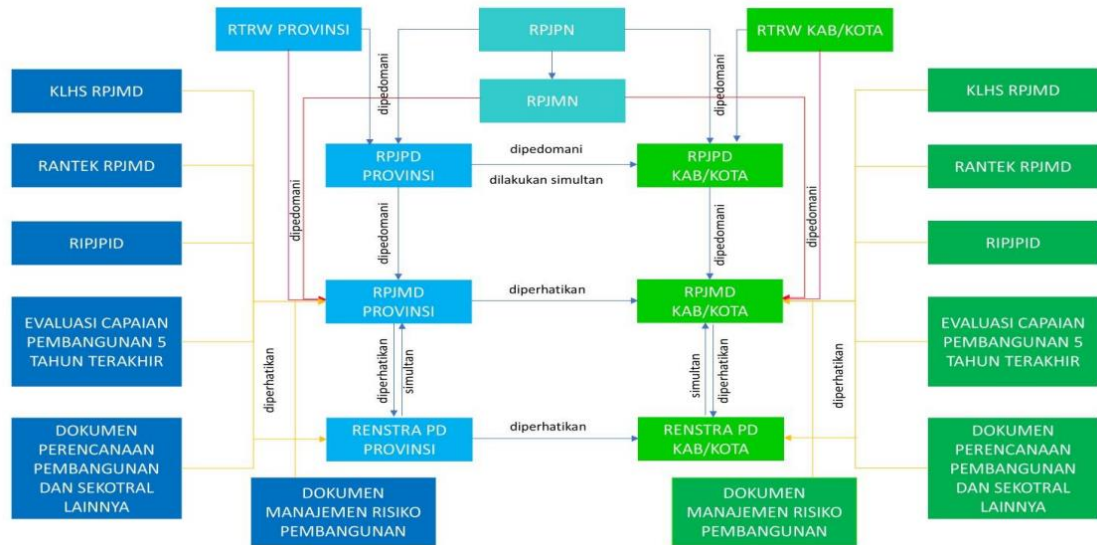
Sumber : *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar, 2025*

1.3.8. Hubungan RPJMD Kota Blitar dengan Rencana Pembangunan Tahunan

RPJMD sebagai rencana jangka menengah daerah direncanakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan operasionalisasi rencana pembangunan tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD yaitu dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rencana Pembangunan Tahunan harus berpedoman pada RPJMD Kota Blitar.

1.3.9. Hubungan RPJMD Kota Blitar dengan Dokumen Sektorai Lainnya

Selain memiliki hubungan dengan dokumen perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur, RTRW, RPJMD Kota Blitar Tahun 2025 - 2029 juga memperhatikan beberapa dokumen antara lain; 1) Agenda pembangunan Sustainable Development Goals (SDG's); 2) Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM); 3) Masterplan Smart City dan dokumen perencanaan sektoral lainnya.



Sumber : Kementerian Dalam Negeri

Gambar 1.3
Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan
Pembangunan dan Sektoral Lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Penyusunan RPJMD Kota Blitar Tahun 2025 -2029 dimaksudkan untuk memberikan arah Pembangunan Kota Blitar dalam kurun waktu 2025-2029 yang didasarkan pada visi dan misi Walikota masa Bhakti 2025-2030. Dimana RPJMD Kota Blitar 2025-2029 juga dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai pedoman dalam berpartisipasi membangun Kota Blitar bagi seluruh pemangku kepentingan atau seluruh elemen masyarakat Kota Blitar dalam mewujudkan kemajuan Kota Blitar.

1.4.2. Tujuan

Penyusunan RPJMD Kota Blitar Tahun 2025-2029 memiliki tujuan antara lain sebagai berikut:

- Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD;
- Memberikan pedoman bagi penyusunan RKPD setiap tahun selama tahun 2025 -2029;
- Menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota;
- Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Blitar dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menjalankan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan
- Memungkinkan terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
- Menjadi pedoman bagi semua elemen Masyarakat dalam turut membangun Kota Blitar tahun 2025 -2029.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan RPJMD Kota Blitar Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya;
4. Maksud dan tujuan; dan
5. Sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Gambaran Umum Kondisi Daerah memuat :
 - a. Aspek Geografi dan Demografi
 - b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - c. Aspek Daya Saing Daerah
 - d. Aspek Pelayanan Umum
2. Gambaran Keuangan Daerah memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 – 2024 dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025 – 2029
3. Permasalahan dan Isu Strategis memuat :
 - a. Permasalahan pembangunan daerah; dan
 - b. Isu strategis daerah

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran memuat :
 - a. Visi dan Misi; dan
 - b. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025 - 2029
2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah memuat :
 - a. Strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029 ; dan
 - b. Program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

1. Program Perangkat Daerah memuat :

Daftar Program Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dan Indikator program, target dan pagu indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029
2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memuat :
 - a. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan
 - b. Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025–2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan daerah sebagai bagian dari Upaya pencapaian sasaran Pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN UMUM

- 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
Gambaran umum kondisi daerah dapat dilihat pada alamat <https://q.me-qr.com/MmdkpWJD> atau dengan memindai QR Code dengan tabel bantu sebagai berikut :



No.	Judul	Hal.
2.1.1.	Aspek Geografi dan Demografi	II 11
2.1.1.1.	Posisi dan Peran Strategis Daerah	II 13
2.1.1.2.	Potensi Sumber Daya Alam	II 13
2.1.1.3.	Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	II 15
2.1.1.4.	Daya Dukung Pangan dan Daya Dukung Air	II 16
2.1.1.4.1.	Daya Dukung Pangan	II 16
2.1.1.4.2.	Daya Dukung Air	II 17
2.1.1.5.	Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	II 17
2.1.1.5.1.	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	II 17
2.1.1.5.2.	Indeks Ketahanan Pangan	II 18
2.1.1.5.3.	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	II 19
2.1.1.6.	Lingkungan Hidup Berkualitas	II 20
2.1.1.6.1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	II 20
2.1.1.6.2.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	II 22
2.1.1.6.3.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	II 23
2.1.1.6.4.	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	II 25
2.1.1.6.5.	Ketaatan terhadap Tata Ruang	II 26
2.1.1.6.6.	Pertanahan	II 27
2.1.1.7.	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	II 28

No.	Judul	Hal.
2.1.1.7.1.	Potensi Penurunan Emisi GRK Kumulatif	II 28
2.1.1.7.2.	Indeks Risiko Bencana	II 29
2.1.1.7.3.	Indeks Ketahanan Daerah	II 32
2.1.1.8.	Demografi	II 33
2.1.1.8.1.	Laju Pertumbuhan Penduduk	II 33
2.1.1.8.2.	Rasio Penduduk	II 34
2.1.1.8.3.	Kepadatan Penduduk	II 35
2.1.1.8.4.	Proyeksi dan analisis penduduk 5 tahun ke depan sesuai RPJPD Kota Blitar 2025-2045	II 36
2.1.2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II 38
2.1.2.1.	Kesejahteraan Ekonomi	II 38
2.1.2.1.1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	II 38
2.1.2.1.2.	Tingkat Kemiskinan	II 39
2.1.2.1.3.	PDRB Per Kapita (dalam juta rupiah, ADHB)	II 40
2.1.2.1.4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	II 41
2.1.2.1.5.	Indeks Gini	II 42
2.1.2.1.6.	Indeks Pembangunan Manusia	II 43
2.1.2.1.7.	Rata – Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	II 44
2.1.2.2.	Kesehatan Untuk Semua	II 44
2.1.2.2.1.	Usia Harapan Hidup	II 45
2.1.2.2.2.	Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB dan Malaria	II 45
2.1.2.2.3.	Prevalensi Stunting	II 46
2.1.2.2.4.	Angka Kematian Ibu	II 48
2.1.2.2.5.	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberculosis	II 48
2.1.2.2.6.	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis	II 49
2.1.2.2.7.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	II 50
2.1.2.3.	Pendidikan Berkualitas yang Merata	II 50
2.1.2.3.1.	Rata-Rata Lama Sekolah	II 53
2.1.2.3.2.	Harapan Lama Sekolah	II 53
2.1.2.3.3.	Angka Literasi/Numerasi	II 55
2.1.2.3.4.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	II 56
2.1.2.4.	Perlindungan Sosial yang Adaptif	II 56
2.1.2.4.1.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	II 57
2.1.2.5.	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	II 57
2.1.2.5.1.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	II 57
2.1.2.6.	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	II 58
2.1.2.6.1.	Indeks Perlindungan Anak	II 58
2.1.2.6.2.	Indeks Pembangunan Keluarga	II 59
2.1.2.6.3.	Indeks Pembangunan Gender	II 60

No.	Judul	Hal.
2.1.2.6.4.	Indeks Ketimpangan Gender	II 60
2.1.2.6.5.	Indeks Pembangunan Pemuda	II 61
2.1.3.	Aspek Daya Saing Daerah	II 63
2.1.3.1.	Daya Saing Sumber Daya Manusia	II 63
2.1.3.1.1.	Angka Ketergantungan	II 63
2.1.3.2.	Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	II 64
2.1.3.2.1.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	II 64
2.1.3.2.2.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	II 65
2.1.3.2.3.	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	II 66
2.1.3.2.4.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	II 67
2.1.3.2.5.	Proporsi Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Formal	II 68
2.1.3.2.6.	Indeks Inovasi Daerah (IID)	II 69
2.1.3.2.7.	ICOR (Incremental Capital Output Ratio)	II 70
2.1.3.2.8.	Indeks Akses Keuangan Daerah	II 70
2.1.3.2.9.	Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID) Kota Blitar 2025 – 2029	II 71
2.1.3.3.	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	II 78
2.1.3.3.1.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	II 78
2.1.3.3.2.	Ekspor Barang dan Jasa	II 78
2.1.3.3.3.	Return On Asset (ROA) BUMD	II 79
2.1.3.3.4.	Perkembangan Koperasi	II 80
2.1.3.4.	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	II 85
2.1.3.4.1.	Indeks Infrastruktur Daerah	II 85
2.1.3.4.2.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	II 87
2.1.3.5.	Stabilitas Ekonomi Makro	II 88
2.1.3.5.1.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	II 88
2.1.3.5.2.	Tingkat Inflasi	II 89
2.1.3.5.3.	Persentase Peningkatan Investasi	II 90
2.1.4.	Aspek Pelayanan Umum	II 92
2.1.4.1.	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	II 92
2.1.4.1.1.	Indeks Reformasi Birokrasi	II 92
2.1.4.1.2.	Indeks Reformasi Hukum	II 93
2.1.4.1.3.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	II 94
2.1.4.1.4.	Indeks Pelayanan Publik	II 95
2.1.4.1.5.	Nilai IKM Perangkat Daerah	II 95
2.1.4.1.6.	Nilai SAKIP	II 96
2.1.4.1.7.	Opini BPK atas LKPD	II 97
2.1.4.1.8.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	II 97

No.	Judul	Hal.
2.1.4.1.9.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	II 98
2.1.4.2.	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial	II 99
2.1.4.2.1.	Persentase Penegakan Perda	II 99
2.1.4.2.2.	Persentase Capaian Aksi HAM	II 100
2.1.4.2.3.	Indeks Demokrasi Indonesia	II 100
2.1.4.2.4.	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	II 101
2.1.4.2.5.	Indeks Rasa Aman	II 102
2.1.4.2.6.	Angka Partisipasi Masyarakat dalam Proses Politik	II 102
2.1.4.3.	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	II 102
2.1.4.3.1.	Indeks Daya Saing Daerah	II 102
2.1.5.	Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah	II 104
2.1.6.	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	II 127

2.2. Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini menganalisis kondisi keuangan Pemerintah Daerah Kota Blitar. Untuk memberikan gambaran pengelolaan keuangan daerah periode 2020-2024 dengan kinerjanya dilanjutkan dengan gambaran proyeksi keuangan periode 2026-2030. Periode 2020-2024 merupakan fase strategis yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan, belanja, serta pembiayaan secara akuntabel dan efisien, khususnya di tengah tantangan fiskal akibat pandemi dan tekanan ekonomi nasional. Kinerja keuangan dalam periode ini menggambarkan bagaimana kebijakan fiskal yang diterapkan bertumpu pada prinsip kehati-hatian dan optimalisasi sumber daya lokal. Analisis atas indikator kunci seperti efektivitas PAD, efisiensi belanja, keseimbangan belanja operasi dan modal, serta kemandirian fiskal menunjukkan capaian dan kendala yang menjadi pembelajaran penting. Misalnya, tren menurunnya efisiensi serta tingginya proporsi belanja operasi menandakan perlunya reformulasi strategi belanja agar lebih produktif. Di sisi lain, peningkatan rasio ketergantungan transfer menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas fiskal daerah.

Proyeksi keuangan untuk periode 2026–2030 bertujuan memberikan dasar bagi perumusan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah yang lebih adaptif dan realistis. Dengan mempertimbangkan tren pendapatan daerah, belanja, dan pembiayaan pada lima tahun sebelumnya, estimasi proyeksi disusun secara makro dengan pendekatan teknokratik, serta mempertimbangkan dinamika

ekonomi nasional dan potensi daerah. Proyeksi ini diharapkan menjadi alat bantu dalam menyusun prioritas program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kemampuan fiskal, sekaligus sebagai upaya memperkuat kesinambungan pembangunan dan stabilitas fiskal daerah. Dengan kata lain, proyeksi ini bukan hanya alat perhitungan, tetapi juga instrumen perencanaan yang strategis untuk memastikan tercapainya pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis potensi riil daerah.

2.2.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja Keuangan masa lalu dapat dilihat pada alamat <https://q.me-qr.com/NLihP43K> atau dengan memindai QR Code dengan tabel bantu sebagai berikut :



No.	Judul	Hal.
2.2.1.	Kinerja Keuangan Masa Lalu	II 133
2.2.1.1.	Kinerja Keuangan APBD	II 134
2.2.1.1.1.	Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah	II 140
2.2.1.1.2.	Neraca Daerah	II 148

2.2.2. Kerangka Pendanaan

2.2.2.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Proyeksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kota Blitar untuk periode 2025–2029 disusun berdasarkan pendekatan historis dan analisis tren pertumbuhan komponen pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah selama tahun 2020–2024. Proyeksi ini mengasumsikan bahwa kondisi perekonomian nasional dan daerah telah sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19, serta memperhitungkan stabilitas fiskal dan arah kebijakan makro ekonomi nasional.

Pendapatan daerah Kota Blitar masih didominasi oleh Pendapatan Transfer, terutama Dana Perimbangan yang berasal dari APBN. Dana ini mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang dialokasikan guna mendukung pelaksanaan

desentralisasi fiskal dan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kontribusi yang masih terbatas, meskipun secara umum menunjukkan tren pertumbuhan yang positif.

Belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, dengan prioritas pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta perlindungan sosial. Alokasi belanja tiap urusan disusun berdasarkan dukungan urusan terhadap pencapaian target kinerja daerah. Penetapan anggaran tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang menekankan pada peningkatan kemandirian fiskal daerah, efisiensi belanja, dan transparansi pengelolaan keuangan.

Selain itu, proyeksi ini juga mempertimbangkan kondisi terkini, antara lain:

- a. Perubahan kebijakan transfer fiskal dari pusat, termasuk skema penyaluran DAK yang semakin berbasis kinerja (*performance-based budgeting*);
- b. Penguatan sistem informasi pemerintahan dan digitalisasi keuangan daerah;
- c. Stabilitas inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional pasca pandemi;
- d. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui pemanfaatan aset daerah dan pembiayaan kreatif (*creative financing*).

Dengan memperhatikan kemampuan dan potensi fiskal daerah, proyeksi pendapatan dan belanja ini diharapkan menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan fiskal jangka menengah yang sehat, kredibel, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan. Selanjutnya, struktur APBD menyesuaikan proyeksi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Blitar tahun 2025-2029 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.61
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2026-2030

No	Uraian	Baseline Tahun 2024	Proyeksi Tahun				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PENDAPATAN						
	A PENDAPATAN ASLI DAERAH						
	Pendapatan Pajak Daerah	54.179.720.917,80	96.773.830.000,00	97.321.608.000,00	97.821.608.000,00	98.294.824.000,00	100.964.940.000,00
	Pendapatan Retribusi Daerah	107.123.314.608,00	106.860.928.000,00	121.945.588.000,00	122.195.588.000,00	122.295.588.000,00	124.368.901.000,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	979.436.641,76	1.212.000.000,00	1.225.000.000,00	1.250.000.000,00	1.235.000.000,00	1.261.212.000,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.283.631.148,88	5.340.361.000,00	5.874.397.000,00	5.975.000.000,00	5.985.000.000,00	6.284.250.000,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	169.566.103.316,44	210.187.119.000,00	226.366.593.000,00	227.242.196.000,00	227.810.412.000,00	232.879.303.000,00
	B PENDAPATAN TRANSFER						
	1 Transfer Pemerintah Pusat						
	Dana Bagi Hasil	89.902.080.000,00	90.543.031.000,00	92.353.891.620,00	92.353.891.620,00	94.277.000.000,00	83.985.352.000,00
	Dana Alokasi Umum	443.238.812.000,00	456.999.804.000,00	466.139.800.080,00	466.139.800.080,00	466.389.800.080,00	479.849.794.200,00
	Dana Alokasi Khusus - Fisik	26.140.002.027,00	4.322.138.000,00	29.247.138.000,00	4.172.138.000,00	16.597.138.000,00	3.947.138.000,00
	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	62.034.580.679,00	63.003.277.000,00	63.003.277.000,00	63.003.277.000,00	63.003.277.000,00	63.003.277.000,00
	Insentif Daerah	32.033.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	653.348.664.706,00	614.868.250.000,00	650.744.106.700,00	625.669.106.700,00	640.267.215.080,00	630.785.561.200,00
	2 Transfer Antar Daerah						
	Pendapatan Bagi Hasil	106.082.874.400,00	65.340.625.000,00	66.647.437.500,00	66.897.437.500,00	67.980.386.250,00	68.325.278.000,00

No	Uraian	Baseline Tahun 2024	Proyeksi Tahun				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Bantuan Keuangan	1.741.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	107.824.404.400,00	65.340.625.000,00	66.647.437.500,00	66.897.437.500,00	67.980.386.250,00	68.325.278.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer	761.173.069.106,00	680.208.875.000,00	717.391.544.200,00	692.566.544.200,00	708.247.601.330,00	699.110.839.200,00
	C LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH						
	Pendapatan Lainnya	9.145.864.913,42	9.300.000.000,00	9.500.000.000,00	9.600.000.000,00	9.750.000.000,00	9.750.000.000,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	9.145.864.913,42	9.300.000.000,00	9.500.000.000,00	9.600.000.000,00	9.750.000.000,00	9.750.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	939.885.037.335,86	899.695.994.000,00	953.258.137.200,00	929.408.740.200,00	945.808.013.330,00	941.740.142.200,00
2	BELANJA						
A	BELANJA OPERASI						
	Belanja Pegawai	346.522.094.817,00	367.222.111.290,00	367.346.023.707,00	371.844.033.595,00	366.938.999.777,00	377.200.341.164,00
	Belanja Barang dan Jasa	430.109.209.209,71	463.652.724.506,00	441.843.066.911,00	453.402.563.558,00	462.823.852.538,00	467.890.804.035,00
	Belanja Hibah	45.820.694.832,00	19.837.261.065,00	11.505.927.268,00	21.692.930.505,00	44.428.007.588,00	11.875.114.036,00
	Belanja Bantuan Sosial	18.650.356.985,00	18.149.600.000,00	43.074.600.000,00	17.999.600.000,00	34.558.938.000,00	20.963.490.000,00
	Jumlah Belanja Operasi	841.102.355.843,71	868.861.696.861,00	863.769.617.886,00	864.939.127.658,00	908.749.797.903,00	877.929.749.235,00
B	BELANJA MODAL						
	Belanja Tanah	2.696.905.689,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Peralatan dan Mesin	20.744.067.013,00	19.843.041.000,00	20.856.215.000,00	17.832.063.825,00	18.770.593.500,00	12.482.444.677,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	55.789.927.363,00	27.924.153.000,00	38.055.606.000,00	44.574.927.731,00	26.527.945.350,00	68.518.861.500,00
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	51.349.969.945,00	29.710.354.000,00	46.704.829.650,00	42.447.086.178,00	44.565.531.000,00	25.710.354.026,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.541.538.234,00	547.116.000,00	557.322.000,00	560.000.000,00	560.000.000,00	560.000.000,00
	Belanja Aset Lainnya	199.622.250,00	175.000.000,00	275.000.000,00	280.500.000,00	280.500.000,00	280.500.000,00
	Jumlah Belanja Modal	132.322.030.494,00	81.199.664.000,00	106.448.972.650,00	105.694.577.734,00	90.704.569.850,00	107.552.160.203,00

No	Uraian	Baseline Tahun 2024	Proyeksi Tahun				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
C	BELANJA TIDAK TERDUGA						
	Belanja Tidak Terduga	2.111.475.435,00	5.879.963.396,00	5.952.500.000,00	6.049.300.000,00	5.963.000.000,00	6.143.500.000,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	2.111.475.435,00	5.879.963.396,00	5.952.500.000,00	6.049.300.000,00	5.963.000.000,00	6.143.500.000,00
	Jumlah Belanja	975.535.861.772,71	955.941.324.257,00	976.171.090.536,00	976.683.005.392,00	1.005.417.367.753,00	991.625.409.438,00
	SURPLUS/DEFISIT	-35.650.824.436,85	-56.245.330.257,00	-22.912.953.336,00	-47.274.265.192,00	-59.609.354.423,00	-49.885.267.238,00
3	PEMBIAYAAN						
A	PENERIMAAN PEMBIAYAAN						
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	73.994.318.147,86	56.245.330.257,00	47.912.953.336,00	62.274.265.192,00	29.609.354.423,00	49.885.267.238,00
	Pencairan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	0,00	0,00		30.000.000.000,00	0,00
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	107.349.416,58	0,00	0,00			0,00
	Jumlah Penerimaan	89.101.667.564,44	56.245.330.257,00	47.912.953.336,00	62.274.265.192,00	59.609.354.423,00	49.885.267.238,00
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00					
	Pembentukan Dana Cadangan	0,00		15.000.000.000,00	15.000.000.000,00		0,00
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00		10.000.000.000,00			0,00
	Jumlah Pengeluaran	0,00	0,00	25.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	89.101.667.564,44	56.245.330.257,00	22.912.953.336,00	47.274.265.192,00	59.609.354.423,00	49.885.267.238,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	53.450.843.127,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Sumber: *Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, 2025*

Berdasarkan data historis dan analisa tren perkembangan tahun 2020-2024 diproyeksikan sebagai berikut. Total pendapatan daerah diproyeksikan dalam tren fluktuatif untuk periode lima tahun kedepan. Pendapatan Daerah Kota Blitar tahun 2025-2030 diproyeksikan tumbuh rata-rata sebesar 2,13% (persen). Tahun 2026 diperkirakan turun dari *baseline* realisasi tahun 2024, lalu naik perlahan sampai 2030. Penurunan pada 2026 menjadi indikasi perlunya kehati-hatian dalam asumsi pertumbuhan ekonomi dan proyeksi transfer pusat. Ketergantungan yang tinggi menyebabkan Kota Blitar menjadi daerah rentan terhadap fluktuasi fiskal nasional yang dipengaruhi oleh faktor eksternal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mengalami tren positif dan konsisten naik dari Rp169,57 M (2024) ke Rp232,88 M (2030). Kenaikan signifikan di 2026 (naik $\pm 24\%$ (persen)), terutama didorong oleh lonjakan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Fokus ke depan terutama untuk digitalisasi pajak dan *updating* basis data pajak, penyederhanaan retribusi, efisiensi pelayanan publik, dan reformasi tarif berbasis nilai manfaat. Hasil pengelolaan kekayaan daerah naik perlahan ($\pm 3-5\%$ (persen) per tahun), namun kontribusinya sangat kecil ($< 1\%$ dari PAD). Potensi besar jika pemerintah daerah mengelola aset secara produktif (optimalisasi BUMD, kerja sama pemanfaatan aset). Kontribusi PAD terhadap total pendapatan meningkat dari 18% (persen) (2024) menjadi hampir 25% (persen) (2030) hal itu diharapkan menjadi sinyal perbaikan kemandirian fiskal. Perlu pengawasan ketat agar target PAD realistis, tidak sekadar asumsi di atas kertas, dan ditopang oleh kebijakan dan reformasi nyata di lapangan.

Pendapatan transfer pusat fluktuatif di tahun 2026–2030, naik di tahun 2027, kemudian turun 2028, naik lagi di tahun berikutnya. Tren pergerakan cenderung tidak stabil, dipengaruhi DAK dan insentif daerah. Dinamika geopolitik global seperti ketegangan kawasan Asia Timur, fluktuasi harga energi dunia, serta dampak lanjutan dari perang dagang antara negara-negara besar telah memberikan tekanan pada kinerja fiskal nasional. Hal ini berdampak langsung terhadap struktur belanja negara, termasuk alokasi transfer ke daerah. Pada 2025, pemerintah pusat menerapkan strategi fiskal yang lebih ketat, dengan fokus pada efisiensi belanja dan selektivitas dalam penyaluran dana transfer. Hal ini dipicu oleh penurunan penerimaan negara dari sektor perdagangan dan pajak ekspor, sebagai akibat dari pelemahan permintaan global dan penurunan harga komoditas. Di sisi lain, potensi penyesuaian skema DAK dan pemanfaatan insentif fiskal berbasis kinerja (*performance-based transfer*) juga menjadi tantangan dan peluang. Daerah dengan perencanaan yang responsif dan tata kelola yang baik cenderung tetap memperoleh prioritas. Untuk itu meskipun diproyeksikan secara pesimis akan tetapi Pemerintah Kota Blitar berkomitmen untuk selalu

memberikan upaya terbaik untuk mendapatkan apresiasi berupa insentif fiskal dan dana DAK.

Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2026–2030 diproyeksikan naik bertahap mulai dari Rp83,9 M sampai akhirnya 94,2 M. Tren perubahan cenderung stabil (meningkat moderat), kecuali 2030 sedikit turun. Perlu menjadi perhatian bahwa DBH sangat dipengaruhi oleh PNPB dan penerimaan perpajakan nasional sehingga faktor eksternal seperti harga komoditas & pertumbuhan ekonomi nasional menjadi penentu utama atas kinerja alokasi ke daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) meningkat stabil dari Rp443,24M di tahun 2024 ke Rp479,84M pada akhir periode tahun 2030. Kenaikan sejalan dengan asumsi pertumbuhan kebutuhan dasar dan indeks fiskal daerah. DAU menjadi komponen terbesar, mencerminkan kebutuhan dasar pelayanan tetap ditopang pusat. DAK cenderung diproyeksikan fluktuatif mulai 2026 sampai 2030 dipengaruhi oleh DAK Fisik yang sangat tergantung tema nasional misalnya infrastruktur, pendidikan, kesehatan sehingga bisa fluktuatif akibat pergeseran prioritas pusat. Sedangkan DAK Non fisik cenderung stagnan, antara lain BOSP, TPG, Tamsil dan BOK Kesehatan karena merupakan mandatory spending untuk layanan dasar. Mengindikasikan peran *spending-based allocation* makin kuat (terutama untuk pendidikan dan kesehatan). Insentif fiskal diproyeksikan dengan pendekatan konservatif. Insentif fiskal ini berbasis kinerja (pelayanan publik, kinerja belanja, reformasi birokrasi dan tematik lain berdasarkan prioritas pusat). 0 (nol) di proyeksi mencerminkan pendekatan konservatif atau ketidakpastian. Pendapatan Bagi Hasil mengalami penurunan drastis dari Rp106M (*baseline* realisasi tahun 2024) dan lalu tumbuh moderat hingga 2030. Penurunan yang tajam tersebut terjadi karena perubahan klasifikasi bagi hasil PKB dan BBNKB menjadi skema pajak berupa opsen PKB dan Opsen BBNKB.

Secara agregat proyeksi pendapatan daerah dilakukan secara konservatif. Proyeksi konservatif memang aman secara fiskal, namun bisa memengaruhi ruang fiskal jika kenyataan lebih tinggi dan tidak diserap optimal. Untuk mengatasi keterbatasan kapasitas APBD dan meningkatkan kualitas pembangunan Pemerintah Kota Blitar perlu mengembangkan pembiayaan kreatif APBD. Pembiayaan kreatif bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada APBD, mempercepat pembangunan infrastruktur dan program prioritas, serta meningkatkan efisiensi dan kualitas proyek. Beberapa alternatif yang dapat dilakukan antara lain : Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah untuk membiayai proyek infrastruktur, kerja sama dengan lembaga keuangan, atau skema pembiayaan inovatif lainnya

Di sisi belanja tren total belanja meningkat moderat dari Rp975,5 miliar (*baseline* tahun 2024) dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 0,3%–1% (persen) per tahun. Namun, belanja tidak diimbangi oleh pendapatan, yang menyebabkan defisit anggaran terjadi setiap tahun. Belanja operasional

masih mendominasi struktur belanja (rata-rata 80–90% dari total belanja). Tren naik-turun ringan, tergantung pada komponen internal, misalnya belanja barang dan jasa fluktuatif. Belanja pegawai pada tahun 2024 sebesar Rp346,52 M naik jadi Rp377,20 M pada tahun 2030 dengan kecenderungan kenaikan stabil $\pm 1\text{--}2\%$ (persen) per tahun. Kenaikan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 15/2019 tentang gaji ASN dan proyeksi rekrutmen ASN. Hal yang perlu diantisipasi reformasi birokrasi dan ketentuan terkait belanja wajib pegawai. Belanja barang dan jasa merupakan cerminan dari kebutuhan layanan publik dan biaya administrasi. Belanja Hibah & Bantuan Sosial juga fluktuatif. Kondisi ini bisa karena sifat hibah yang berbasis prioritas tematik/tahun berjalan, diantaranya untuk pendanaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2029.

Belanja modal tahun 2024 sebesar Rp132,32 M diproyeksikan fluktuatif dengan peoyeksi tertinggi tahun 2030 sebesar Rp107,55 M. Belanja modal bersifat adaptif terhadap program infrastruktur yang berbasis pada usulan, prioritas daerah dan kemampuan pembiayaan. Belanja modal rata-rata 10–15% (persen) dari total belanja, perlu diantisipasi terkait ketentuan belanja wajib infrastruktur minimal 40% (persen) yang diterapkan paling lambat tahun 2027. Belanja Gedung & Bangunan dan Jalan, Irigasi, Jaringan dominan, tetapi fluktuatif tergantung proyek besar. Beberapa rencana belanja modal yang akan di prioritaskan periode 2026-2030 antara lain: pemenuhan infrastruktur dasar perkotaan (jalan, sistem transportasi, perumahan, sanitasi, persampahan, jaringan komunikasi), jaringan drainase dan irigasi untuk pengendalian luapan air sungai, pembangunan destinasi wisata buatan, pembangunan kawasan perdagangan dan industri, fasilitas umum serta ruang pelayanan publik lainnya. Belanja modal tanah direncanakan untuk akuisisi hak untuk pengembangan pengelolaan persampahan dan pembangunan fasilitas umum lainnya. Penurunan belanja peralatan dan mesin hingga tahun 2030 merupakan indikasi efisiensi atau minimnya pengadaan baru. Pengadaan peralatan mesin skala besar diprioritaskan untuk penunjang pelayanan umum misalnya jaringan pengelolaan persampahan, jaringan komunikasi, jaringan transportasi dan jaringan utilitas lainnya.

Belanja Tidak Terduga (BTT) naik signifikan sejak 2026 (*baseline* 2024 realisasi sebesar Rp2,1 M dan dianggarkan stabil sebesar Rp4 M). Penyediaan BTT sebagai *standby budget* sebagai antisipasi risiko lebih tinggi atau penyesuaian kebijakan belanja kontinjensi. Proyeksi realistis dengan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 1/2022 tentang HKPD dan kesiapsiagaan fiskal untuk penanggulangan bencana, kedaruratan, atau *force majeure*.

Surplus/Defisit anggaran terjadi di setiap tahun yang direncanakan. Defisit diperkirakan pada kisaran 2% (persen) sampai 4% (persen) dan dikendalikan stabil dalam besaran tersebut. Menunjukkan strategi belanja masih dalam batas

fiskal wajar, namun tetap perlu penguatan pendapatan daerah (PAD & transfer). Untuk menutup defisit anggaran tersebut direncanakan penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dan Pencairan Dana Cadangan. Sementara itu, Pengeluaran pembiayaan daerah diproyeksikan di tahun 2027 dan 2028 pada komponen penyertaan modal BUMD baru dan pembentukan dana cadangan dalam rangka persiapan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2029, yang kemudian di tahun 2029 dicairkan pada penerimaan pembiayaan pencairan dana cadangan.

Secara umum proyeksi APBD tahun 2026-2030 disimpulkan bahwa belanja operasi mendominasi, terutama karena gaji ASN dan layanan dasar. Belanja modal diarahkan untuk mendukung infrastruktur prioritas nasional. Kebijakan nasional seperti RPJMN, UU HKPD, dan PP ASN berpengaruh besar terhadap struktur belanja. Perlu diperhatikan terkait Evaluasi efektivitas belanja hibah & sosial, optimalkan proposal DAK & bantuan keuangan, selalu menjaga rasio belanja modal >20% (persen) untuk menjaga kualitas belanja pembangunan serta mendorong efisiensi belanja barang & jasa tanpa menurunkan pelayanan.

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk menyesuaikan dengan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, yang selanjutnya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Analisis terhadap isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solusi atas berbagai kondisi tidak ideal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah. Sedangkan permasalahan pembangunan daerah menggambarkan menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum ideal.

2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan dengan melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) perangkat daerah dan mengacu pada hasil evaluasi capaian kinerja berdasarkan urusan serta dielaborasi dengan berbagai permasalahan riil yang dihadapi perangkat daerah.

2.3.1.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan yang akan menjadi masukan bagi penentuan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Blitar dirumuskan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Permasalahan pembangunan yang dirumuskan secara holistik-tematik ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa masalah pokok sebagai berikut:

1. Rata – rata lama sekolah penduduk Kota Blitar yang masih 10,82 atau setingkat kelas 2 SMA, belum mencapai target yang ditetapkan yaitu rata rata lama sekolah 12 tahun atau lulus SMA;
2. Pemerintah Kota Blitar tidak bisa menjamin semua warganya untuk masuk sekolah setingkat SMA, karena Sekolah Tingkat Menengah merupakan kewenangan provinsi;
3. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi di angka 9,86 8(ribu jiwa) atau 6,75 % (persen) dari seluruh jumlah penduduk Kota Blitar;
4. Tingkat prevalensi stunting yang masih diangka 17,7% (persen) dalam angka nasional, sementara hitungan daerah pada angka 6,87% (persen). Perbedaan angka prevalensi stunting antara nasional dan daerah disebabkan adanya perbedaan model perhitungan daerah dan nasional;
5. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Blitar yang masih tinggi yaitu di angka 5,11%(persen);
6. Tingginya angka ketimpangan pendapatan Kota Blitar yaitu 0,353;
7. Rendahnya tingkat pemanfaatan digital dalam sektor pemasaran produk Kota Blitar;
8. Masih belum terintegrasinya data data perangkat daerah terutama data pelayanan, yang seharusnya sudah dapat digunakan secara interoperabilitas antar perangkat daerah;
9. Masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah, sehingga ketergantungan finansial atau anggaran pembangunan daerah masih pada level 80% (persen) kepada pemerintah pusat;
10. Menurunnya kuantitas SDM ASN dan kualitas yang belum memadai, diperkuat dengan komposisi struktural dalam tubuh Pemerintah Daerah Kota Blitar dapat mengakibatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan;
11. Masih banyaknya pengamen dan pengemis di perempatan yang ada lampu lalu lintas, menunjukkan rendahnya ketertiban umum;
12. Belum terpilahnya sampah dari rumah tangga mengakibatkan semua sampah masih terbuang ke TPA, sedangkan kemampuan tampung TPA dengan semua sampah terbuang ke TPA diperkirakan hanya tinggal 4 tahun saja;

13. Meskipun hampir seluruh rumah tangga di Kota Blitar telah memiliki akses sanitasi layak (99,21% (persen) tahun 2023), namun akses terhadap sanitasi aman masih sangat rendah, hanya sekitar 8,45% (persen) pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan perlunya pergeseran target dari sanitasi layak menuju sanitasi aman sesuai standar nasional, termasuk sistem pengolahan lumpur tinja (LLTT) yang efektif;
14. Masih terdapatnya kawasan kumuh 62 Ha, seharusnya pada akhir tahun 2026 ditargetkan sudah 0% (persen) tapi masih ada 1,9% (persen) dalam kondisi kumuh;
15. Masih terdapat rumah yang berlokasi di sempadan sungai, yang mana merupakan area yang tidak diperkenankan untuk rumah tinggal maupun bangunan lainnya diluar ketentuan. Rumah yang berada di area sempadan sangat rawan terjadinya bencana selain itu juga dapat mengganggu fungsi dari sungai;
16. Masih minimnya moda transportasi massal, sehingga memperbanyak penggunaan kendaraan pribadi yang berakibat semakin besarnya potensi penambahan polusi udara dan peningkatan emisi gas karbon;
17. Mulai dirasakannya dampak perubahan iklim, terdapat 5 kelurahan yang mengalami penurunan permukaan air tanah, sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih dari sumur pompanya oleh karena semakin meningkatnya alih fungsi lahan sehingga mengurangi daerah resapan air;
18. Belum optimalnya penanganan pencemaran air terutama yang disebabkan oleh limbah domestik, industri tahu, dan peternakan;
19. Rendahnya Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kota Blitar tahun 2024 yaitu sebesar 34,13 akibat minimnya tutupan vegetasi pohon keras, alih fungsi lahan pertanian, dan belum optimalnya ruang terbuka hijau yang menyebabkan penurunan daya dukung lingkungan serta meningkatnya risiko banjir dan degradasi ekosistem;
20. Penyelenggaraan penataan ruang di Kota Blitar masih berada di peringkat 20 dari 38 kabupaten/kota sehingga perlu memperhatikan aspek pemanfaatan ruang terutama dalam hal penerbitan KKPR dan perizinan-perizinan lanjutan dari KKPR.

2.3.2. Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis daerah akan menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional,

maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap daerah dalam kurun waktu jangka menengah.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

- 2.3.2.1. Isu Internasional
- 2.3.2.2. Isu Strategis Nasional
- 2.3.2.3. Isu Strategis Provinsi Jawa Timur

Isu Internasional, Isu Strategis Nasional dan Isu Strategis Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada alamat <https://q.me-qr.com/qR2ubHDm> atau dengan memindai QR Code dengan tabel bantu sebagai berikut :



No.	Judul	Hal.
2.3.2.1.	Isu Internasional	II 161
2.3.2.1.1.	Isu strategis Global yang Disebutkan dalam RPJMN 2025 – 2029	II 161
2.3.2.1.2.	Sustainable Development Goals (SDG's)	II 161
2.3.2.1.3.	Pemanasan Global dan Perubahan Iklim Global (Global Warming & Climate Change)	II 163
2.3.2.1.4.	Dunia tanpa batas (Bordesless)	II 163
2.3.2.1.5.	Krisis Global	II 163
2.3.2.2.	Isu Strategis Nasional	II 164
2.3.2.2.1.	Isu Strategis Nasional Indonesia dengan memperhatikan RPJPN 2025 – 2045	II 164
2.3.2.2.2.	Pembangunan Infrastruktur	II 165
2.3.2.2.3.	Lingkungan Hidup	II 166

2.3.2.2.4.	Pemberdayaan Ekonomi	II	166
2.3.2.2.5.	Pertahanan Keamanan	II	167
2.3.2.3.	Isu Strategis Provinsi Jawa Timur	II	167

2.3.2.4. Telaahan / Isu Kebijakan Daerah

2.3.2.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Blitar Tahun 2025 - 2045

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar juga mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar. Hal ini bertujuan agar terwujud keselarasan antara sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan tujuan, kebijakan, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang serta indikasi program. Adapun muatan RTRW secara umum diuraikan pada bagian ini.

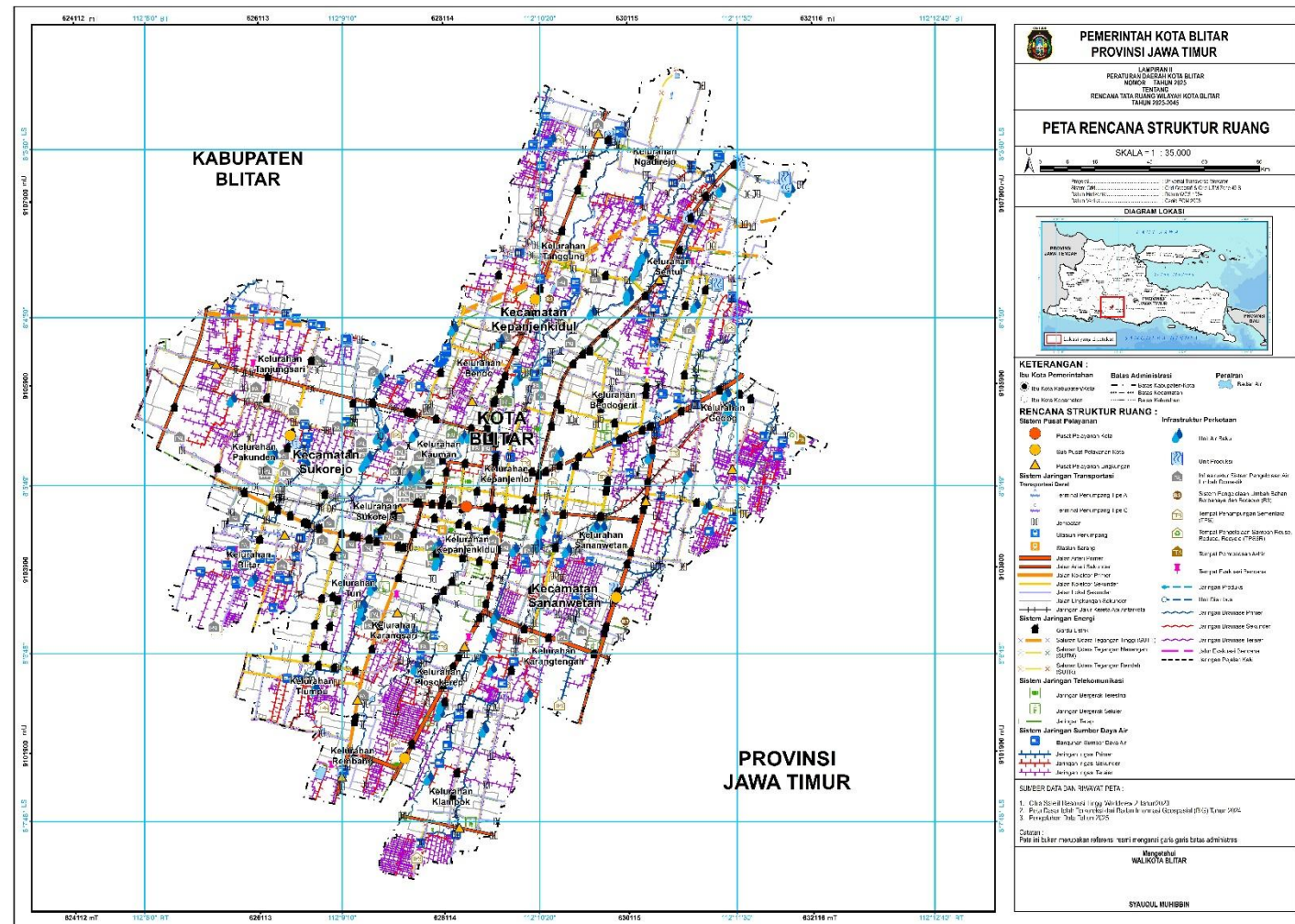
a. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah Kota adalah rencana susunan pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah Kota yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kota, dan mengintegrasikan wilayah kota. Sistem perkotaan wilayah tersebut di atas dapat berupa pusat perekonomian, rencana kota baru, simpul ekonomi baru dan/atau koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ruang, keberlanjutan pembangunan dan ketahanan masyarakat.

Rencana struktur ruang wilayah kota dirumuskan dengan kriteria:

- a. Berdasarkan strategi penataan ruang wilayah kota;
- b. Mempertimbangkan kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah kota dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan;
- c. Mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kota;
- d. Mengacu rencana struktur ruang wilayah nasional (RTRW nasional dan rencana rincinya), rencana struktur ruang wilayah provinsi (RTRW provinsi), serta memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kota/kota yang berbatasan;
- e. Pusat kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kota memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mengadopsi pusat-pusat kegiatan yang kewenangan penetapannya berada pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang berada di wilayah kota bersangkutan;
 - 2) Memuat penetapan pusat pelayanan kawasan (PPK) serta pusat pelayanan lingkungan (PPL);
 - 3) Harus berhirarki dan/atau berjejing di dalam ruang wilayah kota serta saling terkait menjadi satu kesatuan sistem perkotaan; dan

- 4) Mempertimbangkan cakupan pelayanan bagi kawasan perkotaan dan Kawasan perdesaan yang berada dalam wilayah kota, yang meliputi pusat layanan dan peletakan jaringan prasarana wilayah kota yang menunjang keterkaitan fungsional antar pusat pelayanan.
- f. Dapat ditransformasikan ke dalam penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun; dan
- g. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Gambar 2.58
Peta Rencana Struktur Ruang Kota Blitar

b. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang wilayah kota adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya dirumuskan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada strategi penataan ruang wilayah kota;
2. Mempertimbangkan alokasi ruang wilayah kota dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan;
3. Mengacu rencana pola ruang wilayah nasional (RTRW nasional dan rencana rincinya), rencana pola ruang wilayah provinsi, kondisi eksisting dan dokumen rencana sektoral terbaru;
4. Dapat ditransformasikan ke dalam penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun; dan
5. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

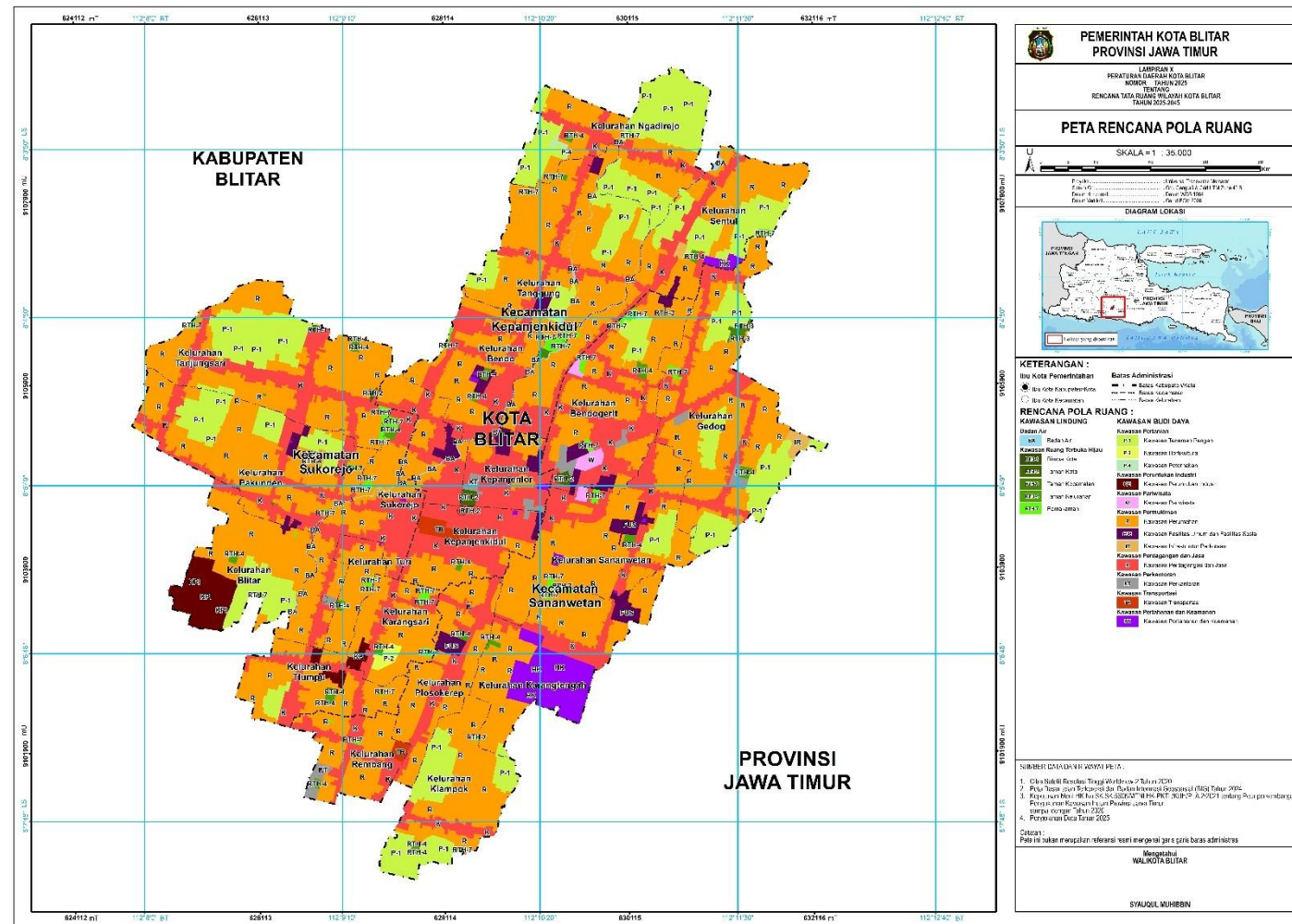
Penyusunan rencana pola ruang wilayah kota Blitar telah mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, rencana pola ruang Kota Blitar akan dijabarkan sebagai berikut:

A. Kawasan Lindung

1. Badan Air (BA)
2. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

B. Kawasan Budi Daya

1. Kawasan Pertanian (P)
2. Kawasan Peruntukan Industri (KPI)
3. Kawasan Pariwisata (W)
4. Kawasan Permukiman (PM)
5. Kawasan Perdagangan dan Jasa (K)
6. Kawasan Perkantoran (KT)
7. Kawasan Transportasi (TR)
8. Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK)



Sumber : *Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025*

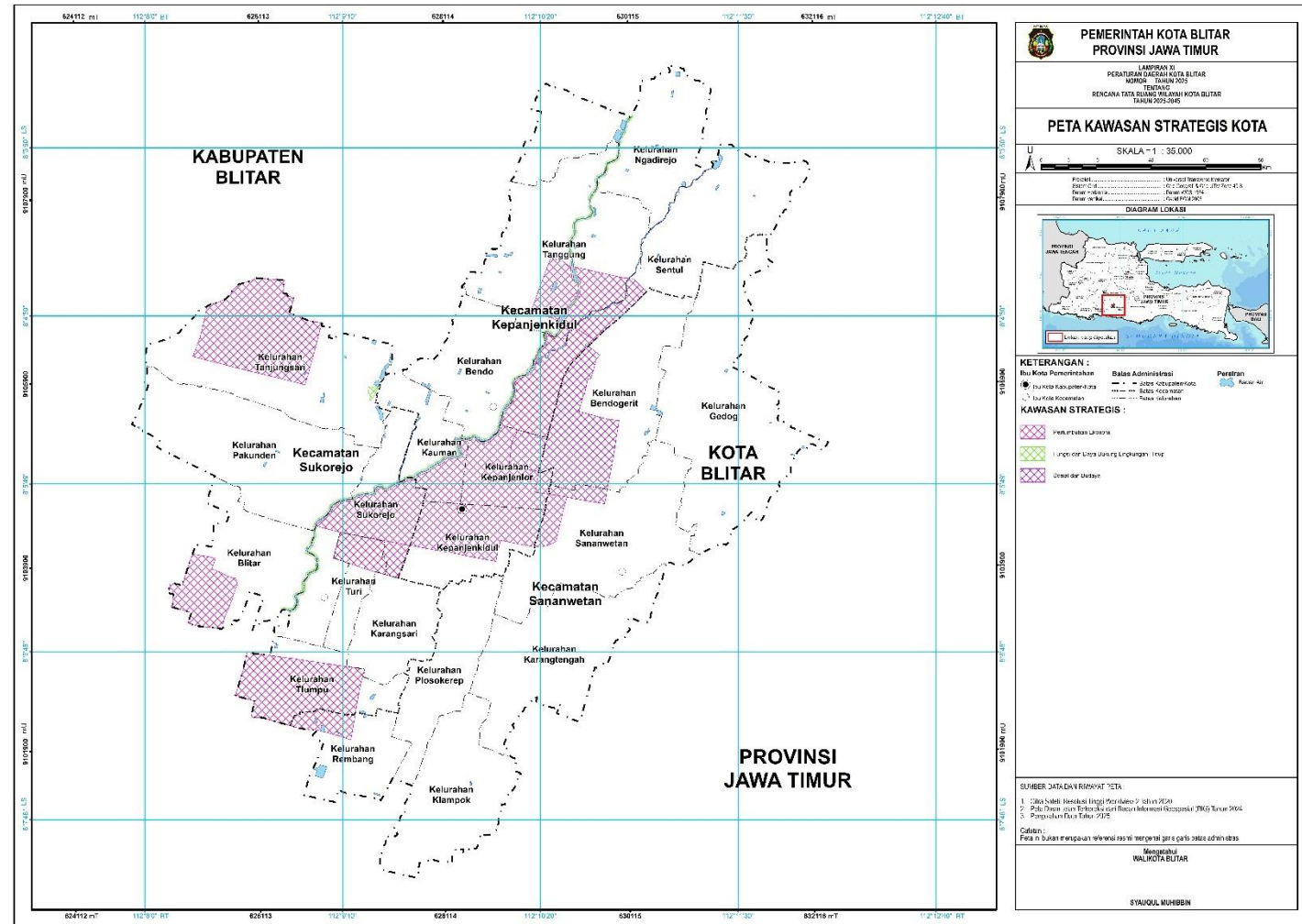
Gambar 2.59
Peta Rencana Pola Ruang Kota Blitar

c. Kawasan Strategis Kota

Kawasan strategis kota merupakan bagian wilayah kota yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kota di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup. Delineasi kawasan strategis kota berbentuk poligon dan bersifat indikatif. Nilai strategis kawasan strategis kota dirumuskan berdasarkan kriteria:

- a. Mendukung tujuan penataan ruang wilayah kota;
- b. Tidak bertentangan dengan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota;
- c. Berdasarkan nilai strategis dari aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan;
- d. Kesepakatan masyarakat berdasarkan kebijakan terhadap tingkat kestrategisan kawasan yang akan ditetapkan di wilayah kota;
- e. Berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kota;
- f. Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah kota yang memiliki kekhususan;
- g. Menyebutkan dan memperhatikan kawasan strategis nasional yang ada di wilayah kota;
- h. Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang jelas;
- i. Mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan kemampuan pemerintah daerah kota untuk bekerja sama dengan badan usaha dan/atau masyarakat;
- j. Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kota; dan
- k. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kawasan strategis Kota Blitar terdiri dari kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya serta kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Gambar 2.60
Peta Rencana Kawasan Strategis Kota Blitar

d. Isu Strategis

Isu strategis wilayah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan penataan ruang daerah dimasa yang akan datang. Isu strategis wilayah di Kota Blitar antara lain:

1. Rencana pengembangan sistem jaringan persampahan wilayah lintas kab./kota: Blitar yang melayani Kota Blitar dan Kabupaten Blitar;
2. Rencana pembangunan Pasar Agro yang merupakan salah satu amanah dari Perpres 109 tahun 2020 terkait program strategis nasional belum dapat dilakukan;
3. Pembangunan Double Track jalur kereta api di jalur Jawa Selatan termasuk melewati Kota Blitar tertuang dalam rencana Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No. 9 tahun 2022 tentang Proyek Strategis Nasional;
4. Konversi lahan tidak terbangun menjadi terbangun karena adanya perubahan pemanfaatan ruang dari non terbangun menjadi terbangun. Banyak tumbuhnya kawasan perumahan;
5. Pengembangan wisata kompleks Makam Bung Karno, Perjuangan PETA dan Kampung Wisata Kreatif termuat dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 sebagai dasar Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
6. Penemuan situs Cagar Budaya baru yakni Situs Gedog Baru di Kota Blitar menambah koleksi Cagar Budaya dimana hal tersebut berpengaruh pada ketersediaan SK Cagar Budaya di Kota Blitar ini;
7. Rencana Pengembangan Jalan Tol Tulungagung-Blitar-Kepanjen (Agungblijen) termuat dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 367/KPTS/M/2023;
8. Adanya perbedaan batas administrasi dalam Permendagri no 44 tahun 2018, batas yang digunakan dalam RTRW kota yang ditetapkan pada tahun 2011, dan batas administrasi pada RTRW Provinsi yang ditetapkan pada tahun 2019;
9. Beberapa mata air teridentifikasi mengering.

Isu-isu strategis di Kota Blitar akan diakomodir ke dalam pertimbangan penyusunan rencana sebagai berikut:



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Gambar 2.61
Isu Strategis Kota Blitar

e. Potensi

Potensi Wilayah adalah kemampuan suatu daerah yang berupa sumber daya yang dapat diambil manfaatnya untuk dikembangkan sehingga dapat meningkatkan kemampuan wilayah yang bersangkutan. Potensi Kota Blitar antara lain:

1. Potensi Ekonomi Wilayah

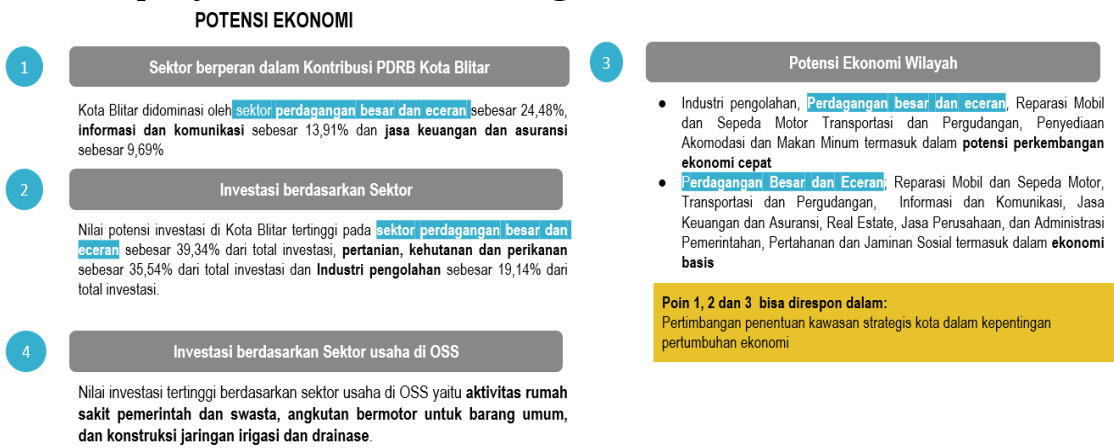
Potensi ekonomi wilayah di Kota Blitar sebagai berikut:

1. Kota Blitar didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 24,48% (persen), informasi dan komunikasi sebesar 13,91% (persen) dan jasa keuangan dan asuransi sebesar 9,69% (persen);
2. Nilai potensi investasi di Kota Blitar tertinggi pada sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 39,34% (persen) dari total investasi, pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 35,54% (persen) dari total investasi dan Industri pengolahan sebesar 19,14% (persen) dari total investasi;
3. Industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor transportasi dan pergudangan, penyediaan

akomodasi dan makan minum termasuk dalam potensi perkembangan ekonomi cepat;

- 4. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial termasuk dalam ekonomi basis;
- 5. Nilai investasi tertinggi berdasarkan sektor usaha di OSS yaitu aktivitas rumah sakit pemerintah dan swasta, angkutan bermotor untuk barang umum, dan konstruksi jaringan irigasi dan drainase.

Potensi-potensi ekonomi wilayah di Kota Blitar akan diakomodir ke dalam pertimbangan penyusunan rencana sebagai berikut:



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Gambar 2.62
Potensi Ekonomi Kota Blitar

2. Potensi Sarana dan Prasarana

Potensi sarana dan prasarana di Kota Blitar sebagai berikut:

- 1. Terdapat program SANIMAS (Sanitasi Masyarakat) sampai dengan tahun 2018 telah mencapai jumlah sambungan rumah sebanyak 3.134 SR untuk meningkatkan sarana akses sanitasi yang lebih luas, dan guna meningkatkan akses kebersihan serta kesehatan lingkungan;
- 2. Potensi surplus unit produksi, terdapat kapasitas produksi menganggur sebanyak 722.472 m3 (16,44% (persen)) disebabkan pemanfaatan pompa disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan dan efisiensi pemakaian listrik.

Potensi-potensi sarana dan prasarana di Kota Blitar akan diakomodir ke dalam pertimbangan penyusunan rencana sebagai berikut :

POTENSI PRASARANA	POTENSI PRASARANA
Sistem Pengolahan Limbah dan Sanitasi Terdapat program SANIMAS (Sanitasi Masyarakat) sampai dengan tahun 2018 telah mencapai jumlah sambungan rumah sebanyak 3.134 SR untuk meningkatkan sarana akses sanitasi yang lebih luas, dan guna meningkatkan akses kebersihan serta kesehatan lingkungan Direspom dalam: Rencana struktur ruang, Indikasi Program (mengakomodir kebijakan sektoral terkait seperti RP2KPKP Kota Blitar)	Jaringan Air Minum Potensi surplus unit produksi, terdapat kapasitas produksi menganggur sebanyak 722.472 m3 (16,44%) disebabkan pemanfaatan pompa disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan dan efisiensi pemakaian listrik Direspom dalam: Rencana struktur ruang dan indikasi program (mengakomodir rencana dari kebijakan sektoral terkait seperti RISPAM Kota Blitar Tahun 2022)

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Gambar 2.63

Potensi Sarana dan Prasarana Kota Blitar

3. Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam di Kota Blitar sebagai berikut:

1. Pada sektor tanaman pangan, tanaman jagung sendiri memiliki jumlah produksi terbesar dibandingkan tanaman pangan lainnya di tahun 2022 yakni 73,256 kuintal meskipun luas panennya tidak sebesar tanaman padi. Hal tersebut tentunya berpotensi sebagai pengembangan tanaman pangan dari hulu hingga hilirnya nanti jika dikelola secara optimal;
2. Pada Sektor industri, industri didominasi oleh industri makanan, minuman, dan tembakau yakni sebesar 2,935 unit di tahun 2022. Sektor tersebut tentunya apabila disertai dukungan baik dari pihak swasta dan pemerintah, atau pihak lainnya akan mampu menambah PAD Kota Blitar kedepan;
3. Pariwisata di Kota Blitar dikenal dengan sejarahnya dimana hal tersebut juga sejalan dengan julukan Kota Blitar Sebagai Kota Patria. Wisata Sejarah yang ada di Kota Blitar cukup beragam antara lain Makam Bung Karno, Istana Gebang, Perpustakaan Bung Karno, dan sebagainya. Selain itu juga terdapat potensi-potensi wisata lainnya dimana ditemukannya Situs baru, yakni Situs Gedog.

Potensi sumber daya alam di Kota Blitar akan diakomodir ke dalam pertimbangan penyusunan rencana sebagai berikut:

POTENSI SUMBER DAYA ALAM	POTENSI SUMBER DAYA ALAM
Pertanian dan Industri • Pada sektor tanaman pangan, tanaman jagung sendiri memiliki jumlah produksi terbesar dibandingkan tanaman pangan lainnya di tahun 2022 yakni 73,256 kwintal meskipun luas panennya tidak sebesar tanaman padi. • Pada Sektor jenis industri, Industri didominasi oleh Industri Makanan, Minuman, dan Tembakau yakni sebesar 2,935 unit di tahun 2022. Hal tersebut juga terlihat dari berbagai makanan, olahan makanan khas Kota Blitar yang banyak dituju wisatawan sebagai Direspom dalam: indikasi program (mengakomodir dari Hasil Potensi SDA utamanya sektor tanaman pangan dan sektor industri)	Pariwisata Pariwisata di Kota Blitar dikenal dengan sejarahnya dimana hal tersebut juga sejalan dengan julukan Kota Blitar Sebagai Kota Patria. Wisata Sejarah yang ada di Kota Blitar cukup beragam antara lain Makam Bung Karno, Istana Gebang, Perpustakaan Bung Karno, dst. Selain itu juga terdapat potensi wisata lainnya dimana ditemukannya Situs baru, yakni Situs Gedog. Direspom dalam: indikasi program (mengakomodir dari Data Potensi Wisata serta SK Cagar Budaya tahun 2001)

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Gambar 2.64

Potensi Sumber Daya Alam Kota Blitar

4. Potensi Fisik Wilayah

Potensi fisik wilayah di Kota Blitar sebagai berikut:

1. Kota Blitar didominasi oleh klasifikasi pengembangan tinggi sebesar 73,76% (persen) dari total luas wilayah. Sehingga dapat mendukung untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya;
2. Status daya dukung air di Kota Blitar adalah belum terlampaui yang berarti kebutuhan air masih di bawah ketersediaan air. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat nilai surplus yang besar dari ketersediaan air di Kota Blitar sehingga masih bisa digunakan untuk keperluan kegiatan budidaya lainnya.

f. Permasalahan

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan wilayah dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan penataan ruang. Berikut permasalahan di Kota Blitar:

1. SK Cagar Budaya yang belum diperbaharui dimana untuk yang terakhir ada pada Keputusan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2001 tentang Penetapan Lokasi Benda Cagar Budaya di Wilayah Kota Blitar sebagai Obyek Wisata Daerah. Lokasi yang tercantum ada 10 lokasi, antara lain Makam Proklamator RI Bung Karno Jalan Mayjen Sungkono, Rumah Ibu Wardoyo, Jalan Sultan Agung, Taman Makam Pahlawan Raden Wijaya Jalan Shodanco Supriyadi, Komplek Monumen PETA Jalan Shodanco Supriyadi, Makam Aryo Blitar Jalan Pamungkur Blitar, Komplek Makam Pangeranan, Jalan Jalan Shodanco Blitar Jalan Sultan Agung, Komplek Pendopo Kabupaten Blitar dan Alon - Alon Jalan Semeru, Rumah Dinas Walikota Blitar Jalan Shodanco Supriyadi , Rumah Dinas Dan Yon 511 Jalan Panglima Sudirman, Kompleks Bangunan PGSD Jalan Mayjen Sungkono;
2. Masih kecilnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan kota sehingga armada yang ada beralih penggunaannya untuk angkutan sekolah;
3. Kondisi Terminal Tipe C Kota Blitar yang terbengkalai. Ada rencana untuk difungsikan

sebagai tempat tunggu ojek online dan angkutan wisata;

4. Belum optimalnya pemanfaatan terminal barang diukur dari capaian retribusi pada semester pertama tahun 2023 yang masih jauh dari target;
 5. Terjadi perubahan lahan tidak terbangun menjadi perumahan yang masif di Kota Blitar. Perubahan lahan paling besar terjadi di Kecamatan Sananwetan. Jenis perubahan paling besar yang terjadi adalah perkebunan menjadi perumahan;
 6. Status daya dukung bahan pangan di Kota Blitar adalah terlampaui yang berarti kebutuhan pangan melebihi ketersediaan pangan. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Blitar berpotensi tidak tercukupi kebutuhan bahan pangannya;
 7. Belum optimalnya pemanfaatan IPLT Kota Blitar, dimana kondisi saat ini ritase yang masuk masih sedikit;
 8. Jika dilihat dari pelanggan PLN, belum optimalnya pemenuhan pelayanan PLN di Kecamatan Sukorejo sebesar -12,69% (persen) dari total jumlah KK dan Kecamatan Sananwetan sebesar -9,67% (persen) dari total jumlah KK;
 9. Terdapat 15,02% (persen) SPAM non Aktif dari keseluruhan SPAM terbangun;
 10. Data tampung TPA Ngegong overload;
 11. Kerusakan bangunan sumber daya air;
 12. Bahaya bencana banjir lahar.
- g. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota
1. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota Blitar
Tujuan penataan ruang wilayah kota dirumuskan dengan kriteria:
 - a. Mendukung tujuan penataan ruang yang tercantum pada RTR (Rencana Tata Ruang) di atasnya (RTRW nasional dan rencana rincinya, serta RTRW provinsi dan rencana rincinya) melalui keterpaduan antar sektor, wilayah, dan masyarakat;
 - b. Mewujudkan aspek keruangan yang harmonis dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - c. Mengakomodasi fungsi dan peran kota yang telah ditetapkan dalam RTRW nasional, serta RTRW provinsi;
 - d. Memperhatikan isu strategis, potensi unggulan dan karakteristik wilayah kota;
 - e. Jelas, spesifik, terukur dan dapat dicapai dalam jangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun; dan
 - f. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan tujuan penataan ruang provinsi dan tujuan pembangunan sektoral Kota Blitar, tujuan penataan ruang wilayah Kota Blitar dirumuskan sebagai berikut:

“MEWUJUDKAN KOTA BLITAR SEBAGAI PUSAT PELAYANAN PERDAGANGAN DAN JASA REGIONAL DAN KOTA WISATA YANG DIDUKUNG OLEH INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN DAN PERKEBUNAN YANG PRODUKTIF DAN BERKELANJUTAN.”

Kata Kunci:

1. Pelayanan Perdagangan Jasa

Adanya pengembangan dan peningkatan pariwisata di Kota Blitar secara langsung akan berimbas pada sektor perdagangan dan jasa, dimana sektor inilah yang akan mendukung pariwisata yang ada. Banyaknya pengunjung tentu membutuhkan berbagai kebutuhan yang tentunya dapat disediakan melalui adanya perdagangan dan jasa disekitar lokasi wisata tersebut. Dimana dalam 20 (dua puluh) tahun kedepan pelayanan perdagangan jasa tidak hanya dalam lingkup regional saja, diharapkan juga dapat melayani pada skala nasional. Hal tersebut juga didukung dengan ditetapkannya Kota Blitar sebagai Pusat Kegiatan Wilayah dalam RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 serta transformasi Kota Blitar yang mampu menjadi simpul transit dan pusat distribusi komoditas unggulan.

2. Kota Wisata

Kota Blitar disebut sebagai Kota Patria karena aspek patriotik dan sejarah-sejarah kebangsaan dan kepahlawanan sangatlah kental di kota ini. Peninggalan-peninggalan sejarah dan tapak tilas perjuangan para pahlawanan banyak terdapat di Kota Blitar. Hal ini dimanfaatkan Kota Blitar sebagai daerah wisata, selain guna mengenang jasa pahlawan juga untuk menumbuhkan dan meningkatkan rasa kepahlawanan dan kebangsaan, cinta tanah air kepada masyarakat luas pada umumnya dan kepada para generasi bangsa terutama pemuda-pemudi Kota Blitar pada khususnya. Wisata kebangsaan juga berkaitan dengan wisata religius yang ada di Kota Blitar, dimana terdapat makam gantung Djojodigda, Masjid Ar-Rahman serta Masjid Agung Blitar. Selain itu juga merupakan Pengembangan Kota Wisata yang ada pada Kota Blitar juga merupakan arahan dari RTRW Nasional, Arahan Peraturan Presiden Nomor

80 Tahun 2019, RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 serta penetapan ODTW lingkup sejarah dalam RIPPARDA Jawa Timur Tahun 2017-2032.

3. Industri Pengolahan Pertanian dan Perkebunan
Pengembangan sektor pertanian dan Perkebunan akan mendukung keberlanjutan ketahanan pangan utamanya bagi Kota Blitar. Dimana diharapkan nantinya pengembangan tidak hanya didukung dari sisi produksi saja melainkan sampai pada proses pengolahan industrinya baik dalam sektor pertanian serta perkebunannya. Hal tersebut juga sesuai dengan arahan RTRW Nasional yang menyatakan Kota Blitar diarahkan sebagai kawasan andalan Kediri-Tulungagung-Blitar yang berfokus pada pengembangan pertanian, perkebunan, industri, perikanan, dan pariwisata.

4. Produktif dan Berkelanjutan

Produktif dalam artian mampu memberikan hasil yang optimal dengan meningkatkan produktivitas pertanian perkotaan maupun kegiatan lain yang mampu memberikan nilai tambah bagi Kota Blitar. Selain itu produktif juga menggambarkan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien yang tentunya juga terukur dimana akan mengikuti arus yang semakin dinamis. Sedangkan berkelanjutan dimaksudkan agar Kota Blitar tidak hanya memperhatikan generasi saat ini dalam tata ruang, namun juga bagaimana kota dapat tetap nyaman bagi generasi di masa yang akan datang dengan memperhatikan lingkungan.

2. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota Blitar

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kota ditetapkan kebijakan dan strategi perencanaan penataan ruang wilayah. Kebijakan penataan ruang wilayah kota dirumuskan dengan kriteria:

1. Mampu menjabarkan tujuan penataan ruang wilayah kota;
2. Mampu menjawab isu strategis di wilayah kota;
3. Mempertimbangkan kebijakan pengembangan wilayah kota;
4. Mempertimbangkan kebijakan pengembangan kawasan strategis kota;
5. Mempertimbangkan kapasitas sumber daya yang dimiliki;
6. Mempertimbangkan kebijakan peruntukan ruang pada sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, waduk, dan mata air; dan
7. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan tujuan penataan ruang wilayah Kota Blitar, kebijakan penataan ruang wilayah Kota Blitar dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengembangan fungsi kota dalam mewujudkan peran regional;
2. Pengembangan pusat pelayanan kegiatan dan memperkuat interkoneksi antar kawasan;
3. Pengembangan wisata kebangsaan dan wisata lainnya;
4. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman;
5. Peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung;
6. Pengembangan pertanian dan perkebunan perkotaan serta industri pengolahannya;
7. Optimalisasi peran ruang terbuka hijau kota;
8. Pelestarian bangunan cagar budaya;
9. Pengembangan kawasan budi daya terbangun yang mempertimbangkan efisiensi pemanfaatan ruang;
10. Pengembangan kawasan strategis kota untuk mengoptimalkan potensi kawasan;
11. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan produktif; dan
12. Peningkatan ketahanan ruang untuk mengurangi risiko bencana.

3. Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Blitar

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kota ditetapkan kebijakan dan strategi perencanaan penataan ruang wilayah. Strategi penataan ruang wilayah kota dirumuskan dengan kriteria:

1. Menjabarkan kebijakan penataan ruang wilayah kota;
2. Harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kota;
3. Berfungsi sebagai arahan bagi penyusunan indikasi program utama 5 (lima) tahunan dalam RTRW Kota;
4. Berfungsi sebagai dasar penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota;
5. Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan; dan
6. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Strategi penataan ruang akan direspon oleh rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.

Rencana struktur ruang Kota Blitar tidak terlepas dari fungsi dan peranan Kota Blitar dalam lingkup regional dan nasional, isu strategis wilayah, potensi dan permasalahan wilayah, serta tujuan penataan ruang Kota Blitar. Rencana pola ruang

Kota Blitar mengarah pada alokasi lahan yang berorientasi pada kawasan pengembangan atau budidaya dan pentingnya perlindungan terhadap kawasan lindung.

Kebijakan dan strategi Kota Blitar dijabarkan sebagai berikut:

1. Kebijakan 1: Pengembangan fungsi kota dalam mewujudkan peran regional, memiliki strategi penataan ruang sebagai berikut:
 - a. mengembangkan kegiatan perdagangan pelayanan regional;
 - b. mengarahkan pengembangan sektor-sektor ekonomi strategis dengan mengutamakan usaha ekonomi kerakyatan;
 - c. mengembangkan sektor pendukung perekonomian yang melayani kawasan regional;
 - d. meningkatkan penyediaan fasilitas kota yang mempunyai skala pelayanan regional;
 - e. meningkatkan aksesibilitas pelayanan skala regional; dan
 - f. mengembangkan kerjasama lintas wilayah dalam wilayah pengembangan blitar untuk memantapkan pelayanan dan pengembangan regional dalam berbagai sektor kegiatan.
2. Kebijakan 2: Pengembangan pusat pelayanan kegiatan dan memperkuat interkoneksi antar kawasan, memiliki strategi penataan ruang sebagai berikut:
 - a. memantapkan dan mengembangkan pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota dan pusat pelayanan lingkungan yang terintegrasi dan saling melengkapi;
 - b. memantapkan peran pusat pelayanan kota yang mampu melayani skala internal kota dan regional;
 - c. mengembangkan sub pusat pelayanan kota yang mendukung peran pusat pelayanan kota sebagai pusat perdagangan jasa, pariwisata dan pelayanan umum skala regional;
 - d. mengembangkan pusat pelayanan lingkungan pada masing-masing kawasan permukiman di kelurahan;
 - e. meningkatkan aksesibilitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar bagian wilayah kota;
 - f. memisahkan pergerakan antar kota dan pergerakan dalam kota; dan
 - g. meningkatkan pelayanan dan integrasi antar moda transportasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat pelayanan kota dan sub pusat pelayanan kota dan wilayah di sekitarnya.

3. Kebijakan 3: Pengembangan wisata kebangsaan dan wisata lainnya, memiliki strategi penataan ruang sebagai berikut:
 - a. meningkatkan dan mengembangkan objek wisata kebangsaan dan objek wisata lainnya;
 - b. mengembangkan dan melestarikan potensi budaya lokal masyarakat sebagai daya tarik wisata;
 - c. meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan pariwisata;
 - d. meningkatkan promosi dan pemasaran wisata;
 - e. mengembangkan roadmap pariwisata; dan
 - f. meningkatkan kerjasama pariwisata lintas wilayah.
4. Kebijakan 4: Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, memiliki strategi penataan ruang sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kualitas permukiman dan perumahan diutamakan untuk kawasan permukiman kumuh;
 - b. memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan sehat, baik oleh pemerintah maupun melalui kerjasama investasi swasta;
 - c. mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hirarki pelayanan;
 - d. mengembangkan prasarana jaringan listrik dan sumber energi listrik alternatif;
 - e. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi yang berbasis informasi pada kawasan pelayanan publik;
 - f. mengoptimalkan pendayagunaan dan pengelolaan sumber daya air untuk menjaga ketersediaan serta keberlanjutan sumber daya air;
 - g. mengoptimalkan sistem pengelolaan persampahan terpadu dengan teknik-teknik yang berwawasan lingkungan serta pemanfaatan persampahan;
 - h. mengembangkan prasarana pengolahan air minum;
 - i. meningkatkan kualitas air bersih menjadi air minum pada kawasan-kawasan pelayanan umum;
 - j. meningkatkan prasarana pengelolaan air limbah rumah tangga yang berbasis komunal; dan
 - k. mengoptimalkan fungsi jaringan.
5. Kebijakan 5: Peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung, memiliki strategi penataan ruang sebagai berikut:

- a. melestarikan kawasan resapan air untuk menjaga ketersediaan sumberdaya air;
 - b. pengendalian perubahan kawasan lindung melalui pembatasan pembangunan di lahan produktif;
 - a. mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah rusak atau pemanfaatannya yang telah menyimpang; dan
 - b. mengelola kawasan lindung secara terpadu.
6. Kebijakan 6: Pengembangan pertanian dan perkebunan perkotaan serta industri pengolahan, memiliki strategi penataan ruang sebagai berikut:
- a. meningkatkan dan mengembangkan kawasan agrowisata di bagian selatan kota;
 - b. mengembangkan kawasan pertanian dan perkebunan serta industri pengolahannya;
 - c. meningkatkan sarana dan prasarana pertanian dan perkebunan serta industri pengolahannya; dan
 - d. mendorong peran serta masyarakat dan swasta pengelolaan kawasan pertanian dan perkebunan serta industri pengolahannya.
7. Kebijakan 7: Optimalisasi peran ruang terbuka hijau kota, memiliki strategi penataan ruang sebagai berikut:
- a. mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau yang ada;
 - b. mengembalikan ruang terbuka hijau yang telah beralih fungsi;
 - c. meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau meliputi lapangan olahraga terbuka, taman kota, taman lingkungan, sabuk hijau, jalur hijau jalan, sempadan, dan inovasi penyediaan RTH lainnya;
 - d. pengembangan ruang terbuka hijau dengan desain ramah lingkungan untuk meningkatkan fungsi keberlanjutan; dan
 - e. mendorong peran serta masyarakat dan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau kota.
8. Kebijakan 8: Pelestarian kawasan cagar budaya, memiliki strategi penataan ruang sebagai berikut:
- a. menetapkan bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah sebagai bangunan cagar budaya;
 - b. melakukan pemeliharaan dan revitalisasi bangunan cagar budaya kota;
 - c. mengembangkan potensi kawasan cagar budaya untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan, kepariwisataan dan ekonomi masyarakat; dan

- d. mendorong peran serta masyarakat dalam upaya melestarikan bangunan dan kawasan cagar budaya.
9. Kebijakan 9: Pengembangan kawasan budidaya terbangun yang mempertimbangkan efisiensi pemanfaatan ruang, memiliki strategi penataan ruang sebagai berikut:
- a. mengembangkan kawasan budidaya terbangun secara vertikal di kawasan pusat kota;
 - b. mendistribusikan pengembangan perumahan yang diarahkan pada kawasan selatan kota;
 - c. meningkatkan pembangunan permukiman vertikal;
 - d. mengendalikan alih fungsi lahan menjadi permukiman;
 - e. mencegah, merehabilitasi dan merevitalisasi kawasan permukiman kumuh;
 - f. mengembangkan dan menata kawasan perdagangan secara merata sesuai dengan fungsi pelayanan kawasan; dan
 - g. mengembangkan ruang-ruang kawasan yang proporsional dengan sistem insentif dan disinsentif.
10. Kebijakan 10: Pengembangan kawasan strategis kota untuk mengoptimalisasi potensi kawasan, memiliki strategi penataan ruang sebagai berikut:
- a. mengembangkan kawasan pusat perdagangan dan jasa pusat kota sebagai kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
 - b. mengembangkan kawasan yang mewakili karakteristik dan penanda budaya kota sebagai kawasan strategis sosial budaya;
 - c. mengembangkan kawasan yang mendukung keseimbangan lingkungan kota sebagai kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - d. mendorong peran dan fungsi masing-masing kawasan strategis untuk mencapai tujuan penataan ruang kota.
11. Kebijakan 11: Pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan produktif, memiliki strategi penataan ruang sebagai berikut:
- a. menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka perlindungan lahan pangan; dan
 - b. mengendalikan alih fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
12. Kebijakan 11: Peningkatan Ketahanan Ruang untuk Mengurangi Risiko Bencana, memiliki strategi penataan ruang sebagai berikut:
- a. meningkatkan pengendalian dan pengawasan pembangunan pada kawasan rawan bencana;

- b. mengembangkan sistem mitigasi bencana;
- c. menetapkan kawasan rawan bencana melalui sistem zonasi kawasan rawan bencana;
- d. mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana pada kawasan rawan bencana.

2.3.2.4.2. Telaahan terhadap Isu Strategis KLHS RPJMD Kota Blitar

Perumusan terhadap isu strategis pembangunan berkelanjutan Kota Blitar merupakan salah satu tahapan penting dalam kajian KLHS. Perumusan isu strategis pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan cara menggali dan mengkaji data – data sekunder yang ada seperti dokumen KLHS RTRW, Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Blitar 2025 – 2029 dan berdasarkan identifikasi capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB), serta dokumen kajian lainnya. Selain itu dengan menggali informasi data primer yang dilakukan melalui kegiatan wawancara, diskusi, lokakarya, dan FGD dengan (*stakeholders*) pihak- pihak yang memiliki kompetensi terhadap kondisi Kota Blitar, baik atas nama individu maupun lembaga.

Penyusunan isu strategis menggunakan pertimbangan hasil rumusan skenario dan masukan saran yang disepakati dari kegiatan uji publik yang menghasilkan isu pembangunan berkelanjutan paling strategis jangka menengah Kota Blitar. Isu Pembangunan Berkelanjutan paling strategis tersebut meliputi :

1. Daya saing sumber daya manusia;
2. Pengentasan kemiskinan;
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan (*Good Governance*);
4. Penguatan ekonomi lokal berbasis wisata kebangsaan;
5. Peningkatan keamanan dan kenyamanan kota;
6. Minimalisasi degradasi lingkungan;
7. Peningkatan infrastruktur dasar permukiman;
8. Peningkatan mitigasi bencana perkotaan;
9. Indikator yang telah ada dalam RPJMD tetapi belum mencapai target adalah mendorong pencapaian indikator tersebut agar dapat mencapai target nasional;
10. Indikator yang memiliki data tetapi belum ada dalam target RPJMD dan belum mencapai target nasional;
11. Indikator yang belum memiliki data dan ada target yang ditetapkan secara nasional.

2.3.2.4.2.1. Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Sosial

Pilar sosial mencakup lima tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 1 mengakhiri segala bentuk kemiskinan; Tujuan 2 menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan; Tujuan 3 menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; Tujuan 4 menjamin pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan belajar sepanjang hayat; dan Tujuan 5

mencapai kesejahteraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Dikaitkan dengan kondisi lingkungan hidup, maka yang termasuk dalam pilar ini antara lain kondisi daya dukung pangan yang terkait dengan lahan kawasan pertanian serta tingkat kerentanan dan adaptasi perubahan iklim. Berikut adalah rumusan isu strategis TPB pilar sosial di Kota Blitar :

Tabel 2.62
Rumusan Isu Strategis TPB Pilar Sosial Kota Blitar

TPB PILAR SOSIAL	ISU STRATEGIS
Tujuan 1 mengakhiri segala bentuk kemiskinan	1. Proporsi peserta Program Jaminan Sosial 2. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan 3. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan 4. Persentase rumah tangga kumuh perkotaan
Tujuan 2 menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	1. Prevalensi stunting 2. Prevalensi malnutrisi 3. Prevalensi anemia pada ibu hamil 4. Prevalensi konsumsi pangan
Tujuan 3 menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	1. Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) 2. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai SPM
Tujuan 4 menjamin pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan belajar sepanjang hayat	Proporsi anak-anak dan remaja: 1. (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika. 2. Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan assesmen nasional
Tujuan 5 mencapai kesejahteraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	1. Jumlah kebijakan responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan 2. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di

TPB PILAR SOSIAL	ISU STRATEGIS
	parlemen tingkat daerah

Sumber: *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2025, data diolah*

2.3.2.4.2.2. Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Ekonomi

Pilar ekonomi mencakup 5 (lima) tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 8 (delapan) meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; Tujuan 9 (sembilan) membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi; Tujuan 10 (sepuluh) mengurangi kesenjangan intra dan antar negara; dan Tujuan 17 (tujuh belas) menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Tabel 2.63
Rumusan Isu Strategis TPB Pilar Ekonoi Kota Blitar

TPB PILAR EKONOMI	ISU STRATEGIS
Tujuan 8 (delapan) meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	1. Persentase tenaga kerja informal 2. Jumlah peningkatan usaha industri pariwisata dalam proporsi terhadap total usaha
Tujuan 17 (tujuh belas) menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	Proporsi penduduk terlayani <i>mobile broadband</i> (Proporsi RT RW Terlayani Internet)

Sumber: *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2025, data diolah*

2.3.2.4.2.3. Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Lingkungan

Pilar lingkungan mencakup 6 (enam) tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 6 (enam) menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; Tujuan 11 (sebelas) menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan; Tujuan 12 (dua belas) menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; Tujuan 13 (tiga belas) mengatasi langkah segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya dan Tujuan 15 (lima belas) pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan. Rumusan isu pembangunan berkelanjutan strategis berdasarkan pilar lingkungan dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.64
Rumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis
berdasarkan Pilar Lingkungan

TPB PILAR LINGKUNGAN	ISU STRATEGIS
Tujuan 6 (enam) Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	1. Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan 2. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak
Tujuan 11 (sebelas) menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan	Indeks Risiko Bencana (IRB)

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2025, data diolah

2.3.2.4.2.4. Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan

Pilar hukum dan tata kelola mencakup satu tujuan pada pembangunan berkelanjutan berdasarkan pilar hukum dan tata kelola digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.65
Rumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis
berdasarkan Pilar Hukum dan Tata Kelola

TPB PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA	ISU STRATEGIS
Tujuan 16 (enam belas) Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun lembaga yang efektif, bertanggungjawab, dan inklusif di semua tingkatan	1. Persentase penggunaan <i>e-procurement</i> terhadap belanja pengadaan 2. Proporsi anak umum dibawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2025, data diolah

2.3.2.4.3. Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Blitar 2025 – 2045

Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Kota Blitar Tahun 2025 – 2045 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas didasari moral dan kekuatan religius;
2. Antisipasi tenaga kerja, alih dari sumber daya manusia ke teknologi;
3. Transformasi pasar dari konvensional menuju digital;
4. Ekonomi yang harus tumbuh dari waktu ke waktu;
5. Dua kutub pertumbuhan ekonomi di Blitar Raya;

6. Ancaman kemiskinan dan Kawasan kumuh;
7. Tuntutan pelayanan PEMDA secara digital terintegrasi;
8. Pembangunan karakter nasional dari Bumi Bung Karno;
9. Ancaman menurunnya kualitas lingkungan hidup, perubahan iklim dan bencana alam;
10. Pentingnya pembangunan daerah yang berkelanjutan;
11. Pelayanan sanitasi, air minum yang aman;
12. Pelayanan persampahan dan pengurangan sampah dari hulu.

Visi RPJPD Kota Blitar Tahun 2025 – 2045 adalah :
“KOTA CERDAS, INKLUSIF, MAJU DAN
BERKELANJUTAN”

1. “Cerdas”, dimaksudkan Kota Blitar menjadi Kota Cerdas yakni cerdas sosial, cerdas ekonomi, cerdas pemerintah daerah, cerdas infrastruktur dan cerdas lingkungan dalam bentuk transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola yang didukung dengan ketahanan lingkungan.
2. “Inklusif”, yaitu pembangunan Kota Blitar dibangun atas dasar kesetaraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Kesetaraan dan keadilan atas semua sektor pembangunan pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar, pelayanan umum dan juga sektor ekonomi yang meliputi kesempatan berusaha dan kesempatan mendapatkan penghasilan.
3. “Maju”, yaitu selalu bergerak terdepan dalam setiap perkembangan, meraih kondisi yang selalu lebih baik dari waktu ke waktu dengan pandangan jauh ke depan.
4. “Berkelanjutan”, yaitu baik dari sisi manajemen pemerintahan maupun sisi pengelolaan ruang. Dari sisi manajemen pemerintahan berkelanjutan dimaksudkan adanya keberlanjutan manajemen pemerintahan daerah dalam 4 (empat) tahapan suksesi, mengingat RPJPD ini meliputi 4 (empat) tahapan periodisasi. Sedangkan dari sisi pengelolaan ruang adalah pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup. Pembangunan yang dilakukan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Selanjutnya untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kota Blitar, ditetapkan 4 (empat) sasaran dengan 5 (lima) indikator yang dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2.66
Sasaran Visi Kota Blitar

VISI	SASARAN	INDIKATOR
Kota cerdas, inklusif, maju dan berkelanjutan	Peningkatan pendapatan per kapita	PDRP per Kapita (Rp juta)
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)
	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat kemiskinan (%)
		Rasio Gini
	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indek Pembangunan Manusia
	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)

Sumber: *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar 2025, data diolah*

Agar tingkat keberhasilan Visi Pembangunan Kota Blitar dapat terukur maka visi dioperasionalkan dalam misi dan arah kebijakan 4 (empat) tahap pembangunan 5 (lima) tahunan atau pembangunan jangka menengah daerah. Misi pembangunan jangka panjang ditetapkan dalam 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Membangun SDM Kota Blitar yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing (Transformasi Sosial), dengan mewujudkan masyarakat yang sehat, berpendidikan, serta memiliki kompetensi sehingga mempunyai daya saing di dunia kerja didampingi kebijakan perlindungan sosial yang proporsional dan berkeadilan.
2. Mengembangkan Ekosistem Ekonomi dan Inovasi Kota Blitar Secara Berkelanjutan (Transformasi Ekonomi), dengan membangun ekosistem ekonomi yang bertransformasi dari konvensional menuju digital didukung oleh riset dan inovasi secara berkelanjutan.
3. Digitalisasi Pelayanan Publik Kota Blitar (Transformasi Tata Kelola), melalui penyelenggaraan pelayanan pemerintah pada semua bidang dengan berbasis digital yang mengintegrasikan semua bidang pelayanan dengan pola interoperabilitas sehingga mewujudkan pelayanan pemerintahan yang prima cepat, inklusif dan berkeadilan.
4. Mewujudkan Kota Blitar yang Nyaman, Damai, Berketahanan Sosial dan Budaya Didasari Kekuatan Religius serta Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme, dengan pengembangan dan peningkatan tertib sosial dalam semua sektor kehidupan masyarakat dan pengembangan demokratisasi yang dinamis didasari

nasionalisme, patriotisme serta kerukunan beragama masyarakat Kota Blitar mewujudkan Kota Blitar yang nyaman, damai disertai berketahanan sosial dan budaya.

5. Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan dan Berketahanan Ekologi, dengan menciptakan kekuatan beradaptasi secara terus menerus melalui pembangunan berkelanjutan mewujudkan Kota Blitar peduli terhadap lingkungan dan berketahanan menghadapi bencana ekologi.

Sedangkan kebijakan untuk periode I (2025 – 2029) diarahkan pada :

1. Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial;
2. Pengembangan Ekonomi inklusif serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja;
3. Tata kelola pemerintahan yang tepat fungsi dan penyederhanaan regulasi;
4. Memperkuat ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, kelembagaan demokrasi dan penataan kebijakan pendukung stabilitas ekonomi daerah;
5. Penyediaan infrastruktur berkualitas dan berwawasan lingkungan hidup.

2.3.2.5. Penelaahan terhadap RPJMD Daerah Lainnya

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan dokumen RPJMD daerah lainnya agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar, atau dalam satu wilayah kepulauan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Kabupaten Blitar adalah satu – satunya daerah perbatasan yang melingkupi wilayah Kota Blitar. Ada beberapa isu strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD antara lain :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia
Tuntutan terhadap terwujudnya SDM berkualitas khususnya generasi muda dalam menyongsong Indonesia Emas 2045;
2. Pertumbuhan Ekonomi
Optimalisasi pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal, berwawasan lingkungan hidup dan didukung oleh infrastruktur yang mantap;
3. Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik
Peningkatan kinerja birokrasi dan pelayanan publik;
4. Ketertarikan dan ketertiban
Terjaganya ketenteraman, ketertiban serta kebebasan beragama dalam kehidupan masyarakat.

Arah pembangunan secara umum direpresentasikan dalam rumusan visi dan misi. Adapun visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.67
Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar Periode 2025 – 2029

Visi	Misi
Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya	Membangun generasi muda berkualitas, berakhlak, sehat jasmani dan rohani, berpendidikan yang baik dan keluarga sejahtera yang siap menyongsong Indonesia Emas
	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal didukung infrastruktur yang mantap, berwawasan lingkungan, berpihak dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha, ramah gender serta tangguh bencana
	Meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik berbasis elektronik yang akuntabel dan bebas korupsi, bersifat melayani serta peka terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat
	Menjamin ketentraman, ketertiban serta kebebasan beragama dalam kehidupan bermasyarakat dan pelaksanaan pembangunan

Sumber: *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar 2025, data diolah*

Kerjasama Kabupaten – Kota Blitar menjadi salah satu isu strategis yang dapat dipertimbangkan dalam RPJMD Kabupaten Blitar dan RPJMD Kota Blitar sehingga perencanaan jangka menengah Kabupaten – Kota Blitar dapat secara sinergis dirumuskan dalam rangka penanganan permasalahan baik sosial, ekonomi maupun pengembangan infrastruktur wilayah terutama di wilayah – wilayah perbatasan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Blitar 2013 – 2031, beberapa hal yang terkait dengan Kota Blitar di antaranya sebagai berikut :

1. Strategi Pengembangan sistem jaringan transportasi guna menunjang pertumbuhan dan pemerataan pembangunan wilayah melalui mengembangkan jalan kolektor primer yang menghubungkan Kota Blitar ke Pantai Serang dan menyatu dengan JLS;
2. Pengembangan kawasan pariwisata sebagai penunjang pengembangan agroindustri di Kabupaten Blitar dilaksanakan dengan strategi salah satunya adalah mengembangkan obyek wisata unggulan di Kabupaten

- Blitar dengan bekerjasama dengan Kota Blitar diantaranya pada wisata makam Bung Karno dengan Candi Penataran dan beberapa obyek wisata potensial;
3. Pengembangan trayek angkutan penumpang yang menghubungkan Kota Blitar dengan lokasi-lokasi wisata yang terdapat di Blitar Selatan, yaitu :
 - a) Kota Blitar – Kademangan – Bakung – Goa Umbul Tuk – Pantai Pangi;
 - b) Kota Blitar – Kademangan – Wonotirto – Pantai Tambakrejo;
 - c) Kota Blitar – Sutojayan – Panggungrejo – Pantai Serang;
 - d) Kota Blitar – Sutojayan – Binangun – Wates – Pantai Jolosutro;
 4. Rencana sistem air minum kota diantaranya berupa pipanisasi dari Sumber air Rambut Monte dan Dandang ke Kota Blitar.
 5. Titik rawan bencana Gunung Kelud di Kecamatan Kanigoro dengan jalur dan ruang evakuasi di Balai Desa Papungan, Balai Desa Kuningan, Klampok Kota Blitar, Boro Tuliskriyo Sanankulon, Balai Kelurahan dan Kecamatan Kanigoro, Masjid Tegalrejo, Putuk, Masjid Kr. Sono, Monggalan, dan selatan Bendungan Serut;
 6. Pengembangan kawasan perumahan skala besar diarahkan di Desa Maliran Kecamatan Ponggok dan kawasan-kawasan yang berada di sekitar perbatasan Kota Blitar seperti di Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Nglepok, Kecamatan Garum, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Talun;
 7. Pengembangan TPA Regional, yang melayani Kota Blitar dan Kabupaten Blitar.

2.3.2.6. Penetapan Isu Strategis

Kriteria penetapan isu-isu strategis mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Kriteria yang digunakan ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.68
Kriteria Penetapan Isu Strategis

No	Kriteria	Keterangan
1.	Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan Nasional	Isu tersebut mempunyai keterkaitan dengan kebijakan nasional, kementerian dan lembaga serta provinsi
2.	Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah	Isu tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab sesuai kewenangan Pemerintah Kota Blitar
3.	Dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat	Isu tersebut memiliki pengaruh yang kuar dan cakupan yang luas, baik negatif maupun positif

No	Kriteria	Keterangan
4.	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	Isu tersebut berkaitan dengan fungsi dan peran untuk mendorong penguatan terhadap penerapan kebijakan dan program pembangunan
5.	Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani	Penanganan isu tersebut mudah dilakukan secara kebijakaan, regulasi, dan sumber daya manusia dalam jangka menengah (5 tahun)
6.	Memiliki kesesuaian dengan Tema RPJMD	Isu tersebut mendukung tema RPJMD

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan permasalahan pembangunan yang dihadapi, telaahan isu internasional, isu/kebijakan nasional, isu/kebijakan provinsi, isu/kebijakan Kota Blitar, dan telaahan RPJMD daerah sekitar, serta KLHS Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Blitar, maka ditetapkan isu-isu strategis Kota Blitar, sebagai berikut:

a. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas

Keberhasilan Kota Blitar mencapai Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi pada angka 81,44 menunjukkan bahwa Kota Blitar sudah pada jalur yang tepat dalam penyelenggaraan pendidikan, Kesehatan dan peningkatan kesejahteraan warganya. Akan tetapi Upaya pembangunan manusia harus terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar khususnya untuk meningkatkan daya saing.

Daya saing manusia ditentukan oleh tingkat pendidikan, kompetensi dan kondisi kesehatan. Tingkat Pendidikan Masyarakat minimal harus lulus Tingkat menengah dengan berbekal kompetensi bidang yang diminati. Salah satu faktor pendukung keberhasilan pendidikan di Kota Blitar adalah adanya program sekolah gratis untuk tingkat SD dan SMP, dan bantuan biaya sekolah untuk pelajar SMA dan mahasiswa perguruan tinggi yang berasal dari keluarga miskin.

Sementara itu, Kesehatan juga menjadi faktor penting penentu daya saing manusia. Kualitas kesehatan sudah harus mendapat perhatian sejak dalam kandungan ibu, sebab kesehatan kandungan akan berpengaruh pada kelahiran dan kondisi lahir menentukan jejak awal kondisi kesehatan manusia. Oleh karena itu, kebijakan meningkatkan kesehatan ibu hamil dan janin sehat, meningkatkan kualitas kesehatan balita, anak anak dan remaja menjadi *urgent*.

Kualitas pembangunan manusia juga diukur dari Usia Harapan hidup (UHH). Usia Harapan Hidup (UHH) ditentukan oleh kualitas kesehatan, semakin berkualitas kesehatan masyarakat maka Usia Harapan Hidup (UHH) juga akan semakin panjang.

b. Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran

Salah satu indikator yang paling sering dilihat dari keberhasilan pembangunan adalah penurunan tingkat kemiskinan. Kemiskinan tidak dapat dihindari oleh level pemerintahan apapun dan negara manapun, akan tetapi dapat diminimalisasi atau dikurangi dengan kebijakan yang tepat. Teori kebijakan yang dianut oleh pemerintah dalam mengurangi kemiskinan adalah meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi pengeluaran masyarakat didukung dengan memprioritaskan kebijakan penguatan pendapatan dan subsidi untuk warga miskin diprioritaskan pada daerah-daerah yang paling banyak berstatus miskin atau disebut dengan kantong-kantong kemiskinan.

3 (tiga) kebijakan itu harus didasarkan pada data yang valid dan akurat berbasis keluarga dan jiwa dengan tercatat nama disertai dengan alamat serta data-data yang dapat menggambarkan kondisi keluarga atau individu yang dikaitkan dengan faktor-faktor penyebab kemiskinan (*By Name By Address By Case*). Dengan demikian akan dapat terpantau secara jelas perkembangan level kesejahteraan baik status keluarga maupun individunya.

Mengurangi pengangguran tidak semudah teori dengan menyediakan lapangan pekerjaan. Sering kali tersedia lapangan pekerjaan karena dianggap kelas rendah, maka penduduk lokal enggan meraihnya karena faktor gengsi. Penduduk lokal inginnya bekerja pada pekerjaan yang dipandang terhormat, akan tetapi penduduk lokal tidak mempunyai tingkat pendidikan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh formasi pekerjaan yang dianggap terhormat. Oleh karena itu, mengurangi pengangguran harus dimulai dengan peningkatan budaya masyarakat yang bangga bekerja dalam bidang apa saja daripada terlihat menganggur. Selanjutnya adalah meningkatkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan bidang pekerjaannya.

Pada sisi dunia usaha, pemerintah daerah perlu melakukan pendekatan terkait formasi jenis kompetensi yang dibutuhkan. Kemudian pemerintah daerah bisa melakukan pelatihan peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja baik pada pencari kerja maupun pekerja. Selain itu pemerintah daerah bisa memberikan fasilitasi investasi untuk membuka peluang kerja yang formasi tenaga kerja dimiliki oleh kebanyakan warga masyarakatnya.

Untuk dapat melakukan pengurangan pengangguran data *By Name By Address By Case* (BNBABC) juga menjadi faktor penting.

c. Penguatan Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Potensi Lokal

Isu strategis berkaitan dengan daya saing ekonomi masyarakat berbasis pada potensi lokal mempunyai 3 aspek yaitu :

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menuju kemandirian fiskal daerah

Pembangunan daerah sangat bergantung pada kemampuan keuangan daerah. Sebagaimana telah diketahui bahwa ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat sangat dominan yaitu sebesar 80% (persen), maka apabila disimulasikan tidak ada dana transfer maka pemerintah Kota Blitar akan *kollaps*. Sebab Pendapatan asli daerahnya tidak mampu untuk membiayai operasional pemerintahan daerah yang paling minim yaitu terpenuhinya gaji pegawai. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan asli daerah harus didorong minimal mampu pada angka 300 M – 350 M sebagaimana mandatori untuk pembayaran gaji pegawai baik ASN maupun pejabat politiknya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah berasal dari pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah bermula dari pelayanan pemerintah daerah. Maka selain peningkatan perolehan dengan perluasan wilayah layanan dan eliminasi kebocoran yang kesemuanya dikenal dengan intensifikasi, pemerintah daerah harus mampu melakukan ekstensifikasi. Ekstensifikasi adalah Upaya Upaya membuka sumber sumber pendapatan baru untuk peningkatan PAD.

Kunci dari perluasan masyarakat membayar retribusi dan pajak adalah pemerintah daerah harus menggerakkan semua sendi kehidupan usaha masyarakat mulai dari yang mikro sampai dengan besar. Menggerakkan sumber daya ekonomi untuk dikonsumsi daerah lain, sehingga banyak uang yang berasal dari luar daerah beredar di Kota Blitar.

2. Usaha dan produksi yang harus naik kelas dengan pasar regional dan nasional yang disertai peningkatan produktivitas ekonomi kreatif

Usaha masyarakat harus naik kelas, dari mikro menjadi kecil, menengah dan besar. Usaha masyarakat harus memperluas area pemasaran dari lokal, regional, nasional dan internasional. Sudah banyak produksi Kota Blitar yang bergerak menapaki pemasaran internasional, seperti produk kendang Jembe, Produk Batik Mawar Putih juga hasil budidaya tanaman hias. Sementara itu banyak juga produk yang sudah terpasarkan di level nasional seperti kerajinan kayu dalam bentuk mainan dan alat musik, sambel pecel dan sebagainya.

Usaha dan produksi dapat naik kelas jika mampu mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk,

kontinuitas produksi dan kapabilitas memenuhi peningkatan permintaan. Untuk dapat memenuhi kondisi tersebut maka usaha dan produksi Masyarakat harus diperkuat dengan kelembagaan, manajerial dan permodalan usaha yang baik. Selanjutnya perluasan pasar dilakukan dengan pemasaran digital.

Potensi ekonomi kreatif di Kota Blitar sangat menjanjikan terutama pada sektor seni pertunjukan, kriya, kuliner, fesyen. Sedangkan sektor sektor yang dimungkinkan berkembang baik adalah desain interior, film, video, fotografi, desain komunikasi visual, dan periklanan. Akan tetapi saat ini area pemasarannya masih terbatas di Kota Blitar, ke depan harus dapat diperluas area pemasarannya meliputi kota dan Kabupaten Blitar bahkan provinsi dan nasional. Sebab keterbatasan area pemasaran akan mengakibatkan persaingan dalam daerah sendiri sehingga peluang pendapatannya juga akan sangat terbatas.

Penguatan produktifitas ekonomi kreatif harus didukung kebijakan daerah yang kuat terutama pada sisi promosi dan pemasaran. Penciptaan ruang ruang bebas akses internet dan tempat tempat kerja yang bersifat terbatas dan temporary seperti *co working space* akan sangat berarti untuk *start up* di bidang ekonomi kreatif. Ruang ruang bebas untuk pertemuan anak anak muda ataupun para pengusaha mikro untuk berbagi ide dan kreatifitas antar sesama mereka, akan banyak membantu meningkatkan kreatifitas peningkatan produksi dan jaringan pemasaran yang lebih luas

3. Penguatan Pariwisata berbasis Wisata Kebangsaan

Blitar identik dengan Bung Karno, sebab Ir. Sukarno Sang Proklamator kemerdekaan Indonesia dan Presiden pertama Indonesia dimakamkan di Kota Blitar. Idiom “Jangan sekali kali mengaku menjadi orang Indonesia seutuhnya apabila belum berterima kasih pada Sang Proklamator dengan cara mendoakan langsung di pusaranya”, harus selalu digaungkan untuk menjadi daya tarik Kota Blitar.

Keputusan Walikota Blitar yang menetapkan 14 Pebruari sebagai Hari Cinta Tanah air juga perlu untuk dikumandangkan seantero Indonesia agar memperkuat nilai Kota Blitar sebagai Kota Wisata Kebangsaan.

Wisata kebangsaan akan lebih menguat apabila Pembangunan Museum Peta dapat terlaksana. Pembangunan Museum Peta bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Blitar tanpa menunggu bantuan pemerintah pusat. Akan tetapi upaya pembangunan oleh pemerintah pusat harus tetap diupayakan agar nantinya dapat menjadi museum nasional. Sehingga daya tariknya menjadi lebih luas dan kunjungan wisatanya diharapkan dapat meningkat secara

signifikan mengimbangi wisata kebangsaan dan religi ke Makam Bung Karno.

Potensi yang belum tergarap adalah wisata kebangsaan yang berbasis kesejarahan dalam bentuk cagar budaya. Banyak cagar budaya di Kota Blitar yang harus ditonjolkan untuk menjadi spot- spot destinasi wisata kebangsaan dengan penguatan pada *Story Telling*. Misalnya Kawasan jalan Soedanco Supriyadi dengan aksesoris Kebon Rojo. Kawasan Kampung Mataraman sebagai pintu masuk Kota Blitar menggunakan kereta api. Temuan baru Candi Gedog dan Candi Karang Tengah juga berpotensi mendatangkan kunjungan arkeologi yang cukup banyak. Mengingat Candi Gedog dan Candi Karang Tengah diduga adalah area tempat tinggal dan pusat Blitar di Jaman Kerajaan Kadiri dan Singosari sampai Majapahit. Untuk itu masih diperlukan kebijakan yang berkelanjutan setiap tahapannya.

d. Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan

Isu strategis berkaitan dengan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan mempunyai 5 (lima) aspek yaitu:

1. Pelayanan Sanitasi dan Air Minum yang Aman

Kebijakan nasional yang menetapkan pelayanan sanitasi aman dan air minum aman menuntut perubahan target dalam pembangunan daerah dari layak menjadi aman. Sanitasi aman dan air minum aman memang sudah seharusnya menjadi standart pelayanan minimal, sebab faktor ketersediaan sanitasi dan air minum yang aman sangat berpengaruh pada kesehatan dasar masyarakat.

Kondisi sanitasi aman secara sederhana adalah untuk tempat penampungan tinja atau septik tanknya terdaftar dalam Layanan Lumpur Tinja Terdaftar (LLTT) dan secara berkala dilakukan penyedotan atas lumpur tinjanya. Sedangkan air bersih aman standar paling sederhana adalah air minum yang didapat dari jaringan perpipaan, artinya air minum yang diperoleh dari PDAM atau saluran perpipaan air minum yang dikelola oleh kelompok masyarakat. Untuk itu harus ada kebijakan untuk memperkuat Upaya pelayanan sanitasi aman dan air minum yang aman.

Kondisi yang agak sulit dan harus segera ditangani adalah pembuangan air limbah rumah tangga baik dari dapur maupun kamar mandi yang dibuang ke drainase penampung air hujan. Untuk ini perlu ada kebijakan *extra ordinary* yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mengolah limbah ini dengan baik dengan basis lingkungan semacam septik komunal untuk air limbah rumah tangga (*Grey Water*).

2. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Bangunan Gedung

Kondisi saat ini indeks infrastruktur dalam status tinggi, kondisi ini seyogyanya dapat dipertahankan atau bahkan nilainya dapat mencapai lebih tinggi. Untuk dapat menjadi Kota yang menarik dikunjungi dan dapat menarik investasi, *performance* Kota Blitar harus selalu Nampak bersih, rapi dan indah untuk dinikmati. Tidak terlihat kabel-kabel yang tidak terorganisir dengan baik. Tidak terdapat pedestrian yang lubang-lubang, tidak rata dan tidak ada fasilitas penunjuk untuk tunanetra. Pedestrian yang nyaman untuk jalan kaki dan menjadi spot foto yang menarik akan tetapi tetap bersahabat dengan lingkungan hidup. Terdapat taman-taman kota dengan berbagai tema yang menarik dikunjungi. Tempat-tempat olahraga yang juga bisa menjadi destinasi atau sebaliknya destinasi wisata yang melibatkan *sport* didalamnya.

Yang perlu menjadi catatan dalam kurun waktu tahap RPJMD ini, banyak bangunan gedung pemerintah baik fasilitas perkantoran, pendidikan, kesehatan, kecamatan dan kelurahan sudah memerlukan pemeliharaan. Kebijakan penambahan gedung atau relokasi gedung kantor kelurahan juga akan menimbulkan biaya pemeliharaan, sehingga manajemen pemeliharaan gedung negara harus betul betul direncanakan dengan manajemen waktu dan kualitas pekerjaan pemeliharaan yang baik, sehingga tidak terjadi inefisiensi anggaran daerah.

Infrastruktur pelayanan umum seperti jalan dan pedestrian, fasilitas olahraga, taman, penerangan jalan umum, CCTV dan sebagainya harus selalu dilakukan pemeliharaan setiap waktu. Penyediaan anggaran untuk pemeliharaan harus selalu disediakan dengan kerangka panganggaran tersedia saat dibutuhkan.

3. Pelayanan Persampahan dan Pengurangan Sampah dari Hulu

Pelayanan sampah oleh Pemerintah Kota Blitar dengan model saat ini hanya akan bertahan maksimal 4 (empat) tahun yang akan datang jika tidak ada penambahan *Cell* penampungan sampah. Kondisi itu dapat diatasi jika dilakukan pengolahan sampah dengan pemilahan mulai dari hulu yaitu rumah tangga atau usaha penghasil sampah. Kebijakan penambahan *Cell* di TPA sifatnya hanya seperti bom waktu, yaitu mengulur waktu untuk menjadi masalah besar lagi. Kebijakan penambahan *Cell* di TPA sulit dilakukan karena lahan yang tersedia di TPA tidak ada, artinya jika kebijakan penambahan *Cell* yang dipilih maka harus membuka TPA baru.

Kebijakan pengaturan pengolahan sampah sejak di hulu perlu dilakukan segera untuk mengurangi timbunan sampah yang terbuang ke TPA. Kebijakan itu

mengatur sampah yang di produksi Rumah Tangga dan tempat usaha yang dibuang secara terpisah antara sampah organik dan sampah anorganik. Untuk efektifitas pelaksanaan Pemerintah Kota Blitar dapat mengoptimalkan tugas pengirit sampah dan kelompok kelompok bank sampah. Pada Konteks waktu terbatas sampai dengan tahun tahun 2028 dapat mengoptimalkan Kerjasama yang terbentuk dengan USAID dalam program SELARAS.

4. Minimalisasi Degradasi Lingkungan

Dampak perubahan iklim global sudah sangat terasa di Kota Blitar dengan indikasi dari menurunnya sumber air permukaan yang ditengarai dari sumur warga yang tidak lagi dapat diambil dengan pompa air. Agar tidak terjadi perluasan dampak, maka perlu diterapkan kebijakan peduli lingkungan yang benar benar serius dengan melibatkan semua lapisan masyarakat. Pembuatan lubang lubang biopori pada setiap tanah pekarangan dan tanah terbuka meskipun kapasitas tidak optimal tapi bisa membantu menambah cadangan air tanah. Pembuatan sumur sumur resapan untuk menampung air hujan agar tidak langsung terbuang ke sungai akan sangat berpengaruh pada penambahan cadangan air tanah. Pembuatan sumur resapan ini bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dengan membuat sumur resapan dengan konstruksi yang baik terutama pada daerah daerah yang rawan genangan saat hujan. Ada 2 (dua) keuntungan yang diperoleh yaitu (1) mengurangi bahkan mengatasi tingkat dan lama genangan, (2) menjadi cadangan air bawah tanah.

Perluasan ruang terbuka hijau juga menjadi sangat penting dengan penanaman pohon di sepanjang jalan besar tentunya dengan pola regenerasi pohon-pohon yang mengganggu lalu lintas dengan pola terencana. Penanaman pohon pohon di lahan lahan tidak terpakai atau pekarangan pekarangan dengan pohon produktif akan banyak membantu memenuhi kebutuhan konsumsi buah-buahan.

Hal penting yang bisa dilakukan Pemerintah Kota Blitar adalah *rebuilding* melakukan pemeliharaan Gedung kantornya dengan merombak menjadi *green building* yaitu gedung kantor yang hemat energi dan dapat optimal menyumbang oksigen dengan pemberian tanaman tanaman baik secara vertikal maupun horizontal

5. Antisipasi Kebencanaan

Posisi Kota Blitar yang berada pada lereng Gunung Kelud dengan Kali Lahar yang membelah Kota Blitar menimbulkan potensi bencana dengan skala yang tidak dapat diprediksi, tergantung skala letusan, jenis dan volume material yang dikeluarkan. Dalam kajian Sejarah sudah beberapa kali letusan Gunung Kelud yang membawa aliran lava sampai ke Kota

Blitar. Akan tetapi pada letusan terakhir, Kuasa Ilahi membebaskan Kota Blitar dari Material letusan. Dengan dampak yang tidak dapat diprediksi inilah diperlukan dana cadangan yang diperlukan sewaktu waktu jika Kota Blitar terdampak.

Dana cadangan juga berfungsi untuk menangani peristiwa bencana lain seperti longsor, angin puting beliung, banjir dan sebagainya. Dengan adanya anggaran yang disiapkan untuk dipergunakan sewaktu waktu, dapat menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat atas hadirnya pemerintah daerah saat dibutuhkan

e. Satu Data

Nasional sudah menetapkan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI), Kota Blitar mempunyai kewajiban untuk mendukung kebijakan tersebut. Kebijakan satu data menjadi hal yang *urgent* dilakukan untuk reformasi *mindset* pembangunan yang seperti biasanya “*Business as Usual*” menjadi pembangunan yang berbasis data. Semua proses pembangunan yang berbasis data mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi hasil berbasis data.

Satu data Kota Blitar juga harus dalam konteks dapat dibagipakaikan antar perangkat daerah untuk mempermudah perangkat dalam proses pembangunan dan melaksanakan pelayanan.

Satu data Kota Blitar juga harus mampu mempermudah dan menyederhanakan pelayanan pada masyarakat. Pelayanan perangkat daerah dapat dilakukan pada masyarakat cukup dengan identitas diri pemohon.

f. Pelayanan Pemerintah menuju *Smart Governance*

Pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat, provinsi maupun Kota Blitar selama ini terpisah pisah dan membuat masyarakat kesulitan saat membutuhkan. Kesulitan mencari tahu tempat pelayanan dan kesulitan dengan berbagai berkas yang harus dibawa sebagai persyaratan. Untuk mempermudah pelayanan pemerintah di berbagai tingkatan itu, Pemerintah Kota Blitar perlu mengajak semua penyedia layanan pemerintah untuk sepakat memberi pelayanan yang masih berbasis pelayanan langsung pada satu tempat atau satu atap.

Pelayanan akan mudah dilakukan dan pemerlu layanan juga akan dipermudah jika persyaratan berkasnya disederhanakan atau bahkan dapat dilakukan dengan ketersediaan data yang dapat dibagipakaikan.

g. Penciptaan Wilayah Aman dan Kondusif serta Perlindungan Masyarakat

Salah satu syarat utama sebuah kota untuk menjadi magnet bagi investor adalah wilayah yang aman dan kondusif. Investasi membutuhkan situasi yang dapat menjamin kepastian mendapatkan keuntungan. Wilayah

yang aman dari gangguan baik lingkungan sekitar maupun faktor-faktor eksternal akan menjamin proses bisnis atas investasi berjalan seperti yang direncanakan. Wilayah yang kondusif baik dari kebijakan pemerintah daerah maupun dari situasi masyarakatnya pasti akan mendukung percepatan pencapaian target bisnis untuk memperoleh hasil atau keuntungan.

Kebijakan pemerintah daerah yang stabil tidak berubah ubah, yang peduli pada usaha masyarakat bersumber pada kebijakan para pejabat politik. Oleh karena itu, salah satu faktor kondusifitas daerah ditentukan oleh tingkat pendidikan politik rakyat dalam berdemokrasi. Sedangkan keamanan akan terbentuk oleh faktor-faktor yang saling terkait yaitu kepolisian, pemerintah daerah, pengusaha dan masyarakat. Masing-masing harus memberikan kontribusi positif untuk dapat membentuk kondisi dan situasi daerah yang aman.

Perlindungan pada anak atau perempuan dari kekerasan rumah tangga selama ini dikenal dengan tugas urusan perlindungan perempuan dan anak. Sehingga seolah-olah perlindungan anak dan perempuan ini menjadi tugas dari satu perangkat daerah saja, seharusnya juga menjadi tugas banyak pihak dengan pola integratif. Upaya perlindungan anak dan perempuan harus dimulai dari level terendah di struktur organisasi penunjang pemerintahan yaitu Rukun Tetangga dan Rukun Warga. RT dan RW didukung oleh kader – kader yang ada di masyarakat selevel kelurahan misalnya kader keluarga berencana, posyandu, jumantik dan sebagainya. Semua yang ada di level masyarakat harus mempunyai jalur komunikasi dengan kelurahan khususnya seksi ketenteraman dan ketertiban kelurahan dan kecamatan. Jalur koordinasi pencegahan, penanganan dan tindak lanjut kejadian harus sampai pada dinas teknis bahkan sampai kepala daerah. Kecepatan antisipasi dan tindakan di level masyarakat akan dapat mengurangi kejadian kejadian kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Pada konteks yang berbeda, kebakaran dikategorikan dalam musibah karena tidak masuk dalam kategori bencana, dampaknya sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Kebakaran rumah/tempat usaha atau permukiman dapat mengakibatkan sebuah keluarga berstatus menjadi miskin setelah kebakaran. Kecepatan penanganan kebakaran menjadi faktor penentu besarnya kerugian yang ditimbulkan. Kecepatan reaksi terhadap laporan kebakaran sangat tergantung pada manusia dan peralatan yang dimiliki oleh satuan pemadam kebakaran Kota serta kemudahan akses pada obyek kebakaran. Karena intensitas kejadian kebakaran yang relatif rendah mengakibatkan kebijakan penyiapan peralatan kebakaran menjadi sangat minim. Akses di permukiman yang rawan terjadi kebakaran tidak bisa dilalui oleh mobil pemadam kebakaran. Untuk antisipasi besarnya kerugian oleh

kebakaran maka perlu dibuat kebijakan yang komprehensif untuk mengantisipasi kejadian

h. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan menjadi perhatian utama dalam mengantisipasi ancaman baru tentang krisis pangan dunia. Pangan yang cukup, aman dan bergizi menjamin hak dasar manusia untuk hidup sehat dan produktif. Ketahanan pangan juga berperan dalam menjaga stabilitas sosial dan politik, mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendukung kemandirian. Sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan ikut menjaga lingkungan dan kelestarian pertanian dalam jangka panjang.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- 3.1.1. Visi dan Misi RPJMD Kota Blitar 2025 – 2029
- 3.1.1.1. Visi

Rumusan visi merupakan kondisi yang akan diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan visi Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai Misi yang diemban. Visi ini selanjutnya dijabarkan dalam Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.

Kota Blitar memberikan peran yang positif dalam menopang pembangunan di Jawa Timur dan nasional. Pemerintah Kota Blitar telah memberikan kontribusi positif pada pembangunan misalnya dapat dilihat dari tingkat kemiskinan sebesar 6,75% dengan tingkat kemiskinan ekstrem 0% dibawa rata-rata provinsi dan nasional serta Indeks Pembangunan Manusia pada angka 81,44 di atas rata-rata provinsi dan nasional. Selain itu, penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan di Kota Blitar telah berjalan dengan baik sehingga tidak menimbulkan gejolak yang mengakibatkan terganggunya pembangunan di daerah, regional maupun nasional. Pelaksanaan APBD yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 15 tahun berturut turut serta prestasi positif di berbagai sektor dan urusan lainnya memberikan gambaran bahwa Kota Blitar telah memberikan kontribusi positif dalam pembangunan Jawa Timur maupun nasional.

Untuk dapat mempertahankan kondisi yang sangat baik tersebut, maka dibutuhkan pandangan visioner yang dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Blitar menuju prestasi yang lebih baik dalam mendukung semua program provinsi dan nasional. Pandangan visioner itu ditentukan dari Visi Calon Walikota dalam Pilkada tahun 2024. Berdasarkan hasil pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 maka Visi yang dipilih adalah visi Walikota terpilih yang kemudian dipergunakan sebagai visi pembangunan Kota Blitar dalam RPJMD tahun 2025 – 2029 adalah:

**“KOTA BLITAR YANG MAJU, SEHAT DAN SEJAHTERA
MENUJU KOTA MASA DEPAN”**

Dengan penjelasan sebagai berikut :

KOTA BLITAR, didefinisikan sebagai :

Meliputi seluruh wilayah dan isinya, artinya Kota Blitar dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam

batas – batas tertentu yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar.

MAJU, didefinisikan sebagai :

Terwujudnya Kota Blitar yang selalu bergerak terdepan dalam setiap perkembangan, meraih kondisi yang selalu lebih baik dari waktu ke waktu dengan pandangan jauh ke depan. Dengan berbagai capaian pembangunan ekonomi, infrastruktur, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Blitar akan terus berusaha menjadi yang terbaik khususnya meningkatkan pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur meliputi infrastruktur fisik dan infrastruktur digital, serta memastikan pembangunan daerah dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan dan dampak terhadap kualitas lingkungan. Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan dukungan SDM aparatur dan sistem pelayanan yang terintegrasi akan berdampak positif pada peningkatan partisipasi publik, yang berorientasi memberikan kemudahan, pelayanan yang prima serta terpenuhinya kebutuhan pelayanan masyarakat di berbagai bidang.

SEHAT, didefinisikan sebagai:

Terwujudnya kota yang bukan hanya bebas penyakit, tetapi kota yang memberikan kesempatan kepada warganya untuk hidup sehat secara fisik, mental dan sosial melalui kebijakan pelayanan dan partisipasi aktif masyarakat

SEJAHTERA, Terwujudnya peningkatan lebih lanjut atas kondisi makmur yang tidak hanya berdimensi material atau jasmaniah, tetapi juga spiritual atau rohaniah, yang memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam mencapai cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif dalam tata kehidupan yang aman dan tentram, rukun dan damai, di samping terpenuhinya kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan, dan lapangan kerja, juga bebas mengumpulkan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, serta bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia yang makin berkualitas secara fisik, psikis maupun intelektualitas. Keterpaduan antara dimensi tersebut diharapkan melahirkan kesejahteraan yang paripurna, serta membentuk kebanggaan yang tinggi bagi masyarakat Kota Blitar untuk melahirkan masa depan yang aman tentram damai sentosa dan makmur.

MENUJU, didefinisikan sebagai :

Upaya untuk mencapai tujuan – tujuan dengan rencana dan strategi yang terukur.

KOTA MASA DEPAN, didefinisikan sebagai :

Terwujudnya Kota Blitar sebagai kota layak huni yang aman dan nyaman, kota cerdas berdaya saing dan berbasis teknologi, berbasis keunggulan ekonomi dan budaya lokal, yang dibangun atas dasar kesetaraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat serta berkelanjutan.

3.1.1.2. Misi

Misi merupakan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Visi “Kota Blitar yang Maju, Sehat dan Sejahtera menuju Kota Masa Depan” akan diwujudkan dengan 5 (lima) misi yaitu :

1. Mewujudkan Blitar Kota Pancasila yang Aman, Religius dan Nasionalis;
2. Mewujudkan Kota Blitar Sehat dan Sejahtera;
3. Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis *Smart Governance*;
4. Mengembangkan Potensi Pendidikan, Pemuda dan Perempuan sebagai Generasi Emas yang Cerdas dan Berkarakter;
5. Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata, dan Industri.

Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan perencanaan harus selaras dan konsisten, dimana RPJMD sebagai perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahun harus selaras dengan RPJPD sebagai perencanaan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun. Keselarasan hubungan antara misi RPJPD dengan misi RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Keselaran Misi pada RPJPD Kota Blitar 2025 – 2045
dengan Misi RPJMD Kota Blitar 2025 – 2029

Misi RPJPD 2025 – 2045	Misi RPJMD 2025 - 2029
Misi 4 : Mewujudkan Kota Blitar yang Nyaman, Damai, Berketahanan Sosial dan Budaya Didasari Kekuatan Religius serta Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme	Misi 1: Mewujudkan Blitar Kota Pancasila yang Aman, Religius dan Nasionalis
Misi 4 : Mewujudkan Kota Blitar yang Nyaman, Damai, Berketahanan Sosial dan Budaya Didasari Kekuatan Religius serta Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme	Misi 2 : Mewujudkan Kota Blitar Sehat dan Sejahtera
Misi 1 : Membangun SDM Kota Blitar yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing	
Misi 3 : Digitalisasi Pelayanan Publik Kota Blitar	Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis <i>Smart Governance</i>
Misi 5 : Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan dan Berketahanan Ekologi	
Misi 1 : Membangun SDM Kota Blitar yang Cerdas,	Misi 4 : Mengembangkan Potensi Pendidikan, Pemuda dan

Misi RPJPD 2025 – 2045	Misi RPJMD 2025 - 2029
Sehat dan Berdaya Saing	Perempuan sebagai Generasi Emas yang Cerdas dan Berkarakter
Misi 2 : Mengembangkan Ekosistem Ekonomi dan Inovasi Kota Blitar Secara Berkelanjutan	Misi 5 : Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata, dan Industri

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar 2025, data diolah

Keselarasan perencanaan juga harus dilakukan antar tingkat pemerintahan dimana RPJMD Kota Blitar harus mendukung Program Pemerintah Pusat maupun Provinsi Jawa Timur. Untuk itu Misi RPJMD Kota Blitar juga harus selaras dengan Nawa Bhakti Satya Provinsi Jawa Timur dan Asta Cita dalam RPJMN. Dimana keselarasan RPJMD Kota Blitar dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur dilakukan dengan proses penyusunan secara simultan dan terkoordinasi. Keselarasan RPJMD Kota Blitar dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMN dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Keselarasan Misi RPJMD Kota Blitar 2025 – 2029 dengan Nawa Bhakti Satya Provinsi Jawa Timur dan Asta Cita

MISI RPJMD KOTA BLITAR 2025-2029	NAWA BHAKTI SATYA JAWA TIMUR	ASTACITA
Mewujudkan Blitar Kota Pancasila yang Aman, Religius dan Nasionalis	Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif melalui Pengembangan Nilai-nilai Kesalehan Sosial, Berjiwa Pancasila, Pengarusutamaan Gender, serta Memajukan Seni, Budaya dan Prestasi Olahraga Jatim Lestari - Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	Asta Cita 1 - Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan HAM Asta Cita 8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

MISI RPJMD KOTA BLITAR 2025-2029	NAWA BHAKTI SATYA JAWA TIMUR	ASTACITA
Mewujudkan Kota Blitar Sehat dan Sejahtera	Jatim Sejahtera - Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan melalui Perlindungan Sosial yang Adaptif, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Pedesaan dengan Pendekatan Lintas sectoral - Spasial Berbasis Data Terpadu Jatim Agro - Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Pernak dan Nelayan Jatim Sehat - Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan untuk semua (<i>health for all</i>) yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan, serta sinergis dengan perwujudan <i>Universal Health Coverage</i> (UHC)	Asta Cita 2 - Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; Asta Cita 6 - Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Asta Cita 4 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

MISI RPJMD KOTA BLITAR 2025-2029	NAWA BHAKTI SATYA JAWA TIMUR	ASTACITA
Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis <i>Smart Governance</i>	Jatim Berkah Amanah - Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif Jatim Akses - Memperkuat konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan Jatim Lestari - Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan, dan Ketahanan Iklim dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	Asta Cita 3 - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi Asta Cita 7 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan Asta Cita 8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
Mengembangkan Potensi Pendidikan, Pemuda dan Perempuan sebagai Generasi Emas yang Cerdas dan Berkarakter	Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif melalui Pengembangan Nilai-nilai Kesalehan Sosial, Berjiwa Pancasila, Pengarusutamaan Gender, serta Memajukan Seni, Budaya dan Prestasi Olahraga; Jatim Cerdas – Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses Pendidikan untuk semua (<i>Education for all</i>) yang berkualitas, merata, dan berkeadilan;	Asta Cita 4 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas Asta Cita 8 - Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur;

MISI RPJMD KOTA BLITAR 2025-2029	NAWA BHAKTI SATYA JAWA TIMUR	ASTACITA
Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata, dan Industri	Jatim Kerja – Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas melalui Peningkatan Kewirausahaan, Iklim Investasi dan Stabilitas Ekonomi	Asta Cita 2 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Asta Cita 3 - Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; Asta Cita 5 - Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar 2025, data diolah

3.1.2. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan misi, dijelaskan dengan tujuan berupa pernyataan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi selama lima tahun yang didasarkan pada isu-isu analisis strategis dengan indikator kinerja tujuan, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai selama lima tahun dan secara bertahap dapat diurai pencapaiannya setiap tahun.

Berdasarkan lima misi yang telah ditetapkan, maka masing-masing misi diuraikan dengan pernyataan tujuan dan indikator tujuannya. Dalam memformulasikan tujuan pembangunan lima tahun kedepan, selain memperhatikan hal tersebut juga memperhatikan pencapaian sasaran visi pembangunan dalam RPJPD Tahun 2025-2045.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan spesifik, mudah dicapai, rasional memperhatikan isu strategis daerah, disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan dicapai selama lima tahun dan secara bertahap dapat diurai pencapaiannya setiap

tahun. Sasaran pembangunan diturunkan dari tujuan yang merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan pembangunan RPJMD. Dalam melakukan formulasi sasaran pembangunan tersebut, Pemerintah Kota Blitar dalam menyusun sasaran pembangunan juga memperhatikan arah pembangunan yang termaktub pada RPJPD Kota Blitar Tahun 2025 – 2045 sehingga apa yang telah menjadi arah pembangunan 20 tahun kedepan tetap terjaga. Memperhatikan hal tersebut, maka dalam penentuan indikator sasaran pembangunan, Pemerintah Kota Blitar juga memperhatikan Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang termuat pada RPJPD Kota Blitar Tahun 2025 – 2045 sebagai salah satu upaya untuk mencapai mengawal pencapaian target IUP di tiap tahapan pembangunan.

3.1.2.1. Tujuan dan Sasaran Misi Mewujudkan Blitar Kota Pancasila yang Aman, Religius dan Nasionalis

Untuk membangun Kota Blitar yang aman bagi warganya dan pengunjugnya, kuat, mandiri, dan harmonis, serta memastikan keberlanjutan pembangunan, kerukunan umat beragama dan nasionalisme merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Untuk itu tujuan dan indikator misi Mewujudkan Blitar Kota Pancasila yang Aman, Religius dan Nasionalis adalah :

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Misi Mewujudkan Blitar Kota Pancasila yang Aman, Religius dan Nasionalis

Tujuan / Sasaran	Indikator
Terwujudnya kehidupan yang harmonis di masyarakat melalui penguatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks Harmoni Indonesia
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik dan pembangunan daerah	Indeks Demokrasi Indonesia
Terwujudnya jaminan rasa aman pada masyarakat	Indeks Rasa Aman
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban
Terwujudnya kota yang berketahanan bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar 2025, data diolah

Tujuan pembangunan yang pertama yaitu Terwujudnya kehidupan yang harmonis di masyarakat melalui penguatan nilai – nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, merupakan upaya mendukung pencapaian misi RPJMD Kota Blitar Tahun 2025-2029 dikarenakan seluruh kegiatan pembangunan membutuhkan dukungan stabilitas daerah yang diperlihatkan melalui keharmonisan masyarakat di

semua sektor serta dukungan seluruh lapisan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Selanjutnya, jaminan rasa aman sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, stabil dan produktif. Dengan situasi dan kondisi daerah yang aman, setiap individu dapat menjalankan aktivitasnya dengan nyaman, berkontribusi dalam pembangunan dan menikmati hak dan kebebasan mereka secara optimal. Selain itu jaminan situasi aman dan nyaman bagi setiap orang yang datang dan berusaha di Kota Blitar akan dapat mendukung terwujudnya Kota Blitar yang inklusif dan dapat menjadi daya tarik bagi para investor untuk berinvestasi di Kota Blitar.

3.1.2.2. Tujuan dan Sasaran Misi Mewujudkan Kota Blitar Sehat dan Sejahtera

Kesehatan adalah faktor utama untuk dapat melakukan aktifitas dan produktifitas. Upaya pembangunan kesehatan masyarakat serta jaminan kesehatan bagi semua warganya menjadi tujuan yang sangat penting bagi pembangunan setiap daerah. Pemerintah Kota Blitar mengutamakan sektor kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemerataan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi semua masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar, Pemerintah Kota Blitar berkomitmen untuk memberantas kemiskinan yang mencakup berbagai dimensi, tidak hanya terkait keterbatasan ekonomi tetapi juga kesenjangan sosial, marginalisasi kelompok rentan, maupun keterbatasan akses terhadap layanan infrastruktur dasar. Pada periode 2025-2029, ditetapkan dua target utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertama, menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Blitar sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa lebih banyak penduduk dapat memenuhi kebutuhan hidup layak sekaligus memperoleh perlindungan sosial yang adaptif untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakat dalam menghadapi berbagai risiko dan krisis. Kedua, meningkatkan kualitas ketahanan keluarga. Dengan ketahanan keluarga yang kuat dapat menjadi pondasi utama dalam membangun masyarakat yang sejahtera.

Dalam rangka mewujudkan misi Mewujudkan Kota Blitar Sehat dan Sejahtera, dirumuskan tujuan dan sasaran beserta indikator pencapaiannya pada tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tujuan dan Sasaran Misi Mewujudkan Kota Blitar Sehat dan Sejahtera

Tujuan / Sasaran	Indikator
Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sehat	Usia Harapan Hidup
Terwujudnya Kesehatan yang Merata	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan
Meningkatnya Kualitas Hidup dan Ketangguhan Sosial Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial (IKeSos)
	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar 2025, data diolah

Tujuan pembangunan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang sehat merupakan salah satu upaya mendukung pencapaian dari sasaran visi ketiga RPJPD Kota Blitar 2025 – 2045 yaitu Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia.

Sedangkan tujuan pembangunan meningkatnya kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu upaya mendukung pencapaian sasaran visi kedua RPJPD Kota Blitar 2025 – 2045 yaitu Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan.

3.1.2.3. Tujuan dan Sasaran Misi Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis *Smart Governance*

Pembangunan berkelanjutan adalah konsep yang menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Kota berkelanjutan adalah kota yang dirancang untuk mengatasi dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi melalui perencanaan kota dan pengelolaan kota. Dalam konteks ini, inisiatif berkelanjutan dicapai dengan membangun alternatif ramah lingkungan ke dalam infrastruktur kota serta memastikan bahwa sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara bijaksana tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Pada periode 2025 - 2029, ditetapkan target utama yaitu Mewujudkan pembangunan kota yang layak huni serta Penurunan Emisi GRK.

Misi mewujudkan tata kelola pemerintahan merupakan elemen kunci dalam mencapai tujuan dan sasaran lima tahun Walikota dan Wakil Walikota. *Smart governance* adalah konsep tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk

meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan. Melalui misi ini, Pemerintah Kota Blitar bertekad untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, partisipatif, inovatif, akuntabel dan berbasis teknologi demi meningkatkan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya mencapai keberhasilan misi Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis *Smart Governance*, dirumuskan tujuan dan sasaran beserta indikator pencapaiannya pada tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Tujuan dan Sasaran Misi Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang berbasis *Smart Governance*

Tujuan / Sasaran	Indikator
Terwujudnya Pembangunan Kota Nyaman dan Layak Huni	Indeks Kota Layak Huni
	Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) Kumulatif
Terwujudnya fasilitas perkotaan yang berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
Meningkatnya kualitas permukiman	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan
Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah
Meningkatnya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi
Terwujudnya pelayanan pemerintahan yang berkualitas dan terintegrasi	Indeks Pemerintahan Digital Indonesia
	Indeks Pelayanan Publik
	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Terwujudnya manajemen pemerintahan yang profesional	Opini BPK atas Laporan Keuangan
	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar 2025, data diolah

Tujuan pembangunan terwujudnya pembangunan kota nyaman dan layak huni beserta sasarannya, merupakan salah satu upaya mendukung pencapaian dari sasaran visi RPJPD Kota Blitar Tahun 2025 – 2045 keempat yaitu Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Tujuan pembangunan meningkatnya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel merupakan upaya mendukung pencapaian dari seluruh sasaran visi RPJPD Kota Blitar Tahun 2025 – 2045 dikarenakan seluruh kegiatan pembangunan membutuhkan dukungan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan berintegritas serta dukungan seluruh lapisan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Sedangkan penentuan sasaran pembangunan selain memperhatikan upaya pencapaian tujuan dari misi mempertimbangkan pula sasaran yang tertuang dalam RPJPD Kota Blitar tahun 2025 - 2045. Memperhatikan hal tersebut maka sasaran yang telah ditetapkan selaras dengan sasaran kesebelas yaitu Terwujudnya Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif serta sasaran kedua belas Terwujudnya Pelayanan Publik Terpadu Satu Data berbasis Teknologi Informasi pada RPJPD Kota Blitar Tahun 2025 – 2045.

3.1.2.4. Tujuan dan Sasaran Misi Mengembangkan Potensi Pendidikan, Pemuda dan Perempuan sebagai Generasi Emas yang Cerdas dan Berkarakter

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan modal dasar tercapainya Visi Kota Blitar 2045, Visi Jawa Timur Sejahtera 2045 dan Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu dalam RPJMD 2025 – 2029 pembangunan sumberdaya manusia dilaksanakan dengan memberikan setiap individu kesempatan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan melalui peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas pemuda, pengarusutamaan gender, serta memajukan seni budaya. Hal ini penting dilakukan sebagai bentuk memperkuat karakter dan jati diri bangsa.

Dalam upaya mencapai keberhasilan misi Mengembangkan Potensi Pendidikan, Pemuda dan Perempuan sebagai Generasi Emas yang Cerdas dan Berkarakter, dirumuskan tujuan dan sasaran beserta indikator pencapaiannya pada tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

Tabel 3.6
Tujuan dan Sasaran Misi Mengembangkan Potensi Pendidikan, Pemuda dan Perempuan sebagai Generasi Emas yang Cerdas dan Berkarakter

Tujuan / Sasaran	Indikator
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
	Harapan Lama Sekolah

Tujuan / Sasaran	Indikator
Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata – Rata Lama Sekolah
Meningkatnya kualitas generasi muda	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Terwujudnya kota yang berkebudayaan maju	Indeks Pelestarian Budaya

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar 2025, data diolah

Tujuan pembangunan ketujuh yaitu meningkatnya kualitas sumber daya manusia, merupakan salah satu upaya mendukung pencapaian dari sasaran visi ketiga RPJPD Kota Blitar 2025 – 2045 yaitu Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia sehingga indikator pencapaian menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang juga merupakan indikator sasaran visi RPJPD ketiga.

Sedangkan penentuan sasaran pembangunan pada Misi Mengembangkan Potensi Pendidikan, Pemuda dan Perempuan sebagai Generasi Emas yang Cerdas dan Berkarakter selain memperhatikan upaya tujuan dari misi, mempertimbangkan pula sasaran pokok pembangunan yang tertuang dalam RPJPD Kota Blitar 2025 – 2045, yaitu sasaran pokok pembangunan kedua yaitu terwujudnya pendidikan yang merata di Kota Blitar dan sasaran pokok pembangunan keempat terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif di Kota Blitar.

3.1.2.5. Tujuan dan Sasaran Misi Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata, dan Industri

Pembangunan Kota Blitar yang difokuskan pada kota perdagangan, jasa, pariwisata dan industri adalah agar pembangunan daerah lebih fokus pada sektor-sektoryang selama ini berkontribusi besar pada pembangunan daerah. Pengembangan Kota Blitar sebagai kota perdagangan adalah dalam upaya mewujudkan perluasan lapangan kerja yang berkualitas melalui peningkatan kewirausahaan baru (*start-up*) pengembangan ekonomi kreatif, iklim investasi, dan stabilitas ekonomi.

Pengembangan industri kreatif melalui pembangunan pariwisata dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif dioptimalkan untuk mendorong iklim perekonomian Kota Blitar dengan mengoptimalkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi secara agregat, sehingga akan dapat membuka lebih banyak kesempatan kerja. Atas dasar hal tersebut maka ditetapkan tujuan pada misi Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata, dan Industri yang Berkelanjutan yaitu terwujudnya stabilitas ekonomi daerah.

Dalam upaya mencapai keberhasilan misi Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata, dan Industri yang Berkelanjutan, dirumuskan tujuan dan sasaran beserta indikator pencapaiannya pada tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

Tabel 3.7
Tujuan dan Sasaran Misi Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata, dan Industri

Tujuan / Sasaran	Indikator
Terwujudnya Ekonomi Daerah Yang Inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi
	Rasio Gini
	Tingkat Inflasi
	PDRB Per Kapita
Meningkatnya kontribusi sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
	Rasio PDRB Industri Pengolahan
Terwujudnya kemudahan berusaha yang mendorong realisasi investasi daerah	Persentase Peningkatan Investasi
Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar 2025, data diolah

Peningkatan kontribusi sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi, merupakan salah satu upaya mendukung pencapaian Peningkatan pendapatan per kapita.

Sedangkan penentuan sasaran pembangunan pada Misi Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata, dan Industri selain memperhatikan upaya tujuan dari misi, mempertimbangkan pula sasaran pokok pembangunan yang tertuang dalam RPJPD Kota Blitar 2025 – 2045, yaitu sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan tenaga kerja yang berkompetensi
2. Terwujudnya perkembangan iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi Kota Blitar
3. Terwujudnya transformasi ekonomi digital dan ekonomi hijau
4. Terwujudnya perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
5. Terwujudnya stabilitas ekonomi daerah
6. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif

Berdasarkan pernyataan tujuan dan indikator tujuan yang telah ditetapkan, maka dilakukan *cascading down* yaitu menurunkan rencana pencapaian indikator tujuan kepada indikator sasaran yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator tujuan yang hendak dicapai target kinerjanya, sebagaimana ditampilkan dalam tabel 3.8 berikut :

Tabel 3.8
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Jangka Menengah Kota Bitar Tahun 2025 – 2029

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)		(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
KOTA BLITAR YANG MAJU, SEHAT DAN SEJAHTERA MENUJU KOTA MASA DEPAN - Mewujudkan Blitar Kota Pancasila yang Aman, Religius dan Nasionalis - Mewujudkan Kota Blitar Sehat dan Sejahtera - Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang berbasis <i>Smart Governance</i> - Mengembangkan Potensi Pendidikan, Pemuda dan Perempuan sebagai Generasi Emas yang Cerdas dan Berkarakter - Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa,	Terwujudnya kehidupan yang harmonis melalui penguatan nilai - nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat		Indeks Harmoni Indonesia (Indeks)	Data belum pernah dirilis	6,91	6,95	6,99	7,09	7,19	7,25	
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik dan pembangunan daerah	Indeks Demokrasi Indonesia (indeks)	84,37	88,68	88,69	88,70	88,71	88,72	88,73	
	Terwujudnya jaminan rasa aman pada masyarakat		Indeks Rasa Aman (Angka)	Data belum pernah dirilis	76,60	76,65	76,70	76,75	76,80	76,85	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (Angka)	98,52	98,80	99,10	99,40	99,70	100	100	
		Terwujudnya Kota yang Berketahanan Bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB) (Angka)	71,51	70,32	68,60	66,97	65,41	63,93	62,50	
	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang sehat		Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	75,20	75,30	75,56	75,82	76,07	76,33	76,59	
		Terwujudnya Kesehatan yang Merata	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (Indeks)	0,699	0,699	0,700	0,720	0,725	0,730	0,735	
			Prevalensi Stunting	11,40	9,69	9,69	9,24	8,74	8,19	7,60	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)		(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
Pariwisata dan Industri			(pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))								
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat		Tingkat Kemiskinan (%)	6,75	6,63	6,42	6,14	5,92	5,57	4,87	
		Meningkatnya Kualitas Hidup dan Ketangguhan Sosial Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)	62,23	62,58	62,93	63,28	63,63	63,98	64,33	
			Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	80,80	80,81	81,56	82,31	83,06	83,81	84,56	
	Terwujudnya pembangunan kota nyaman dan layak huni		Indeks Kota Layak Huni (Indeks)	Data belum pernah dirilis	62,80	65,60	68,40	71,20	74,00	76,80	
			Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) Kumulatif (TON CO2 EQ)	650.775,46	663.790,97	677.066,79	690.608,12	704.420,29	718.508,69	732.878,87	
		Terwujudnya fasilitas perkotaan yang berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) (Indeks)	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	85,00	
		Meningkatnya kualitas permukiman	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau	79,03	91,00	92,49	94,19	95,88	97,38	99,02	

[illegible]

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)		(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
			Kuangan (Nilai)								
		Terwujudnya manajemen pemerintahan yang profesional	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Indeks)	99,15	77,70	78,57	80,28	82,00	83,71	85,42	
			Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Angka)	80,060	80,11	80,14	80,17	80,20	80,23	80,26	
	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	81,44	82,71	82,86	83,20	83,54	83,88	84,32	
		Meningkatnya kualitas pendidikan	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,81	14,82	14,84	14,91	15	15,06	15,1	
			Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	10,820	10,825	10,830	10,835	10,840	10,845	10,850	
		Meningkatnya kualitas generasi muda	Indeks Pembangunan Pemuda (Nilai)	59,67	62,65	65,63	68,61	71,59	74,57	77,55	
		Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	97,49	97,49	97,59	97,64	97,69	97,74	97,79	
		Terwujudnya kota yang	Indeks Pelestarian	Data belum pernah dirilis	50,29	86,14	86,98	87,83	88,67	89,52	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)		(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	Terwujudnya Ekonomi Daerah yang Inklusif	berkebudayaan maju	Budaya (Indeks)								
			Rasio Gini (Indeks)	0,353	0,352	0,349	0,346	0,343	0,340	0,337	
			Tingkat Inflasi (%)	0,52	1,97	2,12	1,96	1,81	1,71	1,61	
			PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	59,33	60,01	60,65	61,33	62,01	63,69	64,37	
			Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,33	5,37	5,41	5,54	5,58	5,62	5,65	
		Meningkatnya kontribusi sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	24,69	25,09	25,24	25,39	25,54	25,69	25,84	
			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	5,89	5,90	5,92	5,95	5,98	6,05	6,12	
			Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	9,91	10,03	10,08	10,13	10,18	10,23	10,28	
		Terwujudnya kemudahan berusaha yang mendorong realisasi investasi daerah	Persentase peningkatan investasi	12,38	1	1,5	2	2,5	3	3,5	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)		(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
		Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran terbuka (%)	5,11	4,97	4,83	4,69	4,55	4,41	4,27	

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar 2025, data diolah

3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Strategi adalah cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang dijabarkan dalam bentuk program pembangunan daerah.

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas - prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten untuk mewujudkan visi dan misi dengan mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Adapun strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Blitar disajikan pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kota Blitar Tahun 2025 – 2029

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Mewujudkan Blitar Kota Pancasila yang aman, religius dan nasionalis	Terwujudnya kehidupan yang harmonis di masyarakat melalui penguatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik dan pembangunan daerah	Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan	Peningkatan ketentraman dan ketertiban yang mantap didukung tertib hukum dan kehidupan demokrasi yang sehat dan dinamis
					Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba serta precursor narkoba (P4GN-PN)
		Terwujudnya jaminan rasa aman pada masyarakat	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat		Peningkatan keamanan wilayah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
					Penguatan keamanan, ketentraman, dan ketertiban serta peningkatan keterlibatan Masyarakat dalam trantibum linmas untuk mengurangi kriminalitas dan mengoptimalkan penegakan perda
			Terwujudnya kota yang berketahanan bencana	Meningkatkan Pencegahan dan Penanganan Bencana	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat tentang potensi bahaya gempa bumi, dan cuaca ekstrem maupun bahaya lainnya dengan mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana
					Pengembangan sistem mitigasi bencana dan pengembangan jalur dan penetapan kawasan rawan bencana melalui sistem zonasi kawasan rawan bencana
					Pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana pada kawasan rawan bencana berbasis partisipasi masyarakat
2.		Meningkatnya Kualitas Kehidupan		Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Mewujudkan Kota Blitar sehat dan sejahtera	Masyarakat yang Sehat	Terwujudnya kesehatan yang merata	secara menyeluruh, terjangkau, merata, berkelanjutan, profesional dan bermutu	Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan dan jaminan kesehatan universal dengan penguatan dan optimalisasi fasilitas layanan kesehatan
					Pemerataan, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan tenaga kesehatan
					Peningkatan pencegahan kematian ibu dan anak disertai pencegahan dan pengurangan angka anak tidak sehat
					Percepatan penurunan angka kesakitan, penurunan penyakit menular dan tidak menular
					Percepatan Penuntasan stunting dan pencegahan stunting
					Dukungan pada program Makan Bergizi
					Dukungan pada penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis
					Dukungan pada penuntasan kasus TBC
					Dukungan pada pembangunan Rumah Sakit lengkap dan berkualitas
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Ketangguhan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Ketangguhan Sosial Masyarakat	Penanggulangan Kemiskinan secara terpadu dan terintegrasi	Penuntasan kemiskinan secara terpadu dengan perlindungan sosial terintegrasi
					Pemberian beasiswa untuk sekolah menengah dan perguruan tinggi berbasis keluarga miskin
					Peningkatan jaminan keluarga miskin melalui bantuan sosial

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Peningkatan jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat / rentan
				Meningkatkan ketahanan pangan daerah	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat
					Peningkatan ketahanan pangan dan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi <i>smart farming</i>
					Peningkatan ketahanan pangan melalui <i>smart farming</i> dan stabilitas harga terkait usaha pertanian
3.	Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis <i>Smart Governance</i>	Terwujudnya pembangunan kota nyaman dan layak huni	Terwujudnya fasilitas perkotaan yang berkelanjutan	Meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas umum dan infrastruktur kota yang peduli lingkungan
				Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan drainase serta menjamin ketersediaan air yang berkelanjutan	Peningkatan pelayanan air minum dan sanitasi yang aman bagi masyarakat
					Peningkatan pembangunan sumur resapan dari aliran air dan sumur biopori pada drainase lingkungan sebagai penangkap air hujan aliran air
					Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Air yang berketahanan iklim dan ekologi
					Peningkatan pengelolaan mata air di wilayah kota dan pengembangan jaringan irigasi secara terintegrasi
				Mewujudkan tata ruang yang efisien dan berkelanjutan melalui perencanaan ruang	Penguatan pengelolaan dan pengendalian tata ruang dan pemanfaatannya melalui evaluasi secara berkala dengan penyesuaian berdasarkan kebutuhan daerah
					Penguatan pengelolaan jalan kota

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana jalan beserta fasilitas jalan yang berkualitas, aman, ramah serta nyaman	Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal
					Peningkatan konektivitas layanan jaringan mobilitas utama masyarakat melalui dan integrasi multimoda dan penyiapan sarana prasarana integrasi antarmoda
					Transformasi tata kelola kelembagaan dalam sistem transportasi publik masal
					Peningkatan kerjasama dengan Kabupaten Blitar untuk peningkatan jalan penghubung antar daerah menuju akses jalur regional (JLS) dan nasional (jalan tol)
			Meningkatnya kualitas permukiman	Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman	Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan
			Terwujudnya Lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatkan cakupan pengelolaan sampah dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemanfaatan teknologi	Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy dan peningkatan pengelolaan dan layanan sampah B3
				Mengendalikan pencemaran lingkungan melalui berbagai instrumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Meningkatnya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Terwujudnya pelayanan pemerintahan yang berkualitas dan terintegrasi	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan publik serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Peningkatan pelayanan publik terintegrasi berbasis teknologi informasi
					Peningkatan satu data pelayanan berbasis identitas penduduk
					Peningkatan interoperabilitas sistem pelayanan publik
					Peningkatan akses dan konektivitas internet pada pusat pelayanan publik, pusat layanan wilayah dan sub pusat layanan wilayah
					Peningkatan kemampuan keuangan dan aset daerah sebagai modal pembangunan
					Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan pengembangan manfaat aset daerah di dukung kebijakan penambahan aset daerah
					Penataan kelembagaan yang adaptif dengan kebutuhan daerah
					Penguatan kelembagaan dan integrasi lintas sektor di posyandu untuk mendukung 6 (enam) layanan dasar
			Terwujudnya manajemen pemerintahan yang profesional	Meningkatnya reformasi tata kelola pemerintahan dan profesionalisme ASN	Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN Kota Blitar, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Blitar yang profesional dan bebas korupsi
					Peningkatan partisipasi masyarakat, dunia pendidikan dan dunia usaha dalam semua tahapan pembangunan
					Peningkatan pengendalian, evaluasi dan pengawasan pembangunan
					Peningkatan profesionalitas ASN

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward dan punishment termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan berdasarkan capaian kinerja
4.	Mengembangkan potensi pendidikan, pemuda dan perempuan sebagai generasi emas yang cerdas dan berkarakter	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Meningkatkan Pengelolaan dan Pemerataan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah
					Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan berbasis kondisi dan budaya lokal, potensi, dan keunggulan daerah.
					Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik menuju generasi berkompeten dan berdaya saing tinggi
					Peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan
					Peningkatan akses pendidikan sekolah menengah dan perguruan tinggi
					Dukungan pada program pemberian makan bergizi
			Meningkatnya kualitas generasi muda	Membangun generasi muda yang handal dan berdaya saing tinggi melalui penguatan karakter, prestasi, kreatifitas dan Inovasi	Penguatan Daya saing generasi muda melalui pemupukan ajang prestasi di segala bidang
					Peningkatan peran serta pemuda dalam mengisi pembangunan
					Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Karakter Pemuda yang Mandiri dan Kreatif

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Meningkatnya Kesenjangan Gender	generasi muda serta menumbuhkan budaya berolahraga di masyarakat	Memperluas tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam meningkatkan masyarakat olahraga
				Meningkatkan Pengarusutamaan Gender	Penguatan pengarusutamaan gender dan keluarga berkualitas
					Pemberdayaan penyandang disabilitas dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan Keputusan serta peningkatan partisipasi di pelbagai bidang pembangunan
					Pengendalian penduduk yang proporsional dan produktif.
					Peningkatan kualitas keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
			Terwujudnya kota yang berkebudayaan maju	Optimalisasi nilai budaya dalam pembangunan karakter	Peningkatan pemaian kebudayaan
					Penguatan pelestarian cagar budaya dan obyek yang diduga cagar budaya sebagai icon penguat karakter kebudayaan daerah
5.	Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata dan Industri	Terwujudnya ekonomi daerah yang inklusif	Meningkatnya kontribusi sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi	Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada	Sertifikasi seniman dan budayawan agar mampu bersaing secara global
					Peningkatan produktivitas dan daya saing sektor ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, penguatan stabilitas ekonomi serta pengendalian inflasi daerah
					Peningkatan produktivitas BUMD
					Transformasi pasar tradisional
					Penguatan stabilitas pasar melalui sinergitas pasar konvensional dan pasar modern

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				pengembangan perdagangan, industri , UMKM dan pariwisata	Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang menerapkan prinsip-prinsip dari pembangunan Ekonomi Hijau (Green Economy)
					Pengembangan kota sebagai pusat layanan regional
					Hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi
					Dukungan terhadap koperasi merah putih sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi lokal yang inklusif
					Peningkatan peran UMKM pada rantai industri melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif melalui penerapan teknologi dan kemitraan usaha
					Optimalisasi pemasaran UMKM melalui kerjasama antar pelaku UMKM dan pelaku industri dan sumber bahan baku
					Sertifikasi SDM pelaku/pengelola wisata dalam rangka peningkatan SDM profesional
					Peningkatan citra, karakter, dan daya saing kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata berbasis wisata kebangsaan dan kultural dengan urban tourism
					Penataan dan penguatan wisata sejarah khususnya terkait PETA dan Proklamator Bung Karno yang didukung penguatan peran kampung wisata dan wisata hutan kota
					Peningkatan kerjasama wisata dengan daerah sekitar, Pelaku wisata, media dan dunia usaha

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Pengembangan wisata kebangsaan sebagai edukasi nasional dalam Pembangunan karakter nasional
				Mengembangkan ekonomi kreatif	Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif
					Peningkatan pemasaran produk ekonomi kreatif pada pasar nasional dan internasional
			Terwujudnya kemudahan berusaha yang mendorong realisasi investasi daerah	Meningkatkan nilai investasi daerah	Peningkatan pelayanan investasi dan perizinan berbasis teknologi informasi didukung data data pendukung penarik investasi
					Peningkatan akses kemudahan investasi terkait regulasi, human resources, aksesibilitas dan kondusitivitas daerah
			Menurunnya pengangguran	Menurunkan Pengangguran	Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan pengurangan pengangguran terbuka dan terselubung
					Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja menghadapi transformasi industrialisasi
					Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan pemberian jaminan kesejahteraan tenaga kerja rentan

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar 2025, data diolah

3.2.1.1. Strategi dan Arah Kebijakan Misi Pertama Mewujudkan Blitar Kota Pancasila yang Aman, Religius dan Nasionalis

Dalam rangka mengawal keberhasilan untuk menjadikan Kota Blitar yang aman, religius dan nasionalis, telah ditetapkan sasaran pembangunannya. Selanjutnya untuk mewujudkan sasaran pembangunan pada misi mewujudkan Blitar Kota Pancasila yang aman, religius dan nasionalis ditetapkan Strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Strategi 1 : Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat dengan Melibatkan Seluruh Pemangku Kepentingan

Sasaran 1 : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik dan pembangunan daerah

Arah kebijakan :

- Peningkatan ketentraman dan ketertiban yang mantap didukung tertib hukum dan kehidupan demokrasi yang sehat dan dinamis;
- Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba serta prekursor narkoba (P4GN-PN).

Sasaran 2 : Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat

Arah kebijakan :

- Peningkatan keamanan wilayah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
- Penguatan keamanan, ketentraman, dan ketertiban serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam trantibum linmas untuk mengurangi kriminalitas dan mengoptimalkan penegakan perda.

Strategi 2 : Meningkatkan Pencegahan dan Penanganan Bencana

Sasaran 3 : Terwujudnya kota yang berketahanan bencana

Arah kebijakan :

- Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat tentang potensi bahaya gempa bumi, dan cuaca ekstrem maupun bahaya lainnya dengan mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana
- Pengembangan sistem mitigasi bencana dan pengembangan jalur dan penetapan kawasan rawan bencana melalui sistem zonasi kawasan rawan bencana
- Pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana pada kawasan rawan bencana berbasis partisipasi masyarakat

Sebagai bentuk dukungan dan kontribusi atas pencapaian Asta Cita, Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Nawa Bhakti Satya merupakan dukungan atas pencapaian :

- Asta Cita 1 - Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan HAM
- Asta Cita 8 - Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur;
- Jatim Lestari - Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan
- Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.

3.2.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan Misi Kedua Mewujudkan Kota Blitar Sehat dan Sejahtera

Dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, telah ditetapkan sasaran pembangunannya. Selanjutnya untuk mewujudkan sasaran pembangunan pada misi mewujudkan Kota Blitar Sehat dan Sejahtera ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Strategi 3 : Meningkatkan Upaya Pelayanan Kesehatan Secara Menyeluruh, Terjangkau, Merata, Berkelanjutan, Profesional dan Bermutu.

Sasaran 4 : Terwujudnya kesehatan yang merata

Arah Kebijakan :

- Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat
- Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan dan jaminan kesehatan universal dengan penguatan dan optimalisasi fasilitas layanan kesehatan
- Pemerataan, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan tenaga kesehatan
- Peningkatan pencegahan kematian ibu dan anak disertai pencegahan dan pengurangan angka anak tidak sehat
- Percepatan penurunan angka kesakitan, penurunan penyakit menular dan tidak menular
- Percepatan Penuntasan stunting dan pencegahan stunting
- Dukungan pada Program Pemberian Makan Bergizi
- Dukungan pada penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis
- Dukungan pada penuntasan kasus TBC
- Dukungan pada pembangunan Rumah Sakit lengkap dan berkualitas

Strategi 4 : Penanggulangan Kemiskinan secara terpadu dan terintegrasi

Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas hidup dan ketangguhan sosial masyarakat

Arah kebijakan :

- Penuntasan kemiskinan secara terpadu dengan perlindungan sosial terintegrasi

- Pemberian beasiswa untuk sekolah menengah dan perguruan tinggi berbasis keluarga miskin
- Peningkatan jaminan keluarga miskin melalui bantuan sosial
- Peningkatan jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat / rentan

Strategi 5 : Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah

Sasaran 5 : Meningkatkan kualitas hidup dan ketangguhan sosial masyarakat

Arah kebijakan :

- Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat
- Peningkatan ketahanan pangan dan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi *smart farming*
- Peningkatan ketahanan pangan melalui *smart farming* dan stabilitas harga terkait usaha pertanian

Sebagai bentuk dukungan dan kontribusi atas pencapaian Asta Cita, Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Nawa Bhakti Satya merupakan dukungan atas pencapaian :

- Asta Cita 2 - Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
- Asta Cita 6 - Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
- PHTC 1 - Memberi makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil;
- PHTC 2 - Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas;
- PHTC 3 - Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional;
- PHTC 5 - Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut;
- PHTC 7 - Melanjutkan Pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan terutama generasi milenial, Generasi Z, dan Masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR);

- Jatim Agro - Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan
- Jatim Sehat - Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas, Merata, Mudah Diakses dan Berkeadilan.
- Jatim Sejahtera - Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan melalui Perlindungan Sosial yang Adaptif, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Pedesaan dengan Pendekatan Lintas sectoral - Spasial Berbasis Data Terpadu

3.2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan Misi Ketiga Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis *Smart Governance*

Dalam rangka mewujudkan Kota Blitar yang berkelanjutan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif telah dirumuskan sasaran pembangunannya. Selanjutnya untuk mewujudkan sasaran pembangunan pada misi Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis *Smart Governance* ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Strategi 6 : Meningkatkan Akses Infrastruktur Perkotaan

Sasaran 6 : Terwujudnya fasilitas perkotaan yang berkelanjutan

Arah Kebijakan : Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas umum dan infrastruktur kota yang peduli lingkungan

Strategi 7 : Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Jaringan Drainase Serta Menjamin Ketersediaan Air Yang Berkelanjutan

Sasaran 6 : Terwujudnya fasilitas perkotaan yang berkelanjutan

Arah Kebijakan :

- Peningkatan pelayanan air minum dan sanitasi yang aman bagi masyarakat
- Peningkatan pembangunan sumur resapan dari aliran air dan sumur biopori pada drainase lingkungan sebagai penangkap air hujan aliran air
- Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Air yang berketahanan iklim dan ekologi
- Peningkatan pengelolaan mata air di wilayah kota dan pengembangan jaringan irigasi secara terintegrasi

Strategi 8 : Mewujudkan Tata Ruang Yang Efisien Dan Berkelanjutan Melalui Perencanaan Ruang

Sasaran 6 : Terwujudnya fasilitas perkotaan yang berkelanjutan

Arah Kebijakan : Penguatan pengelolaan dan pengendalian tata ruang dan pemanfaatannya melalui evaluasi secara berkala dengan penyesuaian berdasarkan kebutuhan daerah

Strategi 9 : Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Kuantitas Prasarana Jalan Beserta Fasilitas Jalan Yang Berkualitas, Aman, Ramah Serta Nyaman

Sasaran 6 : Terwujudnya fasilitas perkotaan yang berkelanjutan

Arah Kebijakan :

- Penguatan pengelolaan jalan kota
- Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal
- Peningkatan konektivitas layanan jaringan mobilitas utama masyarakat melalui dan integrasi multimoda dan penyiapan sarana prasarana integrasi antarmoda
- Transformasi tata kelola kelembagaan dalam sistem transportasi publik masal
- Peningkatan kerjasama dengan Kabupaten Blitar untuk peningkatan jalan penghubung antar daerah menuju akses jalur regional (JLS) dan nasional (jalan tol)

Strategi 10 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perumahan Dan Permukiman

Sasaran 7 : Meningkatkan kualitas permukiman

Arah Kebijakan : Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan

Strategi 11 : Meningkatkan Cakupan Pengelolaan Sampah Dengan Melibatkan Peran Serta Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi

Sasaran 8 : Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan

Arah Kebijakan : Pengelolaan sampah terpadu hulu – hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan sirkular ekonomi dan peningkatan pengelolaan dan layanan sampah B3.

Strategi 12 : Mengendalikan Pencemaran Lingkungan Melalui Berbagai Instrumen Pengendalian Dan Pencemaran Lingkungan

Sasaran 8 : Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan

Arah Kebijakan : Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

Strategi 13 : Meningkatkan Kualitas Kinerja Dan Pelayanan Publik Serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sasaran 9 : Terwujudnya pelayanan pemerintahan yang berkualitas dan terintegrasi

Arah kebijakan :

- Peningkatan pelayanan publik terintegrasi berbasis teknologi informasi
- Peningkatan satu data pelayanan berbasis identitas penduduk

- Peningkatan interoperabilitas sistem pelayanan publik
- Peningkatan akses dan konektivitas internet pada pusat pelayanan publik, pusat pelayanan wilayah dan sub pusat pelayanan wilayah
- Peningkatan kemampuan keuangan dan aset daerah sebagai modal pembangunan
- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan pengembangan manfaat aset daerah di dukung kebijakan penambahan aset daerah
- Dukungan penguatan kelembagaan dan integrasi lintas sektor di posyandu untuk mendukung 6 (enam) layanan dasar
- Penataan kelembagaan yang adaptif dengan kebutuhan daerah

Strategi 14 : Meningkatnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Dan Profesionalisme ASN

Sasaran 10 : Terwujudnya manajemen pemerintahan yang profesional

Arah kebijakan :

- Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN Kota Blitar, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Blitar yang profesional dan bebas korupsi
- Peningkatan partisipasi masyarakat, dunia pendidikan dan dunia usaha dalam semua tahapan pembangunan
- Peningkatan pengendalian, evaluasi dan pengawasan pembangunan
- Peningkatan profesionalitas ASN
- Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward dan punishment termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan berdasarkan capaian kinerja

Sebagai bentuk dukungan dan kontribusi atas pencapaian Asta Cita, Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Nawa Bhakti Satya merupakan dukungan atas pencapaian :

- Asta cita 3 - Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
- Asta Cita 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
- Asta cita 8 - Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam & budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil & makmur;

- PHTC 6 - Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara
- Jatim Berkah Amanah - Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif
- Jatim Akses - Memperkuat infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah dan Intra Aglomerasi yang Berkualitas, Modern, Terpadu, dan Berkeadilan;
- Jatim Lestari - Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

3.2.1.4. Strategi dan Arah Kebijakan Misi Keempat mengembangkan potensi pendidikan, pemuda dan perempuan sebagai generasi emas yang cerdas dan berkarakter

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan dalam upaya perkuatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pemuda dan perempuan telah dirumuskan sasaran pembangunannya. Selanjutnya untuk mewujudkan sasaran pembangunan pada misi mengembangkan potensi pendidikan, pemuda dan perempuan sebagai generasi emas yang cerdas dan berkarakter ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Strategi 15 : Meningkatkan Pengelolaan dan Pemerataan Aksesibilitas Layanan Pendidikan

Sasaran 11 : Meningkatnya kualitas pendidikan

Arah kebijakan :

- Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah
- Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan berbasis kondisi dan budaya lokal, potensi, dan keunggulan daerah
- Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik menuju generasi berkompeten dan berdaya saing tinggi
- Peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan
- Peningkatan akses pendidikan sekolah menengah dan perguruan tinggi
- Dukungan pada program pemberian makan bergizi

Strategi 16 : Membangun Generasi Muda Yang Handal Dan Berdaya Saing Tinggi Melalui Penguatan Karakter, Prestasi, Kreativitas Dan Inovasi Generasi Muda Serta Menumbuhkan Budaya Berolahraga Di Masyarakat

Sasaran 12 : Meningkatnya kualitas generasi muda

Arah kebijakan :

- Penguatan daya saing generasi muda melalui pemupukan ajang prestasi di segala bidang
- Peningkatan peran serta pemuda dalam mengisi pembangunan

- Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Karakter Pemuda yang Mandiri dan Kreatif
- Memperluas tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam meningkatkan masyarakat olahraga

Strategi 17 : Meningkatkan Pengarusutamaan Gender

Sasaran 13 : Meningkatnya kesetaraan gender

Arah kebijakan :

- Penguatan pengarusutamaan gender dan keluarga berkualitas
- Pemberdayaan penyandang disabilitas dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan Keputusan serta peningkatan partisipasi di pelbagai bidang pembangunan
- Pengendalian penduduk yang proporsional dan produktif
- Peningkatan kualitas keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.

Strategi 18 : Optimalisasi Nilai Budaya Dalam Pembangunan Karakter

Sasaran 14 : Terwujudnya kota yang berkebudayaan maju

Arah kebijakan :

- Peningkatan pemajuan kebudayaan
- Penguatan pelestarian cagar budaya dan obyek yang diduga cagar budaya sebagai ikon penguat karakter kebudayaan daerah
- Sertifikasi seniman dan budayawan agar mampu bersaing secara global

Sebagai bentuk dukungan dan kontribusi atas pencapaian Asta Cita, Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Nawa Bhakti Satya merupakan dukungan atas pencapaian :

- Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
- Asta cita 8 - Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur;
- PHTC 4 - Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah sekolah yang perlu renovasi;
- PHTC 6 - Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara;
- Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif melalui Pengembangan Nilai-nilai Kesalehan Sosial, Berjiwa Pancasila, Pengarusutamaan Gender, serta Memajukan Seni, Budaya dan Prestasi Olahraga;

- **Jatim Cerdas** - Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses Pendidikan untuk semua (*Education for all*) yang berkualitas, merata, dan berkeadilan

3.2.1.5. Strategi dan Arah Kebijakan Misi Kelima Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata dan Industri

Dalam rangka mengawal keberhasilan mewujudkan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata dan Industri telah dirumuskan sasaran pembangunannya. Selanjutnya untuk mewujudkan sasaran pembangunan pada misi mewujudkan pembangunan Kota Blitar sebagai kota perdagangan, jasa, pariwisata dan industri ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Strategi 19 : Membangun Kemandirian Ekonomi Yang Berdimensi Kerakyatan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Melalui Penguatan Struktur Ekonomi Yang Berorientasi Pada Pengembangan Perdagangan, Industri , UMKM Dan Pariwisata

Sasaran 15 : Meningkatnya kontribusi sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi

Arah kebijakan :

- Peningkatan produktivitas dan daya saing sektor ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, penguatan stabilitas ekonomi serta pengendalian inflasi daerah
- Peningkatan produktivitas BUMD
- Transformasi pasar tradisional
- Penguatan stabilitas pasar melalui sinergitas pasar konvensional dan pasar modern
- Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang menerapkan prinsip-prinsip dari pembangunan Ekonomi Hijau (*Green Economy*)
- Pengembangan kota sebagai pusat layanan regional
- Hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi
- Dukungan terhadap koperasi merah putih sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi lokal yang inklusif
- Peningkatan peran UMKM pada rantai industri melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif melalui penerapan teknologi dan kemitraan usaha
- Optimalisasi pemasaran UMKM melalui kerjasama antar pelaku UMKM dan pelaku industri dan sumber bahan baku
- Sertifikasi SDM pelaku/pengelola wisata dalam rangka peningkatan SDM profesional
- Peningkatan citra, karakter, dan daya saing kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata berbasis wisata kebangsaan dan kultural dengan *urban tourism*
- Penataan dan penguatan wisata sejarah khususnya terkait PETA dan Proklamator Bung Karno yang didukung penguatan peran kampung wisata dan wisata hutan kota

- Peningkatan kerjasama wisata dengan daerah sekitar, Pelaku wisata, media dan dunia usaha
- Pengembangan wisata kebangsaan sebagai edukasi nasional dalam Pembangunan karakter nasional

Strategi 20 : Mengembangkan Ekonomi Kreatif

Sasaran 15 : Meningkatnya kontribusi sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi

Arah kebijakan :

- Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif
- Peningkatan pemasaran produk ekonomi kreatif pada pasar regional, nasional dan internasional

Strategi 21 : Meningkatkan Nilai Investasi Daerah

Sasaran 16 : Terwujudnya kemudahan berusaha yang mendorong kemudahan investasi daerah

Arah kebijakan :

- Peningkatan pelayanan investasi dan perizinan berbasis teknologi informasi didukung data data pendukung penarik investasi
- Peningkatan akses kemudahan investasi terkait regulasi, *human resources*, aksesibilitas dan kondusitivitas daerah

Strategi 22 : Menurunkan Pengangguran

Sasaran 17 : Menurunnya pengangguran

Arah kebijakan :

- Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan pengurangan pengangguran terbuka dan terselubung
- Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja menghadapi transformasi industrialisasi
- Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan pemberian jaminan kesejahteraan tenaga kerja rentan

Sebagai bentuk dukungan dan kontribusi atas pencapaian Asta Cita, Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Nawa Bhakti Satya merupakan dukungan atas pencapaian :

- Asta Cita 2 - Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- Asta Cita 3 - Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
- Asta Cita 5 - Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- Jatim Kerja - Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas melalui Peningkatan Kewirausahaan, Iklim Investasi dan Stabilitas Ekonomi

3.2.2. Pentahapan Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan Kota Blitar 2025 – 2029 merupakan tahap pembangunan lima tahunan dari RPJPD Kota Blitar Tahun 2025 – 2045. Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD Kota Blitar Tahun 2025 – 2045, Prioritas utama, tema atau fokus pembangunan pada periode 2025 – 2029 adalah Penguatan Pondasi Transformasi sebagai dasar pembangunan melalui transformasi ekonomi, sosial, lingkungan dan pemerintahan.

Selanjutnya, untuk menuju pada terwujudnya visi kota Blitar pada tahun 2025 - 2029, maka disusunlah tema pembangunan dalam RKPD pada periode 2025 - 2029. Fokus/Tema pembangunan tahunan sebagai berikut :



Gambar 3.1 Fokus / Tema Tahunan RKPD selama Periode RPJMD Tahun 2025 – 2029

3.2.3. Arah Kebijakan Kewilayahan

Berdasarkan faktor sosial, ekonomi dan lingkungan, Kota Blitar merumuskan kebijakan kewilayahan yang mendukung keterpaduan pembangunan. Kebijakan kewilayahan dirumuskan untuk menciptakan daya saing daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Merujuk pada RTRW Provinsi Jawa Timur tahun 2023-2043 dan RPJPD Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2045, pembangunan kewilayahan Provinsi Jawa Timur lima tahun ke depan fokus pada peningkatan lima koridor penghubung antar kawasan dan kepulauan yaitu Kawasan Gerbangkertosusila, Kawasan Bromo Tengger-Sumeru, Kawasan Selingkar Ijen, Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, serta Kawasan Madura dan Kepulauan. Potret kondisi perkembangan wilayah di Provinsi Jawa Timur pada lima koridor penghubung antar kawasan dan kepulauan menunjukkan pusat pertumbuhan berada pada Kawasan Gerbangkertosusila yang merupakan pusat dari perdagangan, jasa, industri pengolahan, serta logistik di Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru yang merupakan kawasan dengan potensi pertanian, perkebunan serta sektor pariwisata relatif berkembang selama 20 tahun utamanya di sekitar Kota Malang-Kota

Batu. Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas selatan memperlihatkan adanya perkembangan yang cukup signifikan utamanya di sekitar Kota Kediri. Di sisi lain, Kawasan Selingkar Ijen menunjukkan perkembangan relatif tinggi di Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi. Perkembangan di wilayah tersebut dipengaruhi oleh potensi besar pada sektor pariwisata dan agroindustri. Di Kawasan Madura dan Kepulauan, perkembangan wilayah di kawasan tersebut terlihat memusat di Kabupaten Pamekasan. Perkembangan wilayah di Kawasan Madura dan Kepulauan didorong dan difokuskan pada pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan.

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 Kota Blitar merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berada di Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Selatan merupakan kawasan strategis yang menghubungkan wilayah selatan Jawa Timur dengan akses jalan nasional lintas selatan. Dikelilingi oleh pegunungan dan potensi alam yang belum banyak tereksplorasi, kawasan ini memiliki kekuatan dalam pengembangan pertanian, energi terbarukan, serta pariwisata berbasis alam dan petualangan. Percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan ini membuka peluang besar bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi lokal. Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai kawasan agropolitan, minapolitan dan agroindustri dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan dan perikanan. Selain itu, kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan juga memiliki keunggulan dalam pariwisata alam. Untuk mewujudkan Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan sebagai pusat agropolitan dan minapolitan, serta berkembang untuk menjadi kawasan agroindustri di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan perlu adanya peningkatan akses layanan dasar seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan, peningkatan daya saing dan kompetensi sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan serta perluasan penyediaan jaminan sosial. Dalam aspek ekonomi, Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan ini perlu didorong untuk optimalisasi sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, pengembangan komoditas unggulan, hilirisasi produk unggulan, peningkatan akses pendanaan, peningkatan kerja sama antar daerah dan juga perluasan pemasaran produk sebagai upaya mewujudkan keterkaitan pasar lokal dan pasar regional. Pengembangan tersebut juga harus didukung dengan peningkatan konektivitas ekonomi dan transportasi pendukung sistem logistik seperti jalan tol dan bandara. Selain itu, untuk mendukung pengembangan pariwisata di Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan perlu didukung dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan.

Dalam mendukung pengembangan di wilayah tersebut diperlukan highlight indikasi intervensi yang mampu

memberikan dampak positif serta meningkatkan ekonomi di Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Adapun highlight indikasi intervensi untuk Kota Blitar adalah:

1. Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Sesar Darat di Jawa Timur dengan intervensi Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik di Kota Blitar.
2. Pengembangan dalam urusan Pariwisata dengan intervensi Revitalisasi Museum PETA Blitar

3.2.4. Pengarustamaan Pembangunan

3.2.4.1. Pengarusutamaan SDGs

Pengarustamaan *Sustainable Development Goals (SDGs)* mengintegrasikan agenda pembangunan berkelanjutan ke seluruh aspek nasional dan daerah melalui:

- Setiap kebijakan pemerintah harus mendukung percepatan pencapaian SDGs 2030;
- Mengintegrasikan target-target SDGs kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- Penyusunan Rancangan Aksi Daerah, dan Penguatan Kolaborasi Multi Pihak;
- Pemantauan dan evaluasi pencapaian target SDGs; dan
- Inklusi Sosial dan Keberlanjutan, semua program pembangunan harus mengintegrasikan prinsip inklusi sosial, dengan fokus pada kelompok rentan dan marginal, serta prinsip keberlanjutan lingkungan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden No 111/2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs, Peraturan Menteri Peraturan Menteri No 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional (dokumen RAN dan RAD) terdapat 212 indikator sasaran yang terbagi dalam Tujuan 1 sampai dengan Tujuan 17 dari TPB/SDGs dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.10
Kontribusi Kota Blitar terhadap Pencapaian SDGs

Tujuan SDGs	Kontribusi Kota Blitar
Tanpa Kemiskinan	Pemerintah Kota Blitar berkomitmen dalam SDGs tanpa kemiskinan (<i>SDGs Goal 1</i>) selaras dengan misi mewujudkan kota Blitar sehat dan sejahtera pada sasaran Meningkatnya kualitas hidup dan ketangguhan sosial masyarakat
Tanpa kelaparan	Pemerintah Kota Blitar berkomitmen dalam SDGs tanpa kelaparan (<i>SDGs Goal 2</i>) selaras dengan misi mewujudkan kota Blitar sehat dan sejahtera pada sasaran meningkatnya kualitas hidup dan ketangguhan sosial masyarakat
Kehidupan sehat dan sejahtera	Pemerintah Kota Blitar berkomitmen dalam SDGs kehidupan sehat dan sejahtera (<i>SDGs Goal 3</i>) selaras dengan misi mewujudkan Kota Blitar sehat dan sejahtera pada sasaran terwujudnya kesehatan yang merata di Kota Blitar dan sasaran meningkatnya kualitas hidup dan ketangguhan sosial masyarakat

Tujuan SDGs	Kontribusi Kota Blitar
Pendidikan berkualitas	Pemerintah Kota Blitar berkomitmen dalam SDGs Pendidikan berkualitas (<i>SDGs Goal 4</i>) selaras dengan misi mengembangkan potensi pendidikan, pemuda dan perempuan sebagai generasi emas yang cerdas dan berkarakter pada sasaran meningkatnya kualitas pendidikan
Kesetaraan gender	Pemerintah Kota Blitar berkomitmen dalam SDGs kesetaraan gender (<i>SDGs Goal 5</i>) selaras dengan misi mengembangkan potensi pendidikan, pemuda dan perempuan sebagai generasi emas yang cerdas dan berkarakter pada sasaran meningkatnya kesetaraan gender
Air bersih dan sanitasi layak	Pemerintah Kota Blitar berkomitmen dalam SDGs air bersih dan sanitasi layak (<i>SDGs Goal 6</i>) selaras dengan misi mewujudkan pembangunan Kota Blitar yang berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang berbasis <i>smart governance</i> pada sasaran terwujudnya fasilitasi perkotaan yang berkelanjutan
Energi bersih dan terjangkau	Pemerintah Kota Blitar berkomitmen dalam SDGs energi bersih dan terjangkau (<i>SDGs Goal 7</i>) selaras dengan misi mewujudkan pembangunan Kota Blitar yang berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang berbasis <i>smart governance</i> pada sasaran terwujudnya fasilitasi perkotaan yang berkelanjutan
Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	Pemerintah Kota Blitar berkomitmen dalam SDGs pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (<i>SDGs Goal 8</i>) selaras dengan misi mewujudkan pembangunan Kota Blitar sebagai kota perdagangan, jasa, pariwisata dan industri pada sasaran meningkatnya kontribusi sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi dan sasaran menurunnya pengangguran
Industri, inovasi dan infrastruktur	Pemerintah Kota Blitar berkomitmen dalam SDGs industri, inovasi dan infrastruktur (<i>SDGs Goal 9</i>) selaras dengan misi mewujudkan pembangunan Kota Blitar yang berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang berbasis <i>smart governance</i> pada sasaran terwujudnya fasilitasi perkotaan yang berkelanjutan serta misi mewujudkan pembangunan Kota Blitar sebagai kota perdagangan, jasa, pariwisata dan industri pada sasaran meningkatnya kontribusi sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi

Tujuan SDGs	Kontribusi Kota Blitar
Berkurangnya kelompok rentan	Pemerintah Kota Blitar berkomitmen dalam SDGs berkurangnya kelompok rentan (<i>SDGs Goal 10</i>) selaras dengan misi mewujudkan pembangunan Kota Blitar sebagai kota perdagangan, jasa, pariwisata dan industri pada sasaran meningkatnya kontribusi sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi serta misi mewujudkan Kota Blitar sehat dan sejahtera pada sasaran meningkatnya kualitas hidup dan ketangguhan sosial masyarakat
Kota dan permukiman berkelanjutan	Pemerintah Kota Blitar berkomitmen dalam SDGs kota dan permukiman berkelanjutan (<i>SDGs Goal 11</i>) selaras dengan misi mewujudkan pembangunan Kota Blitar yang berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang berbasis <i>smart governance</i> pada sasaran meningkatnya kualitas permukiman
Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab	Pemerintah Kota Blitar berkomitmen dalam SDGs konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (<i>SDGs Goal 12</i>) selaras dengan misi mewujudkan pembangunan Kota Blitar yang berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang berbasis <i>smart governance</i> pada sasaran terwujudnya fasilitasi perkotaan yang berkelanjutan dan sasaran terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan
Penanganan perubahan iklim	Pemerintah Kota Blitar berkomitmen dalam SDGs penanganan perubahan iklim (<i>SDGs Goal 13</i>) selaras dengan misi mewujudkan pembangunan Kota Blitar yang berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang berbasis <i>smart governance</i> pada sasaran terwujudnya fasilitasi perkotaan yang berkelanjutan
Ekosistem lautan	-
Ekosistem daratan (life on land)	Pemerintah Kota Blitar berkomitmen dalam SDGs ekosistem daratan (<i>life on land</i>) (<i>SDGs Goal 15</i>) selaras dengan misi mewujudkan pembangunan Kota Blitar yang berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang berbasis <i>smart governance</i> pada sasaran terwujudnya fasilitasi perkotaan yang berkelanjutan dan sasaran terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan
Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat	Pemerintah Kota Blitar berkomitmen dalam SDGs perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat (<i>SDGs Goal 16</i>) selaras dengan misi mewujudkan pembangunan Kota Blitar yang

Tujuan SDGs	Kontribusi Kota Blitar
	berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang berbasis <i>smart governance</i> pada sasaran terwujudnya pelayanan pemerintahan yang berkualitas dan terintegrasi serta sasaran terwujudnya manajemen pemerintahan yang professional
Kemitraan untuk mencapai tujuan	Pemerintah Kota Blitar berkomitmen dalam SDGs kemitraan untuk mencapai tujuan (<i>SDGs Goal 17</i>) melalui berbagai inisiatif dan kolaborasi bersinergi dengan universitas, organisasi masyarakat, dan sektor swasta untuk untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan. Sebagai bentuk dukungan dan kontribusi atas pencapaian (<i>SDGs Goal 17</i>) kemitraan dengan memberikan fasilitasi dan mediasi, kemudahan bagi pihak yang terlibat dalam kemitraan

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar 2025, data diolah

3.2.5. Program Prioritas Daerah

Program pembangunan daerah disusun dan ditetapkan berdasarkan tema tahunan untuk penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah. Sehingga bentuk dasar dari program pembangunan daerah adalah program perangkat daerah. Sedangkan program prioritas pembangunan daerah adalah program yang dirumuskan dan dipilih dari program pembangunan daerah karena memiliki keterhubungan langsung dengan pencapaian visi dan misi daerah.

Keterhubungan langsung dengan visi dan misi daerah disebabkan adanya program yang disusun sebagai janji politik sebagai operasionalisasi dari visi dan misi yang diajukan dalam proses pemilihan Kepala Daerah. Agar Program yang dijanjikan dapat terlaksana untuk mencapai visi dan misi dalam struktur perencanaan pembangunan daerah, maka program tersebut harus dikonversi atau dipersamakan dengan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur program dalam ketentuan perencanaan daerah.

Adapun persamaan program janji politik yang dikonversi ke dalam program prioritas daerah berdasarkan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur program adalah sebagaimana tercantum pada tabel 3.11 dan program prioritas pembangunan daerah yang dihubungkan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagai mana disajikan pada Tabel 3.12. berikut :

Tabel 3.11
Pelaksanaan Program Prioritas Walikota oleh Perangkat Daerah dengan Program Prioritas Daerah
Tahun 2025-2029

No	Program Prioritas Walikota	Perangkat Daerah	Program Prioritas Daerah
1	Mendirikan pusat kajian pemikiran dan ajaran Bung Karno	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2	Membumikan pemikiran dan ajaran Bung Karno ke dalam Lembaga Pendidikan, Organisasi Sosial Politik dan komponen masyarakat lainnya.	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik 3. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya 4. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
3	Penyediaan dana bantuan untuk TPQ, Madrasah Diniyah, Pesantren, Sekolah Minggu, dan lainnya, serta peningkatan SDM dan kesejahteraan tenaga pendidiknya.	Bagian yang menangani urusan kesra pada Sekretariat daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat)
4	“Sarapan Bareng Walikota Blitar” sebagai sarana pelatihan Life Skill bagi masyarakat Kota Blitar	Bagian yang manangani urusan Pemerintahan pada Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bagian Pemerintahan)
5	Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan tenaga kesehatan, dan dokter.	Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
		Rumas Sakit Umum Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
6	Pembangunan baru gedung RSUD untuk penambahan jumlah ruang rawat inap,	Rumas Sakit Umum Daerah	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

No	Program Prioritas Walikota	Perangkat Daerah	Program Prioritas Daerah
	ruang operasi, CATH LAB dan pengajuan peningkatan fasilitas pelayanan Kesehatan		
7	Menjadikan RSUD Mardi Waluyo sebagai Rumah Sakit Rujukan	Rumas Sakit Umum Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
8	Memfasilitasi pelayanan ambulan gratis untuk penjemputan dan pemulangan pasien/jenazah yang cepat dan tanggap	Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Rumas Sakit Umum Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
9	Meningkatkan Bantuan Sosial bagi lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga tidak mampu	Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial	Program Rehabilitasi Sosial
10	Optimalisasi bantuan beras kesejahteraan daerah (Rastrada) dengan bantuan lauk-pauk bagi keluarga tidak mampu	Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
11	Pembangunan sarana, prasarana, utilitas umum dan infrastruktur kota yang ramah publik dan lingkungan	Perangkat Daerah yang menangani urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Program Penataan Bangunan Gedung 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air 4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 5. Penyelenggaraan Jalan
		Perangkat Daerah yang menangani urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)
		Perangkat Daerah yang menangani urusan Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
		Perangkat Daerah yang menangani urusan Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

No	Program Prioritas Walikota	Perangkat Daerah	Program Prioritas Daerah
12	Memfasilitasi Pengelolaan sampah dan limbah	Perangkat Daerah yang menangani urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Perangkat Daerah yang menangani urusan Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Persampahan
13	Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Air yang berketahanan iklim dan ekologi	Perangkat Daerah yang menangani urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
14	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat tentang potensi bahaya gempa bumi, dan cuaca ekstrem maupun bahaya lainnya dengan mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural	Perangkat Daerah yang menangani urusan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana
15	Pengembangan karier ASN berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward dan punishment	Perangkat Daerah yang menangani urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Kepegawaian Daerah
16	Mengembangkan pelayanan berbasis Teknologi Informasi yang terintegrasi melalui Blitar <i>Smart Services</i>	Perangkat Daerah yang menangani urusan Komunikasi, Informatika dan Statistik	1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kab/Kota 2. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Perangkat Daerah yang menangani urusan Perpustakaan dan Kearsipan	Program Pembinaan Perpustakaan Program Pengelolaan Arsip
		Perangkat Daerah yang menangani urusan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

No	Program Prioritas Walikota	Perangkat Daerah	Program Prioritas Daerah
		Bagian yang menangani urusan Organisasi pada Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Perangkat Daerah yang menangani urusan Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal
17	Optimalisasi program RT KEREN menjadi KARYA MAS (Kelurahan Berdaya Menuju Kota Masa Depan) dengan meningkatkan kemanfaatan bagi warga masyarakat	Bagian yang menangani urusan Pemerintahan pada Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
18	Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan	Perangkat Daerah yang menangani urusan Pendidikan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
19	Menyediakan fasilitas belajar mengajar berbasis IT (Digitalisasi Pendidikan)	Perangkat Daerah yang menangani urusan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan (SD, SMP)
		Perangkat Daerah yang menangani urusan Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program pengelolaan aplikasi dan informatika
20	Mengembangkan budaya akademik di Kota Blitar melibatkan perguruan tinggi	Perangkat Daerah yang menangani urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Riset dan Inovasi Daerah
21	Peningkatan pelayanan sarana transportasi bagi peserta didik	Perangkat Daerah yang menangani urusan Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
22	Menumbuhkembangkan kreativitas kebudayaan berupa pembinaan, bantuan peralatan, optimalisasi pusat kesenian, dan penyelenggaraan event-event seni budaya	Perangkat Daerah yang menangani urusan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan (PAUD, SD, SMP)
		Perangkat Daerah yang menangani urusan Kebudayaan dan Pariwisata	Program Pengembangan Kebudayaan
23	Pembekalan pendidikan pra-nikah dan parenting bagi ibu dalam pola asuh anak	Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 2. Program Pemenuhan Hak Anak

No	Program Prioritas Walikota	Perangkat Daerah	Program Prioritas Daerah
		Perangkat Daerah yang menangani urusan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
24	Pendampingan dan perlindungan bagi pekerja wanita	Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Program Pemenuhan Hak Anak 2. Program Perlindungan Perempuan
		Perangkat Daerah yang menangani Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	Program Hubungan Industrial
25	Menjalin kerjasama perdagangan antar pemerintah daerah	Bagian yang menangani urusan Pemerintahan pada Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Pemerintahan)
		Perangkat Daerah yang menangani urusan Perindustrian dan Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
26	Membuka akses & koneksi antar wilayah dengan cara: membenahi jalur transportasi (Pintu Gerbang Tol Menghadap ke Kota)	Perangkat Daerah yang menangani Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Jalan
27	Membangun Pasar Agro, Pasar Induk, dan Pergudangan sebagai pusat perdagangan pasar grosir dan Revitalisasi Pasar	Bagian yang menangani urusan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah	Program Perekonomian dan Pembangunan (Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat)
		Perangkat Daerah yang menangani Perindustrian dan Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
28	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menghasilkan produk unggulan daerah melalui penerapan teknologi dan kemitraan usaha	Perangkat Daerah yang menangani urusan UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
29	Membangun pasar ekonomi kreatif dengan memberi ruang kreasi kepada milenial dan perempuan dalam bidang	Perangkat Daerah yang menangani urusan Kebudayaan dan Pariwisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

No	Program Prioritas Walikota	Perangkat Daerah	Program Prioritas Daerah
	IT, kuliner, kriya, fashion, dan potensi lainnya		
30	Memfasilitasi promosi dan pemasaran produk unggulan Kota Blitar ke dalam dan luar negeri	Perangkat Daerah yang menangani urusan Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal
		Perangkat Daerah yang menangani, UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
		Perangkat Daerah yang menangani urusan Perdagangan Kota Blitar	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
31	Membentuk BUMD baru guna menangani kegiatan bidang usaha baru dalam satu wadah multiusaha	Bagian yang menangani urusan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah	Program Perekonomian dan Pembangunan (Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat)
		Perangkat Daerah yang menangani urusan Keuangan	Penyertaan Modal
		Bagian yang menangani urusan Hukum pada Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
32	Makam Bung Karno sebagai Destinasi Wisata Utama Kota Blitar berskala internasional	Perangkat Daerah yang menangani urusan Kebudayaan dan Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
33	Menjalin hubungan kemitraan dengan negara dan kota di luar negeri yang memiliki hubungan kesejarahan dengan Bung Karno	Bagian yang menangani urusan kerjasama pada Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
34	Penguatan peran kampung wisata dan membangun objek wisata baru	Perangkat Daerah yang menangani urusan Kebudayaan dan Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata
		Perangkat Daerah yang menangani urusan Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
		Kecamatan	1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

No	Program Prioritas Walikota	Perangkat Daerah	Program Prioritas Daerah
35	Memfasilitasi dan pendampingan pertanian model Urban Farming dan Pola Tanam Organik	Perangkat Daerah yang menangani urusan Ketahanan Pangan dan Pertanian	1. Program Penyuluhan Pertanian 2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 3. Program Pengolahan Dan Pemasaran Perikanan 4. Program Pengawasan Keamanan Pangan 5. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 6. Program Penanganan Kerawanan Pangan 7. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 8. Program Perizinan Usaha Pertanian 9. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
36	Bantuan peralatan dan fasilitas pendukung di bidang pertanian	Perangkat Daerah yang menangani urusan Ketahanan Pangan dan Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
37	Pengelolaan tata niaga produk pertanian dan UMKM melalui BUMD	Bagian yang menangani urusan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah	Program Perekonomian dan Pembangunan (Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat)
		Perangkat Daerah yang menangani urusan Ketahanan Pangan dan Pertanian	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
38	Membuka Industri Baru dan memberikan kemudahan serta kenyamanan bagi investor untuk berinvestasi dan membuka pabrik (berproduksi) sehingga menyerap tenaga kerja	Perangkat Daerah yang menangani urusan Penanaman Modal	1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 2. Program Pelayanan Penanaman Modal 3. Program Pengendalian Penanaman Modal
		Perangkat Daerah yang menangani urusan Lingkungan hidup	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
		Perangkat Daerah yang menangani urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pemyelenggaraan Penataan Ruang
		Perangkat Daerah yang menangani urusan Perindustrian dan Perdagangan	Program Pengendalian Izin Usaha Industri

No	Program Prioritas Walikota	Perangkat Daerah	Program Prioritas Daerah
39	Membangun kerja sama dengan pelaku usaha untuk memprioritaskan tenaga kerja warga kota Blitar	Perangkat Daerah yang menangani urusan Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja
		Bagian yang menangani urusan Pemerintahan pada Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Pemerintahan)
40	Normalisasi Drainase Perkotaan, Normalisasi Sungai untuk peningkatan fungsi irigasi dan Sanitasi Perkotaan	Perangkat Daerah yang menangani urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air 2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		Perangkat Daerah yang menangani urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
41	Pembangunan Sekolah dan Revitalisasi Sekolah	Perangkat Daerah yang menangani urusan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
42	Pembangunan Rusunawa dan Rumah Layak Huni Perkotaan	Perangkat Daerah yang menangani urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1. Program Pengembangan Perumahan 2. Program Kawasan Permukiman 3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
43	Pembangunan Hunian Perumahan PNS, Karyawan BUMN/BUMD dan Karyawan swasta.	Perangkat Daerah yang menangani urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan
44	Pembangunan Pusat Ekonomi Perdagangan (Blitar Trade Center)	Perangkat Daerah yang menangani Perindustrian dan Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
45	Pembangunan Fasilitas Olahraga (Sirkuit Sentul)	Perangkat Daerah yang menangani urusan Kepemudaan dan Olahraga	Program Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
46	Pembangunan dan peningkatan infrastruktur obyek Wisata Perkotaan	Perangkat Daerah yang menangani urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program penyelenggaraan jalan
47	Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Umum	Perangkat Daerah yang menangani urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Program Penataan Bangunan Gedung 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

No	Program Prioritas Walikota	Perangkat Daerah	Program Prioritas Daerah
			3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air 4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
48	Mall UMKM	Perangkat Daerah yang menangani urusan UMKM	Program Pengembangan UMKM
49	Pemberian beasiswa untuk sekolah menengah dan perguruan tinggi berbasis keluarga miskin	Perangkat Daerah yang menangani urusan Kepemudaan	Program Peningkatan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		Perangkat Daerah yang menangani urusan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
50	Pilkada 2029	Perangkat Daerah yang menangani urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan pengembangan Etika serta Budaya Politik

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar 2025, data diolah

Tabel 3.12
Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2025 – 2029

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
Visi : KOTA BLITAR YANG MAJU, SEHAT DAN SEJAHTERA MENUJU KOTA MASA DEPAN Misi : - Mewujudkan Blitar Kota Pancasila yang Aman, Religius dan Nasionalis - Mewujudkan Kota Blitar Sehat dan Sejahtera - Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang berbasis <i>Smart Governance</i> - Mengembangkan Potensi Pendidikan, Pemuda dan Perempuan sebagai Generasi Emas yang Cerdas dan Berkarakter - Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan,	Terwujudnya kehidupan yang harmonis melalui penguatan nilai - nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik dan pembangunan daerah		Indeks Harmoni Indonesia (Indeks)		
				Indeks Demokrasi Indonesia (indeks)		
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
			Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (%)	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (%)	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (%)	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
Jasa, Pariwisata dan Industri	Terwujudnya jaminan rasa aman pada masyarakat	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (%)	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
				Indeks Rasa Aman(Angka)		
			Meningkatnya penyelesaian gangguan trantibum dan pelanggaran Perda	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (Angka)		
				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya kualitas pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (%)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
				Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran (%)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Terwujudnya Kota yang Berketahanan Bencana		Indeks Risiko Bencana (IRB) (Angka)		
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat pascabencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang sehat	Terwujudnya Kesehatan yang Merata		Usia Harapan Hidup (UHH)((tahun))		
				Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (Indeks)		
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))		
			Meningkatnya kinerja BLUD UPT Puskesmas	Skor penilaian kinerja BLUD UPT Puskesmas Sananwetan (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Skor penilaian kinerja BLUD UPT Puskesmas Kepanjenkidul (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Skor penilaian kinerja BLUD UPT Puskesmas Sukorejo (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya mutu layanan Rumah Sakit	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Akreditasi RSUD (Nilai Akreditasi)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup. (Orang)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase pemenuhan syarat kualitas kesehatan lingkungan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Insiden Stunting Balita (kasus baru) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik yang cukup (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase kelurahan yang mencapai target kekebalan kelompok (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi paripurna (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Jumlah Kematian Ibu AMPSR (Orang)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat melalui pelayanan kesehatan rujukan	Persentase layanan rumah sakit dengan kompetensi minimal dasar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Rasio Nakes dan Named terhadap populasi (Indeks (Skala 0-100))	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Persentase fasilitas layanan kefarmasian dan alat kesehatan dan yang memenuhi evaluasi mutu (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase UKBM sesuai standar (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat			Tingkat Kemiskinan(%)		
		Meningkatnya Kualitas Hidup dan Ketangguhan Sosial Masyarakat		Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)		
				Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)		
			Meningkatnya daya dukung potensi dan sumber kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
			Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
			Meningkatnya kecukupan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (%)	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase Izin Usaha budidaya perikanan yang Diterbitkan (%)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
				Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
			Meningkatnya kualitas produk hasil perikanan	Persentase Izin Usaha pengolahan hasil perikanan yang Diterbitkan (%)	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
				Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase produk RPH yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal) (%)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
				Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
				Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (%)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (%)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
				Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
			Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (%)	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	
				Persentase Izin Usaha Peternakan yang Diterbitkan (%)	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian dan pembinaan kelembagaan usaha tani	Persentase Kelembagaan yang Dibentuk dan Beroperasi Koperasi Tani (%)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
				Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (%)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
			Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase TMP Nasional yang terkelola dengan baik (%)	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
	Terwujudnya pembangunan kota nyaman dan layak huni			Indeks Kota Layak Huni (Indeks)		
				Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) Kumulatif (TON CO2 EQ)		
		Terwujudnya fasilitas perkotaan yang berkelanjutan		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) (Indeks)		
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum aman (%)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman (%)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (%)	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (%)	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
				Persentase bangunan gedung berizin (%)	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang aman dan nyaman	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
			Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (%)	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kesesuaian perwujudan rencana pola ruang (%)	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase terselesaikannya Kasus Tanah Garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi (%)	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	
			Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan (%)	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Persentase tanah kosong yang dikelola (%)	2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	
			Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase tanah aset yang bersertifikat (%)	2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	
			Meningkatnya kualitas sarpras perhubungan	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			Meningkatnya layanan angkutan jalan berkeselamatan	IKM Layanan Angkutan Jalan Berkeselamatan (Indeks)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			Meningkatnya ketertiban jalan	Persentase ruas jalan yang menerapkan manajemen rekayasa lalu lintas (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Meningkatnya kualitas permukiman	Meningkatnya pengelolaan perlintasan kereta api	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani (%)	2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	
				Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)		
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
				Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
				Persentase Rumah Layak Huni di kawasan kumuh (%)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
			Meningkatnya Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani di luar kawasan kumuh	Persentase Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh yang Tertangani (%)	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya penyediaan PSU perumahan dan permukiman	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) dalam Kondisi baik (%)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
				Persentase Tempat Pemakaman Umum yang dilengkapi PSU dalam kondisi baik (%)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
		Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)		
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (%)	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase badan air yang memenuhi baku mutu (%)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (%)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (%)	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
			Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (%)	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan (Usaha/Kegiatan)	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
			Meningkatnya kapasitas dan partisipasi SDM bidang lingkungan hidup	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang aktif (%)	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
				Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
			Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (%)	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
			Meningkatnya penyelesaian sengketa /kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (%)	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase cakupan layanan persampahan (%)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
	Meningkatnya Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel			Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)		
		Terwujudnya pelayanan pemerintahan yang berkualitas dan terintegrasi		Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)		
				Indeks Pelayanan Publik (Indeks)		
				Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)		
				Indeks Pemerintahan Digital Indonesia (Indeks)		
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)		
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
				Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase kepemilikan dokumen akte kelahiran seluruh penduduk (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Persentase kepemilikan dokumen perceraian (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase kepemilikan dokumen perkawinan (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (%)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
			Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (%)	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata kelola kelurahan	Persentase fasilitasi tata kelola kelurahan (%)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kelurahan (LKK) (%)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
			Meningkatnya Jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
			Meningkatnya Kualitas Penerapan Digitalisasi Pemerintahan	Persentase pemenuhan layanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis digital (%)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan (%)	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang hasil penilaiain implementasi persandian untuk pengaman informasi masuk kategori baik (%)	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
			Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (%)	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	
				Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara kepentingan pemerintahan, untuk negara, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (%)	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase perangkat daerah yang memiliki IKM dengan kategori minimal Baik (%)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase unit pelayanan publik dengan kategori pelayanan Baik (%)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya kualitas kerja sama daerah	Efektivitas Kerja Sama Daerah (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase produk hukum yang ditindaklanjuti (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya penyelesaian perkara hukum	Persentase masalah hukum yang terselesaikan (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ (Level)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase penyampaian rekomendasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan (%)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
				Persentase penyampaian rekomendasi penganggaran (%)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
			Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (%)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			peraturan perundang-undangan	Persentase Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (%)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
			Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Penurunan SILPA (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
			Meningkatnya Tata Kelola Pendapatan Daerah	Persentase Target Pajak Daerah terhadap PAD (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap PAD (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				Persentase Realisasi Retribusi Daerah terhadap Target Retribusi Daerah (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Menurunnya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (%)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				Indeks Manajemen Risiko (IMR) (Indeks)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
			Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Persentase kelurahan yang masyarakatnya aktif menjaga trantibum secara swadaya (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya keberdayaan dan	Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif (Kelompok)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang mendukung pencapaian SPM (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
		Terwujudnya manajemen pemerintahan yang profesional		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Angka)		
				Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Indeks)		
			Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP minimal A (%)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian kinerja program daerah (%)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (%)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (%)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase program prioritas nasional yang didukung program daerah (%)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan, serta bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
				Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
				Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, pengembangan dan evaluasi serta layanan pengembangan kompetensi	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (%)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
				Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (%)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
				Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (%)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
				Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional (%)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah (Rasio)	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
				Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (%)	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia			Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)		
		Meningkatnya kualitas pendidikan		Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)		
				Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase warga negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				dalam pendidikan dasar (APS) (%)		
				Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Persentase warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (APS) (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (%)	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
				Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (%)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
			Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (%)	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat (%)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
		Meningkatnya kualitas generasi muda		Indeks Pembangunan Pemuda (Nilai)		
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasional kemasyarakatan (%)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Rasio Wirausaha Pemuda (%)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase atlet yang masuk Pelatda Provinsi (%)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
			Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (%)	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
		Meningkatnya kesetaraan gender		Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)		
			Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
				Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (%)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
				Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (%)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 perempuan (Rasio)	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan	Jumlah Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Gender dan Hak sesuai Standar (Unit)		
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara konprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
				Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak (Rasio)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
			Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang aktif Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (%)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Terwujudnya kota yang berkebudayaan maju		Indeks Pelestarian Budaya (Indeks)		
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (%)	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (%)	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
	Terwujudnya Ekonomi Daerah yang Inklusif			Laju Pertumbuhan Ekonomi(%)		
				Rasio Gini(Indeks)		
				Tingkat Inflasi((%))		
				PDRB Per Kapita(Juta Rupiah)		
		Meningkatnya kontribusi sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)		
				Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)		
				Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)		
			Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (%)	2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (%)	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (%)	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (%)	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
			Meningkatnya produktivitas koperasi	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (%)	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (%)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
				Pertumbuhan Wirausaha (%)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor (%)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (%)	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (%)	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
			Meningkatnya kualitas ekosistem ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (%)	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi yang Dibentuk dan Beroperasi (%)	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
			Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	persentase usaha perdagangan yg berizin (%)	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (%)	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Indeks kepuasan konsumen terhadap layanan perlindungan konsumen (Indeks (Skala 0-100))	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
				Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Jumlah kerjasama penggunaan produk lokal daerah (Kerja Sama)	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (%)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
			Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (%)	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Persentase industri yg terdaftar di SIIINAS (%)	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
		Terwujudnya kemudahan berusaha yang mendorong realisasi investasi daerah		Persentase peningkatan investasi		
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (%)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (%)	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (%)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (%)	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (%)	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (%)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian (%)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
		Menurunnya pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
			Terpenuhinya tenaga kerja sesuai standar kompetensi perusahaan	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (%)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
			Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar 2025, data diolah

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menjelaskan mengenai indikasi keseluruhan program Pemerintah Kota Blitar yang mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dan yang memenuhi layanan Perangkat Daerah (PD) dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Selain itu, bab ini juga memuat target program dan pagu indikatif. Pagu indikatif merupakan proyeksi kebutuhan pendanaan dalam bentuk jumlah dana yang tersedia untuk menyusun program tahunan. Jumlah dana yang tersedia mengacu pada Bab II RPJMD terutama berkaitan dengan kerangka pendanaan yang terdiri dari kapasitas riil keuangan dan belanja daerah.

4.1. Program Perangkat Daerah

Ketercapaian target kinerja program tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Blitar, melainkan juga dari APBN, dari APBD Provinsi, maupun sumber pendanaan lainnya. Namun demikian, kerangka pendanaan pembangunan daerah pada bagian ini hanya mencantumkan sumber pendanaan dari APBD Kota Blitar. Kerangka pendanaan menjadi acuan dalam menyusun kebutuhan pendanaan masing-masing program atau pagu indikatifnya. Program-program yang telah disusun pagu indikatifnya menjadi acuan bagi PD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD. Target dan rencana dalam Tabel 4.1 dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan RKPD Kota Blitar Tahun 2030.

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah
Pemerintah Kota Blitar

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					201.841.996.454,0 0		205.605.433.086,0 0		208.841.448.722,0 0		205.954.446.615,0 0		211.994.061.284,0 0	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					139.945.193.576,0 0		143.099.774.297,0 0		143.450.243.326,0 0		143.099.774.297,0 0		145.871.683.625,0 0	
Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	83,75	100	100	139.945.193.576,0 0	87,8	143.099.774.297,0 0	87,9	143.450.243.326,0 0	88	143.099.774.297,0 0	88,10	145.871.683.625,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					54.489.794.578,00		54.728.300.074,00		57.224.978.745,00		55.077.313.603,00		57.956.151.008,00	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (APS) (%)	83,75	86,54	89,33	54.489.794.578,00	92,13	54.728.300.074,00	94,67	57.224.978.745,00	97,22	55.077.313.603,00	99,77	57.956.151.008,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase warga negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%)	99,96	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) (%)	41,06	43,87	46,67		49,48		52,29		55,09		57,9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					832.919.500,00		927.065.475,00		973.418.749,00		927.065.475,00		973.418.749,00	
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (%)	100	100	100	832.919.500,00	100	927.065.475,00	100	973.418.749,00	100	927.065.475,00	100	973.418.749,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					6.557.624.300,00		6.833.005.515,00		7.174.655.791,00		6.833.005.515,00		7.174.655.791,00	
Meningkatnya mutu dan distribusi	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	18,29	18,29	18,3	6.557.624.300,00	18,32	6.833.005.515,00	18,34	7.174.655.791,00	18,36	6.833.005.515,00	18,38	7.174.655.791,00	Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
pendidik dan tenaga pendidikan														Bidang Pendidikan
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (%)	51,00	53,00	54,00		55,00		56,00		57,00		57,09		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					16.464.500,00		17.287.725,00		18.152.111,00		17.287.725,00		18.152.111,00	
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (%)	100	100	100	16.464.500,00	100	17.287.725,00	100	18.152.111,00	100	17.287.725,00	100	18.152.111,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					243.076.316.242,00		230.277.325.341,00		239.019.970.702,00		280.680.980.333,00		289.666.155.426,00	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					180.613.549.802,00		172.283.974.736,00		175.255.779.511,00		172.988.132.955,00		177.896.946.522,00	
Meningkatnya kinerja BLUD UPT Puskesmas					9.300.000.000,00		9.534.060.000,00		9.772.411.000,00		10.016.721.000,00		10.267.139.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Skor penilaian kinerja BLUD UPT Puskesmas Kepanjenkidul (Nilai)	-	-	70,00		72,00		74,00		76,00		78,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Skor penilaian kinerja BLUD UPT Puskesmas Sukorejo (Nilai)	-	-	70,00		72,00		74,00		76,00		78,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Skor penilaian kinerja BLUD UPT Puskesmas Sananwetan (Nilai)	-	-	70,00		72,00		74,00		76,00		78,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya mutu layanan Rumah Sakit	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit (%)	87,00	88,00	89,00	95.000.000.000,00	90,00	86.294.454.509,00	91,00	87.696.978.788,00	92,00	86.445.720.758,00	93,00	89.063.355.271,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Akreditasi RSUD (Nilai Akreditasi)	Paripurna	Paripurna	Paripurna		Paripurna		Paripurna		Paripurna		Paripurna		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	100	100	100	76.313.549.802,00	100	76.455.460.227,00	100	77.786.389.723,00	100	76.525.691.197,00	100	78.566.452.251,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMEMUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					58.346.902.940,00		53.997.487.105,00		59.655.158.191,00		103.966.359.378,0 0		108.263.303.904,0 0	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat melalui pelayanan kesehatan rujukan	Persentase layanan rumah sakit dengan kompetensi minimal dasar (%)	66,67	66,67	70,83	10.000.000.000,00	75,00	952.529.517,00	79,17	5.968.010.764,00	83,33	50.954.199.213,00	87,50	52.983.093.007,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	-	-	93,82	48.346.902.940,00	93,84	53.044.957.588,00	93,86	53.687.147.427,00	93,88	53.012.160.165,00	94	55.280.210.897,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (%)	-	-	71,90		72,40		72,90		73,40		73,90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase kelurahan yang mencapai target kekebalan kelompok (%)	-	-	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	-	-	0,70		0,68		0,66		0,64		0,62		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (%)	-	-	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pemenuhan syarat kualitas kesehatan lingkungan (%)	-	-	70,00		75,00		80,00		85,00		90,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik yang cukup (%)	-	-	30,00		40,00		50,00		60,00		65,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi paripurna (%)	69,23	70,00	78,57		90,50		97,60		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup. (Orang)	-	-	4,35		4,35		4,35		3,91		3,91		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kematian Ibu AMPSR (Orang)	-	-	3,00		3,00		3,00		2,00		2,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Insiden Stunting Balita (kasus baru) (%)	-	-	2,30		1,70		1,30		1,00		1,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					806.927.700,00		686.927.700,00		689.596.000,00		654.288.000,00		633.929.000,00	
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Rasio Nakes dan Named terhadap populasi (Indeks (Skala 0-100))	-	8,21	8,21	806.927.700,00	8,22	686.927.700,00	8,22	689.596.000,00	8,22	654.288.000,00	8,22	633.929.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					432.611.000,00		432.611.000,00		437.271.000,00		410.997.000,00		395.846.000,00	
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase fasilitas layanan kefarmasian dan alat kesehatan yang memenuhi evaluasi mutu (%)	50,00	-	52,00	432.611.000,00	55,00	432.611.000,00	58,00	437.271.000,00	60,00	410.997.000,00	65,00	395.846.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	85,97	-	86,30		86,70		87,00		87,30		87,70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					2.876.324.800,00		2.876.324.800,00		2.982.166.000,00		2.661.203.000,00		2.476.130.000,00	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase UKBM sesuai standar (%)	100	100	100	2.876.324.800,00	100	2.876.324.800,00	100	2.982.166.000,00	100	2.661.203.000,00	96,00	2.476.130.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					61.898.502.470,00		33.660.733.065,00		48.602.208.327,00		37.999.148.110,00		39.442.160.437,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.821.602.529,00		8.750.004.755,00		8.932.670.755,00		9.046.272.195,00		9.167.022.337,00	
Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	100	100	100	8.821.602.529,00	100	8.750.004.755,00	100	8.932.670.755,00	100	9.046.272.195,00	100	9.167.022.337,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					6.744.151.200,00		8.103.219.814,00		10.372.223.555,00		11.600.000.000,00		8.972.534.725,00	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (%)	63,56	63,56	64,00	6.744.151.200,00	64,50	8.103.219.814,00	65,00	10.372.223.555,00	65,50	11.600.000.000,00	66,00	8.972.534.725,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (%)	97,84	97,84	98,03		98,23		98,43		98,62		98,82		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					1.845.400.700,00		2.171.068.271,00		2.035.000.000,00		2.478.016.350,00		2.713.078.147,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum aman (%)	14,10	14,20	14,30	1.845.400.700,00	14,50	2.171.068.271,00	14,70	2.035.000.000,00	15,00	2.478.016.350,00	15,30	2.713.078.147,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					2.756.690.598,00		2.189.879.954,00		2.467.528.729,00		1.662.425.028,00		1.798.977.530,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman (%)	8,45	18,66	23,51	2.756.690.598,00	28,35	2.189.879.954,00	33,20	2.467.528.729,00	38,04	1.662.425.028,00	42,89	1.798.977.530,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					6.187.928.820,00		2.618.300.181,00		5.680.000.000,00		3.148.505.209,00		2.307.733.269,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (%)	88,08	88,08	89,00	6.187.928.820,00	90,08	2.618.300.181,00	91,00	5.680.000.000,00	92,00	3.148.505.209,00	92,08	2.307.733.269,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					23.482.832.316,00		1.190.795.909,00		10.960.000.000,00		1.062.979.717,00		1.117.357.446,00	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (%)	78,19	78,19	81,91	23.482.832.316,00	83,77	1.190.795.909,00	85,63	10.960.000.000,00	87,49	1.062.979.717,00	89,35	1.117.357.446,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase bangunan gedung berizin (%)	-	15,74	15,93		16,14		16,37		16,63		16,91		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					9.410.064.515,00		5.744.204.090,00		5.850.000.000,00		6.867.220.785,00		10.665.000.000,00	
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang aman dan nyaman	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	92,35	92,35	93,35	9.410.064.515,00	94,35	5.744.204.090,00	95,35	5.850.000.000,00	96,35	6.867.220.785,00	97,35	10.665.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					1.592.456.392,00		1.768.000.000,00		1.165.000.000,00		1.117.411.639,00		1.603.140.395,00	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (%)	100	100	100	1.592.456.392,00	100	1.768.000.000,00	100	1.165.000.000,00	100	1.117.411.639,00	100	1.603.140.395,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					1.057.375.400,00		1.125.260.091,00		1.139.785.288,00		1.016.317.187,00		1.097.316.588,00	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kesesuaian perwujudan rencana pola ruang (%)	94,69	94,80	94,90	1.057.375.400,00	95,00	1.125.260.091,00	95,10	1.139.785.288,00	95,20	1.016.317.187,00	95,30	1.097.316.588,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					15.072.743.794,00		43.412.324.415,00		39.187.822.440,00		30.399.333.309,00		18.597.228.420,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.277.413.402,00		5.926.643.510,00		5.821.595.030,00		5.991.634.508,00		6.366.070.040,00	
Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	100	100	100	5.277.413.402,00	100	5.926.643.510,00	100	5.821.595.030,00	100	5.991.634.508,00	100	6.366.070.040,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					1.101.569.500,00		2.618.001.862,00		23.890.394.786,00		2.947.703.009,00		1.512.197.017,00	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni (%)	100	100	100	1.101.569.500,00	100	2.618.001.862,00	100	23.890.394.786,00	100	2.947.703.009,00	100	1.512.197.017,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					1.281.200.000,00		1.506.824.000,00		1.336.960.480,00		1.363.699.690,00		1.590.973.683,00	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	33,52	37,07	40,63	1.281.200.000,00	43,48	1.506.824.000,00	47,03	1.336.960.480,00	50,59	1.363.699.690,00	54,15	1.590.973.683,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase Rumah Layak Huni di kawasan kumuh (%)	97,73	97,77	98,37		98,58		98,83		99,12		99,43		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					6.343.310.850,00		31.680.400.000,00		6.594.008.000,00		18.520.534.676,00		7.520.711.025,00	
Meningkatnya Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani di luar kawasan kumuh	Persentase Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh yang Tertangani (%)	-	4,22	8,52	6.343.310.850,00	9,64	31.680.400.000,00	11,49	6.594.008.000,00	11,78	18.520.534.676,00	16,24	7.520.711.025,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					1.069.250.042,00		1.680.455.043,00		1.544.864.144,00		1.575.761.426,00		1.607.276.655,00	
Meningkatnya penyediaan PSU perumahan dan permukiman	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) dalam Kondisi baik (%)	73,68	76,32	76,92	1.069.250.042,00	80,48	1.680.455.043,00	83,33	1.544.864.144,00	86,05	1.575.761.426,00	88,37	1.607.276.655,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase Tempat Pemakaman Umum yang dilengkapi PSU dalam kondisi baik (%)	-	16,67	8,33		8,33		8,33		8,33		8,33		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					17.026.897.440,00		17.462.238.795,00		17.503.920.611,00		17.254.175.163,00		18.022.543.702,00	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.436.483.453,00		12.260.784.948,00		11.689.465.835,00		11.052.069.860,00		11.444.969.540,00	
Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	-	100	100	7.943.817.847,00	100	7.217.798.970,00	100	7.244.982.145,00	100	7.149.182.540,00	100	7.450.708.461,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	100	100	100	3.492.665.606,00	100	5.042.985.978,00	100	4.444.483.690,00	100	3.902.887.320,00	100	3.994.261.079,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					4.331.337.245,00		3.692.305.041,00		3.755.902.404,00		3.692.003.737,00		3.806.046.141,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penyelesaian gangguan trantibum dan pelanggaran Perda	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	59,09	63,64	68,18	4.331.337.245,00	72,73	3.692.305.041,00	77,27	3.755.902.404,00	77,27	3.692.003.737,00	81,82	3.806.046.141,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (%)	79,07	80,97	82,88		86,68		90,49		94,29		98,1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					933.660.000,00		1.292.619.217,00		1.866.656.872,00		2.318.206.066,00		2.544.632.521,00	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (%)	80,00	80,00	80,00	552.438.100,00	85,00	643.238.917,00	90,00	1.081.002.600,00	95,00	1.474.730.000,00	100	1.572.348.455,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pascabencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (%)	-	-	100	175.874.900,00	100	297.359.612,00	100	262.879.100,00	100	355.128.100,00	100	315.347.300,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana (%)	-	100	100	205.347.000,00	100	352.020.688,00	100	522.775.172,00	100	488.347.966,00	100	656.936.766,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN					325.416.742,00		216.529.589,00		191.895.500,00		191.895.500,00		226.895.500,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENYELAMATAN NON KEBAKARAN														
Meningkatnya kualitas pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran (%)	100	100	100	325.416.742,00	100	216.529.589,00	100	191.895.500,00	100	191.895.500,00	100	226.895.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					21.555.215.890,00		18.206.717.730,00		21.205.903.301,00		20.903.338.068,00		18.790.910.479,00	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.737.256.149,00		4.835.416.170,00		5.331.163.136,00		5.119.802.965,00		5.085.989.590,00	
Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	100	100	100	4.737.256.149,00	100	4.835.416.170,00	100	5.331.163.136,00	100	5.119.802.965,00	100	5.085.989.590,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					666.331.589,00		628.531.589,00		646.728.024,00		645.098.555,00		648.507.407,00	
Meningkatnya daya dukung potensi dan sumber kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar (%)	100	100	100	666.331.589,00	100	628.531.589,00	100	646.728.024,00	100	645.098.555,00	100	648.507.407,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					888.070.200,00		818.897.200,00		888.071.000,00		888.071.000,00		851.897.200,00	
Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (%)	100	100	100	888.070.200,00	100	818.897.200,00	100	888.071.000,00	100	888.071.000,00	100	851.897.200,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (%)	-	4,88	14,63		14,63		14,63		14,63		14,63		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					15.022.942.082,00		11.665.360.501,00		14.076.428.871,00		13.986.853.278,00		11.946.004.012,00	
Meningkatnya kecukupan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (%)	13,25	14,50	30,00	15.022.942.082,00	32,50	11.665.360.501,00	35,00	14.076.428.871,00	37,50	13.986.853.278,00	40,00	11.946.004.012,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (%)	0,12	0,14	0,65		1,31		1,96		2,62		3,27		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					205.615.870,00		223.512.270,00		228.512.270,00		228.512.270,00		223.512.270,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	205.615.870,00	100	223.512.270,00	100	228.512.270,00	100	228.512.270,00	100	223.512.270,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase TMP Nasional yang terkelola dengan baik (%)	100	100	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					2.765.372.320,00		3.094.244.592,00		2.979.567.552,00		2.858.054.275,00		3.083.980.120,00	
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					2.438.207.320,00		2.173.349.592,00		2.208.672.552,00		2.177.159.275,00		2.243.085.120,00	
Terpenuhinya tenaga kerja sesuai standar kompetensi perusahaan	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	9,85	9,90	9,95	2.438.207.320,00	10,01	2.173.349.592,00	10,05	2.208.672.552,00	10,11	2.177.159.275,00	10,15	2.243.085.120,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					211.270.000,00		675.000.000,00		595.000.000,00		495.000.000,00		575.000.000,00	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (%)	51,45	51,50	51,55	211.270.000,00	51,6	675.000.000,00	51,65	595.000.000,00	51,70	495.000.000,00	51,75	575.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					115.895.000,00		245.895.000,00		175.895.000,00		185.895.000,00		265.895.000,00	
Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	1015	1015	1028	115.895.000,00	1043	245.895.000,00	1045	175.895.000,00	1059	185.895.000,00	1069	265.895.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					5.784.131.214,00		6.312.473.048,00		7.133.386.495,00		7.031.789.843,00		6.524.906.699,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.543.701.864,00		4.958.792.498,00		5.625.657.099,00		5.545.922.523,00		5.146.764.760,00	
Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	100	100	100	4.543.701.864,00	100	4.958.792.498,00	100	5.625.657.099,00	100	5.545.922.523,00	100	5.146.764.760,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					744.526.350,00		812.501.606,00		904.964.288,00		891.842.306,00		827.183.739,00	
Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	59,23	59,72	60,21	744.526.350,00	60,69	812.501.606,00	61,18	904.964.288,00	61,67	891.842.306,00	62,16	827.183.739,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (%)	0	19,00	21,00		24,00		27,00		31,00		35,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (%)	33,8	33,8	33,81		33,82		33,83		33,84		33,85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					125.132.500,00		136.557.097,00		152.097.295,00		149.891.884,00		139.024.723,00	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 perempuan (Rasio)	14,66	14,64	14,62	125.132.500,00	14,60	136.557.097,00	14,58	152.097.295,00	14,56	149.891.884,00	14,54	139.024.723,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					80.800.000,00		88.177.040,00		98.211.587,00		96.787.519,00		89.770.424,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta peerlindungan perempuan dan anak	Jumlah Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak sesuai Standar (Unit)	1	1	3	80.800.000,00	3	88.177.040,00	3	98.211.587,00	3	96.787.519,00	3	89.770.424,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					125.240.000,00		136.674.412,00		152.227.960,00		150.020.655,00		139.144.157,00	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara konprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	67,61	67,61	68,96	125.240.000,00	70,34	136.674.412,00	71,75	152.227.960,00	73,18	150.020.655,00	74,65	139.144.157,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					164.730.500,00		179.770.395,00		200.228.266,00		197.324.956,00		183.018.896,00	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	83,74	83,74	85,41	164.730.500,00	87,12	179.770.395,00	88,87	200.228.266,00	90,64	197.324.956,00	92,42	183.018.896,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak (Rasio)	6,46	6,46	6,23		6,01		5,79		5,57		5,34		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					578.555.400,00		516.000.000,00		557.000.000,00		557.000.000,00		567.700.000,00	
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					403.882.300,00		381.000.000,00		382.000.000,00		382.000.000,00		392.700.000,00	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masvarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	88,87	88,90	89,13	403.882.300,00	89,26	381.000.000,00	89,39	382.000.000,00	89,52	382.000.000,00	89,74	392.700.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					154.999.600,00		115.000.000,00		155.000.000,00		155.000.000,00		155.000.000,00	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	-	1	1	154.999.600,00	1	115.000.000,00	0,90	155.000.000,00	0,90	155.000.000,00	0,80	155.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					19.673.500,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (%)	100	100	100	19.673.500,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					569.680.000,00		830.816.818,00		849.000.322,00		1.031.851.521,00		995.674.759,00	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					26.400.000,00		26.400.000,00		45.000.000,00		170.000.000,00		120.000.000,00	
Meningkatnya penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (%)	100	100	100	26.400.000,00	100	26.400.000,00	100	45.000.000,00	100	170.000.000,00	100	120.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					5.250.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00	
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (%)	100	100	0	5.250.000,00	100	110.000.000,00	100	120.000.000,00	100	130.000.000,00	100	140.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG					158.000.000,00		244.416.818,00		184.000.322,00		281.851.521,00		170.000.000,00	
Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola (%)	5	5	5	158.000.000,00	10	244.416.818,00	15	184.000.322,00	20	281.851.521,00	25	170.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					380.030.000,00		450.000.000,00		500.000.000,00		450.000.000,00		565.674.759,00	
Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase tanah aset yang bersertifikat (%)	85,00	88,00	90,00	380.030.000,00	92,00	450.000.000,00	94,00	500.000.000,00	96,00	450.000.000,00	98,00	565.674.759,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					34.989.751.323,00		35.157.722.204,00		17.879.122.526,00		17.624.023.708,00		18.740.342.850,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.632.720.991,00		6.664.561.857,00		6.032.713.822,00		6.032.713.822,00		6.032.713.822,00	
Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	100	100	100	6.632.720.991,00	100	6.664.561.857,00	100	6.032.713.822,00	100	6.032.713.822,00	100	6.032.713.822,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					5.500.000,00		5.526.403,00		5.500.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (%)	50,00	52,00	55,00	5.500.000,00	58,00	5.526.403,00	60,00	5.500.000,00	62,00	5.500.000,00	65,00	5.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					228.599.900,00		229.697.311,00		208.549.900,00		208.549.900,00		208.549.900,00	
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase badan air yang memenuhi baku mutu (%)	-	66,70	66,70	228.599.900,00	77,80	229.697.311,00	77,80	208.549.900,00	77,80	208.549.900,00	77,80	208.549.900,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					7.270.631.300,00		7.305.534.502,00		1.200.631.300,00		1.200.631.300,00		1.200.631.300,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (%)	16,26	16,26	16,26	7.270.631.300,00	16,26	7.305.534.502,00	16,26	1.200.631.300,00	16,26	1.200.631.300,00	16,26	1.200.631.300,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					2.970.000,00		2.984.257,00		2.970.000,00		2.970.000,00		2.970.000,00	
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (%)	75,01	75,01	76,47	2.970.000,00	76,47	2.984.257,00	77,94	2.970.000,00	77,94	2.970.000,00	79,41	2.970.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
dan Beracun (Limbah B3)														
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					5.250.000,00		5.275.203,00		5.250.000,00		5.250.000,00		5.250.000,00	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan (Usaha/Kegiatan)	65,00	66,00	67,00	5.250.000,00	68,00	5.275.203,00	69,00	5.250.000,00	70,00	5.250.000,00	71,00	5.250.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					165.003.200,00		165.795.310,00		135.003.200,00		135.003.200,00		135.003.200,00	
Meningkatnya kapasitas dan partisipasi SDM bidang lingkungan hidup	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang aktif (%)	75,00	75,00	75,00	165.003.200,00	75,00	165.795.310,00	75,00	135.003.200,00	100	135.003.200,00	100	135.003.200,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					186.117.500,00		187.010.971,00		156.117.500,00		156.117.500,00		156.117.500,00	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (%)	100	100	100	186.117.500,00	100	187.010.971,00	100	156.117.500,00	100	156.117.500,00	100	156.117.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					1.500.000,00		1.507.201,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	
Meningkatnya penyelesaian sengketa /kasus	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana	100	100	100	1.500.000,00	100	1.507.201,00	100	1.500.000,00	100	1.500.000,00	100	1.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
tindak pidana lingkungan hidup	Lingkungan Hidup (%)													Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					20.491.458.432,00		20.589.829.189,00		10.130.886.804,00		9.875.787.986,00		10.992.107.128,00	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase cakupan layanan persampahan (%)	98,01	98,06	98,14	20.491.458.432,00	98,24	20.589.829.189,00	98,32	10.130.886.804,00	98,42	9.875.787.986,00	98,52	10.992.107.128,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					6.572.115.710,00		6.517.232.472,00		7.147.909.136,00		7.045.922.969,00		6.726.348.690,00	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.734.135.931,00		5.692.841.993,00		6.262.779.816,00		6.002.472.969,00		5.844.898.690,00	
Meningkatnya fasilitas layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	Persentase fasilitas layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	100	100	100	5.734.135.931,00	100	5.692.841.993,00	100	6.262.779.816,00	100	6.002.472.969,00	100	5.844.898.690,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					328.469.579,00		315.789.279,00		342.169.200,00		377.750.000,00		305.750.000,00	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	18,60	30,00	30,00	328.469.579,00	30,00	315.789.279,00	30,00	342.169.200,00	30,00	377.750.000,00	30,00	305.750.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (%)	99,11	99,17	99,24		99,30		99,37		99,43		99,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					200.216.000,00		198.355.000,00		210.500.000,00		264.700.000,00		209.700.000,00	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan dokumen akte kelahiran seluruh penduduk (%)	67,11	68,14	69,17	200.216.000,00	70,19	198.355.000,00	71,22	210.500.000,00	72,25	264.700.000,00	73,27	209.700.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Dan Pencatatan Sipil
	Persentase kepemilikan dokumen perkawinan (%)	92,78	93,27	93,76		94,24		94,73		95,22		95,71		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan (%)	99,63	99,81	99,85		99,89		99,93		99,97		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase kepemilikan dokumen perceraian (%)	81,44	85,78	88,63		90,45		92,33		94,13		95,88		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					293.942.200,00		294.246.200,00		305.500.000,00		368.000.000,00		336.000.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (%)	69	64,52	74,19	293.942.200,00	80,65	294.246.200,00	87,1	305.500.000,00	93,55	368.000.000,00	100	336.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					15.352.000,00		16.000.000,00		26.960.120,00		33.000.000,00		30.000.000,00	
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudkan (%)	100	100	100	15.352.000,00	100	16.000.000,00	100	26.960.120,00	100	33.000.000,00	100	30.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					605.819.750,00		613.089.587,00		629.949.551,00		614.301.227,00		639.524.784,00	
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					98.876.500,00		100.063.018,00		102.814.751,00		100.260.771,00		104.377.535,00	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata kelola kelurahan					98.876.500,00		100.063.018,00		102.814.751,00		100.260.771,00		104.377.535,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase fasilitasi tata kelola kelurahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					506.943.250,00		513.026.569,00		527.134.800,00		514.040.456,00		535.147.249,00	
Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan					506.943.250,00		513.026.569,00		527.134.800,00		514.040.456,00		535.147.249,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kelurahan (LKK) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN					646.406.400,00		705.423.305,00		785.700.477,00		774.307.819,00		718.170.503,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KELUARGA BERENCANA														
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					71.089.400,00		77.579.862,00		86.408.451,00		85.155.528,00		78.981.752,00	
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15- 19 tahun)	17,3	17,2	17,1	71.089.400,00	16,75	77.579.862,00	16,30	86.408.451,00	15,80	85.155.528,00	15,10	78.981.752,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					270.695.000,00		295.409.454,00		329.027.049,00		324.256.157,00		300.747.586,00	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	8,11	8,10	8,09	270.695.000,00	8,07	295.409.454,00	8,05	329.027.049,00	8,00	324.256.157,00	7,95	300.747.586,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (%)	15,9	15,4	15,00		13,10		12,80		11,50		10,80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					304.622.000,00		332.433.989,00		370.264.977,00		364.896.134,00		338.441.165,00	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang aktif Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (%)	52,08	52,08	55,01	304.622.000,00	58	332.433.989,00	60,25	370.264.977,00	65,00	364.896.134,00	68,90	338.441.165,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					16.854.685.296,00		17.333.069.254,00		17.058.451.921,00		16.815.062.408,00		17.889.229.542,00	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.968.190.748,00		7.442.091.835,00		7.256.485.277,00		7.464.064.063,00		7.567.005.416,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	100	100	100	6.968.190.748,00	100	7.442.091.835,00	100	7.256.485.277,00	100	7.464.064.063,00	100	7.567.005.416,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					9.808.494.548,00		9.812.977.419,00		9.723.966.644,00		9.272.998.345,00		10.244.224.126,00	
Meningkatnya kualitas sarpras perhubungan	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (%)	88,31	88,31	88,38	4.595.730.448,00	88,42	4.435.977.419,00	88,50	4.318.966.644,00	89,10	4.563.998.345,00	89,40	4.862.524.126,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
Meningkatnya ketertiban jalan	Persentase Ruas Jalan yang Menerapkan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (%)	20,00	30,00	40,00	3.499.724.200,00	50,00	3.631.000.000,00	60,00	3.594.000.000,00	70,00	3.164.000.000,00	80,00	3.524.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
Meningkatnya layanan angkutan jalan berkeselamatan	IKM Layanan Angkutan Jalan Berkeselamatan (Indeks)	92,20	90,20	92,25	1.713.039.900,00	92,50	1.746.000.000,00	92,75	1.811.000.000,00	93,00	1.545.000.000,00	93,25	1.857.700.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN					78.000.000,00		78.000.000,00		78.000.000,00		78.000.000,00		78.000.000,00	
Meningkatnya pengelolaan perlintasan kereta api	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani (%)	100	100	100	78.000.000,00	100	78.000.000,00	100	78.000.000,00	100	78.000.000,00	100	78.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					12.811.268.474,00		12.756.502.733,00		11.994.654.851,00		11.821.180.473,00		13.130.270.329,00	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.776.268.474,00		5.776.268.733,00		5.776.268.851,00		5.770.000.473,00		5.901.036.329,00	
Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	0	0	100	5.776.268.474,00	100	5.776.268.733,00	100	5.776.268.851,00	100	5.770.000.473,00	100	5.901.036.329,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					2.450.000.000,00		2.430.234.000,00		2.218.386.000,00		2.051.180.000,00		2.579.234.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	0	85,00	86,00	2.450.000.000,00	87,00	2.430.234.000,00	88,00	2.218.386.000,00	89,00	2.051.180.000,00	90,00	2.579.234.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					4.585.000.000,00		4.550.000.000,00		4.000.000.000,00		4.000.000.000,00		4.650.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Penerapan Digitalisasi Pemerintahan	Persentase pemenuhan layanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis digital (%)	92,25	0	87,32	4.585.000.000,00	88,41	4.550.000.000,00	89,49	4.000.000.000,00	90,57	4.000.000.000,00	92,45	4.650.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					7.843.824.060,00		8.982.327.310,00		8.766.653.980,00		8.720.572.498,00		9.380.088.631,00	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.906.599.160,00		5.186.327.310,00		5.181.653.980,00		5.183.572.498,00		5.185.088.631,00	
Meningkatnya fasilitas layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitas layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	84,00	84,50	85,00	4.906.599.160,00	86	5.186.327.310,00	87	5.181.653.980,00	88	5.183.572.498,00	89	5.185.088.631,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					123.387.800,00		145.000.000,00		130.000.000,00		137.000.000,00		145.000.000,00	
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (%)	0,50	0,50	0,51	123.387.800,00	0,52	145.000.000,00	0,53	130.000.000,00	0,54	137.000.000,00	0,55	145.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					90.331.600,00		56.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (%)	3,53	3,53	5,80	90.331.600,00	5,80	56.000.000,00	5,80	55.000.000,00	5,80	60.000.000,00	5,80	65.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					121.501.900,00		135.000.000,00		130.000.000,00		135.000.000,00		140.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (%)	21,20	21,50	21,90	121.501.900,00	22,60	135.000.000,00	23,20	130.000.000,00	24,00	135.000.000,00	24,7	140.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					267.256.100,00		295.000.000,00		375.000.000,00		385.000.000,00		475.000.000,00	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (%)	21,20	21,20	21,20	267.256.100,00	21,20	295.000.000,00	21,20	375.000.000,00	21,20	385.000.000,00	21,20	475.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					522.407.600,00		565.000.000,00		545.000.000,00		555.000.000,00		760.000.000,00	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase peningkatan volume usaha koperasi (%)	20,16	20,30	20,50	522.407.600,00	20,90	565.000.000,00	21,30	545.000.000,00	21,70	555.000.000,00	22,10	760.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					1.388.839.900,00		1.650.000.000,00		1.475.000.000,00		1.595.000.000,00		1.615.000.000,00	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (%)	9,28	9,93	10,39	1.388.839.900,00	10,85	1.650.000.000,00	11,31	1.475.000.000,00	11,77	1.595.000.000,00	12,23	1.615.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Pertumbuhan Wirausaha (%)	4,20	4,21	4,79		6,86		8,56		9,86		10,77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					423.500.000,00		950.000.000,00		875.000.000,00		670.000.000,00		995.000.000,00	
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (%)	0,001	0,005	0,005	423.500.000,00	0,010	950.000.000,00	0,016	875.000.000,00	0,020	670.000.000,00	0,026	995.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					6.127.484.522,00		6.892.580.221,00		6.689.946.664,00		6.598.775.085,00		7.104.114.097,00	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					5.053.534.022,00		5.517.580.221,00		5.368.446.664,00		5.313.775.085,00		5.639.114.097,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	100	100	100	5.053.534.022,00	100	5.517.580.221,00	100	5.368.446.664,00	100	5.313.775.085,00	100	5.639.114.097,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					59.914.400,00		120.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		130.000.000,00	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (%)	-	100	100	59.914.400,00	100	120.000.000,00	100	70.000.000,00	100	70.000.000,00	100	130.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					505.658.200,00		535.000.000,00		535.000.000,00		545.000.000,00		555.000.000,00	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (%)	0,60	0,60	0,60	505.658.200,00	0,80	535.000.000,00	1,10	535.000.000,00	1,20	545.000.000,00	1,30	555.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					378.377.900,00		420.000.000,00		420.000.000,00		430.000.000,00		450.000.000,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (%)	100	100	100	378.377.900,00	100	420.000.000,00	100	420.000.000,00	100	430.000.000,00	100	450.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	87,50	88,00	88,25		88,5		88,75		89,00		89,25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					110.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		190.000.000,00		210.000.000,00	
Terkendalnya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (%)	100	100	100	110.000.000,00	100	180.000.000,00	100	180.000.000,00	100	190.000.000,00	100	210.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					20.000.000,00		120.000.000,00		116.500.000,00		50.000.000,00		120.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (%)	100	100	100	20.000.000,00	100	120.000.000,00	100	116.500.000,00	100	50.000.000,00	100	120.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					12.897.468.738,00		33.738.386.269,00		15.842.731.423,00		15.682.320.447,00		15.218.506.214,00	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.095.071.675,00		4.857.897.100,00		5.301.230.068,00		5.264.908.905,00		5.143.506.214,00	
Meningkatnya Fasilitas Layanan Kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitas layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	-	-	100	5.095.071.675,00	100	4.857.897.100,00	100	5.301.230.068,00	100	5.264.908.905,00	100	5.143.506.214,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					2.842.358.000,00		3.040.000.000,00		5.325.000.000,00		4.973.411.542,00		4.945.000.000,00	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasial kemasyarakatan (%)	51,56	51,56	52,19	2.842.358.000,00	52,81	3.040.000.000,00	53,41	5.325.000.000,00	54	4.973.411.542,00	54,57	4.945.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Rasio Wirausaha Pemuda (%)	9,34	9,61	9,74		9,88		10,00		10,13		10,25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					4.640.041.263,00		25.530.489.169,00		4.746.501.355,00		4.974.000.000,00		4.770.000.000,00	
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase atlet yang masuk Pelatda Provinsi (%)	-	-	12,50	4.640.041.263,00	17,50	25.530.489.169,00	25,00	4.746.501.355,00	30,00	4.974.000.000,00	37,50	4.770.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					319.997.800,00		310.000.000,00		470.000.000,00		470.000.000,00		360.000.000,00	
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (%)	-	-	33,95	319.997.800,00	34,47	310.000.000,00	35,77	470.000.000,00	36,43	470.000.000,00	37,20	360.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					250.000.000,00		268.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					250.000.000,00		268.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00	
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan (%)	100	100	100	250.000.000,00	100	268.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	300.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					244.865.200,00		244.800.000,00		244.000.000,00		240.000.000,00		264.800.000,00	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					244.865.200,00		244.800.000,00		244.000.000,00		240.000.000,00		264.800.000,00	
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang hasil penilaiain implementasi persandian untuk pengaman informasi masuk kategori baik (%)	0	67,50	70,00	244.865.200,00	73,30	244.800.000,00	76,70	244.000.000,00	80,00	240.000.000,00	83,30	264.800.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					1.230.179.399,00		1.248.343.979,00		1.109.775.858,00		1.085.100.257,00		1.312.080.502,00	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					1.065.475.399,00		1.083.639.979,00		945.071.858,00		920.396.257,00		1.105.475.402,00	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (%)	0	57,97	60,39	1.065.475.399,00	62,80	1.083.639.979,00	65,22	945.071.858,00	67,63	920.396.257,00	70,05	1.105.475.402,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					164.704.000,00		164.704.000,00		164.704.000,00		164.704.000,00		206.605.100,00	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (%)	-	-	100	164.704.000,00	100	164.704.000,00	100	164.704.000,00	100	164.704.000,00	100	206.605.100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					5.819.759.391,00		5.765.434.089,00		6.311.662.239,00		6.217.375.705,00		5.958.340.255,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.999.890.104,00		4.985.265.562,00		5.401.086.524,00		5.263.098.709,00		5.215.074.134,00	
Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	-	100	100	4.999.890.104,00	100	4.985.265.562,00	100	5.401.086.524,00	100	5.263.098.709,00	100	5.215.074.134,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					819.869.287,00		780.168.527,00		910.575.715,00		954.276.996,00		743.266.121,00	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat (%)	1,50	1,50	2,00	819.869.287,00	2,5	780.168.527,00	3,00	910.575.715,00	3,50	954.276.996,00	4,00	743.266.121,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					246.602.400,00		246.602.400,00		296.602.400,00		296.602.400,00		246.602.400,00	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					246.602.400,00		246.602.400,00		296.602.400,00		296.602.400,00		246.602.400,00	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawabana n setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara kepentingan pemerintahan, untuk negara, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (%)	86,00	86,50	86,60	246.602.400,00	86,70	246.602.400,00	86,80	296.602.400,00	86,90	296.602.400,00	87,00	246.602.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
	Tingkat Ketersediaan Arsip (%)	88,68	88,70	88,80		88,90		89,00		89,10		89,20		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					679.918.000,00		598.602.000,00		574.180.000,00		577.044.000,00		577.500.000,00	
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					419.418.000,00		421.702.000,00		397.080.000,00		399.744.000,00		400.000.000,00	
Meningkatnya produksi perikanan budidava	Persentase Izin Usaha budidaya perikanan yang Diterbitkan (%)	100	100	100	419.418.000,00	100	421.702.000,00	100	397.080.000,00	100	399.744.000,00	100	400.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	242,84	242,86	247,28		249,76		252,26		254,77		257,30		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					260.500.000,00		176.900.000,00		177.100.000,00		177.300.000,00		177.500.000,00	
Meningkatnya kualitas produk hasil perikanan	Persentase Izin Usaha pengolahan hasil perikanan yang Diterbitkan (%)	0	100	100	260.500.000,00	100	176.900.000,00	100	177.100.000,00	100	177.300.000,00	100	177.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	18,84	20,00	23,20		23,31		23,42		23,53		23,64		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					10.768.311.941,00		10.878.157.097,00		10.704.302.803,00		10.584.671.014,00		11.148.972.161,00	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.065.786.849,00		9.125.632.005,00		9.145.417.711,00		9.062.137.122,00		9.323.947.069,00	
Meningkatnya fasilitas layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitas layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	-	-	100	9.065.786.849,00	100	9.125.632.005,00	100	9.145.417.711,00	100	9.062.137.122,00	100	9.323.947.069,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					928.272.092,00		958.272.092,00		874.272.092,00		862.596.492,00		1.004.072.092,00	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (%)	-2,96	0,02	0,03	928.272.092,00	0,04	958.272.092,00	0,05	874.272.092,00	0,06	862.596.492,00	0,07	1.004.072.092,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					41.083.600,00		41.083.600,00		41.083.600,00		41.083.600,00		51.083.600,00	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (%)	-	-	0,26	41.083.600,00	0,30	41.083.600,00	0,34	41.083.600,00	0,38	41.083.600,00	0,42	51.083.600,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					690.603.600,00		710.603.600,00		600.963.600,00		576.288.000,00		717.303.600,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas ekosistem ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (%)	-	0,17	0,35	690.603.600,00	0,52	710.603.600,00	0,69	600.963.600,00	0,87	576.288.000,00	1,04	717.303.600,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					42.565.800,00		42.565.800,00		42.565.800,00		42.565.800,00		52.565.800,00	
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi yang Dibentuk dan Beroperasi (%)	-	-	22,05	42.565.800,00	24,13	42.565.800,00	26,04	42.565.800,00	28,13	42.565.800,00	30,03	52.565.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					13.160.042.155,00		12.398.422.392,00		12.167.774.742,00		11.975.161.630,00		12.801.412.202,00	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.223.910.322,00		9.243.144.586,00		9.014.087.829,00		8.983.071.085,00		9.325.561.907,00	
Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	100	100	100	9.223.910.322,00	100	9.243.144.586,00	100	9.014.087.829,00	100	8.983.071.085,00	100	9.325.561.907,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					308.270.400,00		298.201.000,00		285.121.000,00		286.693.000,00		287.693.000,00	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura (%)	0,10	0,14	0,8	308.270.400,00	0,8	298.201.000,00	0,8	285.121.000,00	0,8	286.693.000,00	0,8	287.693.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (%)	4,19	3,00	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (%)	-38,03	0,20	0,20		0,20		0,20		0,20		0,20		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					953.277.400,00		561.500.000,00		563.000.000,00		413.000.000,00		700.102.232,00	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	0	30	30	953.277.400,00	30	561.500.000,00	30	563.000.000,00	30	413.000.000,00	30	700.102.232,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase produk RPH yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					265.998.700,00		281.399.200,00		290.595.000,00		297.579.000,00		407.283.000,00	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (%)	40,54	43,24	43,24	265.998.700,00	45,94	281.399.200,00	48,65	290.595.000,00	51,35	297.579.000,00	54,05	407.283.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					78.804.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%)	100	100	100	78.804.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (%)	1	5	5		10		15		20		25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					28.165.600,00		59.998.000,00		63.651.000,00		69.050.000,00		70.050.000,00	
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Peternakan yang Diterbitkan (%)	-	0	19,00	28.165.600,00	19,50	59.998.000,00	20,00	63.651.000,00	20,50	69.050.000,00	20,50	70.050.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (%)	62,22	62,84	62,84		63,47		64,11		64,75		65,39		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					2.301.615.733,00		1.854.179.606,00		1.851.319.913,00		1.825.768.545,00		1.910.722.063,00	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian dan pembinaan	Persentase Kelembagaan yang Dibentuk dan Beroperasi Koperasi Tani (%)	0	0	0	2.301.615.733,00	4	1.854.179.606,00	9	1.851.319.913,00	14	1.825.768.545,00	14	1.910.722.063,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
kelembagaan usaha tani														
	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					15.747.917.100,00		23.418.414.877,00		13.958.514.097,00		13.777.262.032,00		14.856.482.866,00	
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.653.175.800,00		8.723.414.877,00		8.373.350.000,00		8.311.262.032,00		8.961.482.866,00	
Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	86,05	86,25	86,30	8.653.175.800,00	86,40	8.723.414.877,00	86,50	8.373.350.000,00	86,60	8.311.262.032,00	86,60	8.961.482.866,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					29.997.800,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	persentase usaha perdagangan yg berizin (%)	70,00	72,10	75,71	29.997.800,00	79,49	60.000.000,00	83,46	60.000.000,00	87,64	60.000.000,00	92,02	60.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					6.450.000.000,00		14.000.000.000,00		4.969.164.097,00		4.900.000.000,00		5.000.000.000,00	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	18,18	18,18	18,18	6.450.000.000,00	18,18	14.000.000.000,00	18,18	4.969.164.097,00	18,18	4.900.000.000,00	18,18	5.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					150.000.000,00		125.000.000,00		122.000.000,00		122.000.000,00		125.000.000,00	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (%)	100	100	100	150.000.000,00	100	125.000.000,00	100	122.000.000,00	100	122.000.000,00	100	125.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					249.763.000,00		200.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		250.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	100	100	100	249.763.000,00	100	200.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	250.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					91.189.700,00		160.000.000,00		134.000.000,00		134.000.000,00		160.000.000,00	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Indeks kepuasan konsumen terhadap layanan perlindungan konsumen (Indeks (Skala 0-100))	-	81,00	84,00	91.189.700,00	85,00	160.000.000,00	86,00	134.000.000,00	87,00	134.000.000,00	88,00	160.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	48,17	47,88	48,26		48,65		49,23		49,62		50,29		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					123.790.800,00		150.000.000,00		150.000.000,00		100.000.000,00		300.000.000,00	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Jumlah kerjasama penggunaan produk lokal daerah (Kerja Sama)	-	5	10	123.790.800,00	15	150.000.000,00	20	150.000.000,00	25	100.000.000,00	30	300.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					3.072.684.294,00		3.258.650.617,00		3.258.650.617,00		3.215.650.617,00		3.339.650.617,00	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					3.016.751.394,00		3.198.650.617,00		3.198.650.617,00		3.155.650.617,00		3.279.650.617,00	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (%)	1,39	1,40	1,41	3.016.751.394,00	1,42	3.198.650.617,00	1,43	3.198.650.617,00	1,44	3.155.650.617,00	1,45	3.279.650.617,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (%)	50,00	50,00	50,00	30.000.000,00	50,00	30.000.000,00	50,00	30.000.000,00	50,00	30.000.000,00	50,00	30.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					25.932.900,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemanfaatan pemanfaatan informasi industri	Persentase industri yg terdaftar di SiINAS (%)	34,00	34,20	34,40	25.932.900,00	34,60	30.000.000,00	34,80	30.000.000,00	35,00	30.000.000,00	35,20	30.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					43.437.775.909,00		53.808.631.550,00		44.495.869.735,00		43.883.358.906,00		45.172.245.649,00	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					30.626.252.318,00		30.995.169.676,00		31.486.154.251,00		31.048.894.601,00		31.964.782.488,00	
Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah					29.723.648.153,00		30.080.331.932,00		30.555.910.306,00		30.133.834.500,00		31.020.360.133,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah					128.934.450,00		131.883.993,00		134.911.478,00		130.713.745,00		137.000.835,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah					504.778.523,00		510.835.865,00		518.912.322,00		511.744.466,00		526.799.789,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	41,80	42,00	42,10		43,10		44,10		45,10		46,10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP minimal A (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas pelayanan publik					268.891.192,00		272.117.886,00		276.420.145,00		272.601.890,00		280.621.731,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase perangkat daerah yang memiliki IKM dengan kategori minimal Baik (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase unit pelayanan publik dengan kategori pelayanan Baik (%)	27,00	27,00	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					11.545.794.877,00		11.532.544.416,00		11.709.179.232,00		11.551.015.389,00		11.887.158.757,00	
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat					9.341.538.137,00		9.301.836.595,00		9.444.305.432,00		9.316.543.055,00		9.587.858.877,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan					282.006.300,00		285.390.376,00		289.761.473,00		285.841.586,00		294.165.848,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	3,367	3,3672	3,3674		3,3676		3,3678		3,368		3,3682		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya penyelesaian perkara hukum					346.055.960,00		350.208.631,00		355.572.499,00		350.762.321,00		360.977.201,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase masalah hukum yang terselesaikan (%)	96	96	96		96		96		96		96		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan					519.083.940,00		525.312.948,00		533.358.748,00		526.381.185,00		541.465.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase produk hukum yang dihasilkan (%)	94	94	94		94		94		94		94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan					908.542.340,00		919.444.848,00		933.527.255,00		920.898.515,00		947.716.868,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas kerja sama daerah					148.568.200,00		150.351.018,00		152.653.825,00		150.588.727,00		154.974.163,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Efektivitas Kerja Sama Daerah (%)	-	-	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					1.265.728.714,00		11.280.917.458,00		1.300.536.252,00		1.283.448.916,00		1.320.304.404,00	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian					512.149.630,00		10.518.295.425,00		526.233.744,00		519.319.725,00		534.232.498,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan					182.852.400,00		185.046.629,00		187.880.841,00		185.412.334,00		190.736.630,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa					570.726.684,00		577.575.404,00		586.421.667,00		578.716.857,00		595.335.276,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Tingkat Kematangan UKPBJ (Level)	8:9	9:9	9:9		9:9		9:9		9:9		9:9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					36.991.260.038,00		37.535.436.348,00		38.227.613.266,00		37.799.304.320,00		39.004.527.781,00	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					20.619.480.209,00		21.078.956.610,00		21.734.796.067,00		22.220.940.605,00		22.750.340.647,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	100	100	100	20.619.480.209,00	100	21.078.956.610,00	100	21.734.796.067,00	100	22.220.940.605,00	100	22.750.340.647,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					16.371.779.829,00		16.456.479.738,00		16.492.817.199,00		15.578.363.715,00		16.254.187.134,00	
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang- undangan	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (%)	100	100	100	11.438.480.979,00	100	11.510.246.088,00	100	11.546.583.549,00	100	11.196.591.615,00	100	11.307.953.484,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Persentase Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase penyampaian rekomendasi penganggaran (%)	100	100	100	4.933.298.850,00	100	4.946.233.650,00	100	4.946.233.650,00	100	4.381.772.100,00	100	4.946.233.650,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	persentase penyampaian rekomendasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					6.799.034.615,00		6.847.646.886,00		6.966.469.607,00		6.898.207.633,00		7.043.922.510,00	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.246.006.115,00		5.217.052.081,00		5.243.581.371,00		5.107.304.243,00		5.211.529.623,00	
Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	100	100	100	5.246.006.115,00	100	5.217.052.081,00	100	5.243.581.371,00	100	5.107.304.243,00	100	5.211.529.623,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					789.661.500,00		793.609.805,00		850.520.828,00		1.007.522.601,00		938.746.691,00	
Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (%)	100	100	100	789.661.500,00	100	793.609.805,00	100	850.520.828,00	100	1.007.522.601,00	100	938.746.691,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase program prioritas nasional yang didukung program daerah (%)	-	46,26	46,26		49,15		52,04		54,93		57,83		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase capaian kinerja program daerah (%)	-	-	91,00		92,00		93,00		94,00		95,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					763.367.000,00		836.985.000,00		872.367.408,00		783.380.789,00		893.646.196,00	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan, serta bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	100	100	100	763.367.000,00	100	836.985.000,00	100	872.367.408,00	100	783.380.789,00	100	893.646.196,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.02 - KEUANGAN					24.363.476.074,00		24.929.509.080,00		25.334.682.761,00		24.973.208.219,00		25.729.413.745,00	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.646.609.366,00		12.095.009.080,00		12.500.182.761,00		12.138.708.219,00		12.894.913.745,00	
Meningkatnya fasilitas layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	100	100	100	11.646.609.366,00	100	12.095.009.080,00	100	12.500.182.761,00	100	12.138.708.219,00	100	12.894.913.745,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					5.614.596.000,00		5.626.000.000,00		5.626.000.000,00		5.626.000.000,00		5.626.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	33,13	36,00	39,90	1.005.000.000,00	40,00	1.000.000.000,00	40,01	1.000.000.000,00	40,02	1.000.000.000,00	40,03	1.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (%)	30,51	30,35	30,20		30,00		29,99		29,98		29,97		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (%)	100	100	100	363.000.000,00	100	363.000.000,00	100	363.000.000,00	100	363.000.000,00	100	363.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%)	94,85	95,00	95,10	4.246.596.000,00	95,20	4.263.000.000,00	95,30	4.263.000.000,00	95,40	4.263.000.000,00	95,50	4.263.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Penurunan SILPA (%)	-27,76	-5	-10		-10,05		-10,1		-10,15		-10,2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					4.087.089.000,00		4.175.000.000,00		4.175.000.000,00		4.175.000.000,00		4.175.000.000,00	
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)	-5,31	1,00	1,00	4.087.089.000,00	1,05	4.175.000.000,00	1,10	4.175.000.000,00	1,15	4.175.000.000,00	1,20	4.175.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					3.015.181.708,00		3.033.500.000,00		3.033.500.000,00		3.033.500.000,00		3.033.500.000,00	
Meningkatnya Tata Kelola Pendapatan Daerah	Persentase Target Pajak Daerah terhadap PAD (%)	32,02	41,00	42,00	3.015.181.708,00	43,00	3.033.500.000,00	44,00	3.033.500.000,00	45,00	3.033.500.000,00	46,00	3.033.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap PAD (%)	32,02	41,00	42,00		43,00		44,00		45,00		46,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Realisasi Retribusi Daerah terhadap Target Retribusi Daerah (%)	90,91	95,00	95,50		96,00		96,5		97,00		97,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.03 - KEPEGAWAIAN					10.147.841.724,00		10.310.806.416,00		10.508.104.241,00		10.428.713.384,00		10.782.213.299,00	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.421.199.972,00		8.769.600.695,00		8.866.641.229,00		8.689.523.102,00		8.890.584.457,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	100	100	100	8.421.199.972,00	100	8.769.600.695,00	100	8.866.641.229,00	100	8.689.523.102,00	100	8.890.584.457,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					1.726.641.752,00		1.541.205.721,00		1.641.463.012,00		1.739.190.282,00		1.891.628.842,00	
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (%)	98,90	90,00	90,00	1.726.641.752,00	91,00	1.541.205.721,00	92,00	1.641.463.012,00	93,00	1.739.190.282,00	95,00	1.891.628.842,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (%)	4,00	4,00	4,16		8,32		12,48		16,65		20,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (%)	80,34	67,00	68,00		69,00		70,00		71,00		72,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					687.629.017,00		1.489.794.598,00		1.484.289.276,00		1.392.573.000,00		1.397.029.580,00	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					687.629.017,00		1.489.794.598,00		1.484.289.276,00		1.392.573.000,00		1.397.029.580,00	
Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, pengembangan dan evaluasi serta layanan pengembangan kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (%)	37,37	37,37	38,00	687.629.017,00	36,00	1.489.794.598,00	38,00	1.484.289.276,00	36,00	1.392.573.000,00	38,00	1.397.029.580,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional (%)	19,59	18,00	18,00		18,50		19,00		19,50		20,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (%)	80,00	80,00	80,00		82,00		84,00		86,00		88,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (%)	-	72,86	52,00		55,00		60,00		65,00		70,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					776.638.100,00		822.971.290,00		828.817.397,00		785.856.437,00		872.820.190,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					776.638.100,00		822.971.290,00		828.817.397,00		785.856.437,00		872.820.190,00	
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (%)	40,00	50,00	50,00	776.638.100,00	50,00	822.971.290,00	50,00	828.817.397,00	50,00	785.856.437,00	50,00	872.820.190,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah (Rasio)	35,00	37,50	37,50		38,10		38,64		39,13		39,58		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					9.471.384.221,00		9.588.272.723,00		9.744.108.754,00		9.605.080.084,00		9.895.928.363,00	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.713.233.971,00		7.705.076.191,00		7.705.153.491,00		7.705.084.591,00		7.705.228.791,00	
Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	100	100	100	7.713.233.971,00	100	7.705.076.191,00	100	7.705.153.491,00	100	7.705.084.591,00	100	7.705.228.791,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					1.403.915.550,00		1.496.776.532,00		1.620.574.263,00		1.510.128.493,00		1.741.181.572,00	
Menurunnya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindakanjutt Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1(%)	93,75	93,75	93,8	1.403.915.550,00	93,85	1.496.776.532,00	93,9	1.620.574.263,00	93,95	1.510.128.493,00	94,00	1.741.181.572,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					354.234.700,00		386.420.000,00		418.381.000,00		389.867.000,00		449.518.000,00	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Indeks Manajemen Risiko (IMR) (Indeks)	2,966	2,966	2,966	354.234.700,00	2,967	386.420.000,00	2,968	418.381.000,00	2,969	389.867.000,00	2,970	449.518.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)		Terintegrasi (Integrated)		Terintegrasi (Integrated)		Terintegrasi (Integrated)		Terintegrasi (Integrated)		Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Intern Pemerintah (APIP) (Level)													Inspektorat Daerah
7.01 - KECAMATAN					94.705.329.423,00		93.485.659.052,00		95.005.060.354,00		93.649.530.821,00		96.485.301.544,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					43.521.452.724,00		47.244.193.073,00		48.219.291.228,00		47.280.028.505,00		49.352.156.559,00	
Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	100	100	100	14.016.199.797,00	100	14.036.688.598,00	100	14.494.229.566,00	100	14.086.035.698,00	100	14.939.978.155,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	100	100	100	15.625.822.158,00	100	15.465.611.550,00	100	15.620.267.670,00	100	15.423.745.267,00	100	15.753.418.487,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	100	100	100	13.879.430.769,00	100	17.741.892.925,00	100	18.104.793.992,00	100	17.770.247.540,00	100	18.658.759.917,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					8.358.704.059,00		7.685.690.663,00		7.754.210.767,00		7.736.316.997,00		8.091.560.023,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase kelurahan yang masyarakatnya aktif menjaga trantibum secara swadaya (%)	-	-	100	2.885.950.783,00	100	2.213.525.836,00	100	2.234.731.648,00	100	2.226.598.238,00	100	2.337.928.150,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum (%)	-	-	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan (%)	-	-	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase kelurahan yang masyarakatnya aktif menjaga trantibum secara swadaya (%)	100	100	100	2.150.238.384,00	100	2.150.238.384,00	100	2.150.238.384,00	100	2.150.238.384,00	100	2.150.238.384,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase kelurahan yang masyarakatnya aktif menjaga trantibum secara swadaya (%)	100	100	100	3.322.514.892,00	100	3.321.926.443,00	100	3.369.240.735,00	100	3.359.480.375,00	100	3.603.393.489,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase masyarakat yang tertib dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase pelayanan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					42.825.172.640,00		38.555.775.316,00		39.031.558.359,00		38.633.185.319,00		39.041.584.962,00	
Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif (Kelompok)	8	8	8	11.964.634.324,00	8	11.964.634.324,00	8	11.964.634.324,00	8	11.964.634.324,00	8	11.964.634.324,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase pemuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang mendukung pencapaian SPM (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif (Kelompok)	7	7	7	16.955.722.748,00	7	15.455.702.725,00	7	15.810.279.970,00	7	15.520.040.330,00	7	15.985.179.940,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase pemuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang mendukung pencapaian SPM (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan ekonomi produktif (Kelompok)	-	-	7	13.904.815.568,00	7	11.135.438.267,00	7	11.256.644.065,00	7	11.148.510.665,00	7	11.091.770.698,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)	-	-	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase pemenuhan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana kelurahan yang mendukung pencapaian SPM (%)	-	-	70,00		70,00		70,00		70,00		70,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					7.822.439.759,00		6.952.294.897,00		22.587.178.244,00		37.466.083.423,00		7.204.248.808,00	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.374.754.396,00		4.379.493.301,00		4.716.841.819,00		4.710.647.907,00		4.504.563.981,00	
Meningkatnya fasilitas layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitas layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	100	100	100	4.374.754.396,00	100	4.379.493.301,00	100	4.716.841.819,00	100	4.710.647.907,00	100	4.504.563.981,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					1.035.000.000,00		1.009.183.773,00		1.133.902.407,00		1.123.736.042,00		1.040.018.681,00	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	47,62	57,14	66,67	1.035.000.000,00	76,19	1.009.183.773,00	85,71	1.133.902.407,00	95,24	1.123.736.042,00	100	1.040.018.681,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					680.621.708,00		680.621.708,00		15.680.621.708,00		27.080.621.708,00		691.338.659,00	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (%)	0	84,00	85,00	680.621.708,00	86,00	680.621.708,00	87,00	15.680.621.708,00	88,00	27.080.621.708,00	89,00	691.338.659,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					113.800.000,00		115.000.000,00		119.490.000,00		122.477.250,00		124.517.257,00	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (%)	89,47	89,90	90,00	113.800.000,00	90,10	115.000.000,00	90,20	119.490.000,00	90,30	122.477.250,00	90,40	124.517.257,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					475.000.000,00		475.000.000,00		498.750.000,00		511.218.750,00		485.717.257,00	
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (%)	100	100	100	475.000.000,00	100	475.000.000,00	100	498.750.000,00	100	511.218.750,00	100	485.717.257,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					1.143.263.655,00		292.996.115,00		437.572.310,00		3.917.381.766,00		358.092.973,00	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (%)	100	100	100	1.143.263.655,00	100	292.996.115,00	100	437.572.310,00	100	3.917.381.766,00	100	358.092.973,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					955.941.324.257,00		986.171.090.536,00		976.683.005.392,00		1.005.417.367.753,00		991.625.409.438,00	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir masa jabatan, yang ditunjukkan melalui akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Untuk pencapaian Visi Pembangunan Jangka Menengah, diperlukan tahapan pencapaiannya, dan dari setiap tahapan tersebut perlu ditetapkan tolok ukur/indikator tingkat keberhasilannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan indikator kinerja daerah dalam RPJMD diformulasikan menjadi 2 kategori yaitu :

1. Indikator kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Indikator tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).
2. Indikator Kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan urusan dan kewenangan daerah. Indikator tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD).

4.2.1. Indikator Kinerja Utama

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	Data belum pernah dirilis	6,91	6,95	6,99	7,09	7,19	7,25	
2.	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	75,20	75,30	75,56	75,82	76,07	76,33	76,59	
3.	Tingkat Kemiskinan	(%)	6,75	6,63	6,42	6,14	5,92	5,57	4,87	
4.	Indeks Kota Layak Huni	Indeks	Data belum pernah dirilis	62,80	65,60	68,40	71,20	74,00	76,80	
5.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	81,44	82,71	82,86	83,2	83,54	83,88	84,32	
6.	Rasio Gini	Indeks	0,353	0,352	0,349	0,346	0,343	0,34	0,337	
7.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	90,41	90,91	91,00	91,25	91,50	91,75	92,00	
8.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,33	5,37	5,41	5,54	5,58	5,62	5,65	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
9.	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	98,52	98,80	99,10	99,40	99,70	100	100	
10.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	71,51	70,32	68,60	66,97	65,41	63,93	62,50	
11.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	(%)	11,4	9,69	9,69	9,24	8,74	8,19	7,60	
12.	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	62,23	62,58	62,93	63,28	63,63	63,98	64,33	
13.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	85,00	
14.	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	84,37	88,68	88,69	88,70	88,71	88,72	88,73	
15.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	79,03	91,00	92,49	94,19	95,88	97,38	99,02	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
16.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,11	4,97	4,83	4,69	4,55	4,41	4,27	
17.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	89,23	89,40	89,57	89,74	89,91	90,08	90,25	
18.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	64,94	67,02	67,09	67,17	67,25	67,33	67,41	
19.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Angka	80,06	80,11	80,14	80,17	80,20	80,23	80,26	
20.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,81	14,82	14,84	14,91	15,00	15,06	15,10	
21.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,820	10,825	10,830	10,835	10,840	10,845	10,850	
22.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	97,49	97,49	97,59	97,64	97,69	97,74	97,79	
23.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase	24,69	25,09	25,24	25,39	25,54	25,69	25,84	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
24.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	5,89	5,90	5,92	5,95	5,98	6,05	6,12	
25.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	9,91	10,03	10,08	10,13	10,18	10,23	10,28	
26.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar 2025, data diolah

4.2.2. Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari aspek Geografi dan Demografi, aspek Kesejahteraan Masyarakat, aspek Daya Saing Daerah serta aspek Pelayanan Umum (termasuk di dalamnya adalah IKK). Adapun IKD Kota Blitar yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
I	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Tingkat Inflasi	%	0,52	1,97	2,12	1,96	1,81	1,71	1,61	
2	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	12,38	1	1,5	2	2,5	3	3,5	
3	ICOR (Incremental Capital Output Ratio)	Rasio	3,51	3,54	3,67	3,67	3,66	3,66	3,65	
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	%	19,24	19,24	19,25	19,26	19,27	19,29	19,30	
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70,44	72,26	74,08	75,9	77,72	79,54	81,36	
6	Indeks Inovasi Daerah	Angka	48,04	50	51	53	56	58	60	
7	Proporsi jumlah usaha mikro	%	8,04	8,84	8,87	8,91	8,95	8,99	9,02	
8	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	%	93,29	93,59	93,89	94,19	94,49	94,79	95,09	
9	Proporsi Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Formal	%	38,04	67,83	67,94	68,04	68,15	68,25	68,36	
10	Rasio kewirausahaan daerah	%	2,90	2,92	3,21	3,49	3,78	4,06	4,35	
11	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	4,05	4,20	4,35	4,50	4,65	4,80	5,00	
12	Persentase pemanfaatan digital pada sektor ekonomi	%	9,88	10,88	11,88	12,88	13,88	14,88	15,88	
13	Angka Partisipasi Masyarakat dalam Proses Politik	%	85,14	85,14	85,14	85,14	85,14	85,16	85,16	
14	Angka Ketergantungan	%	40,72	40,57	40,42	40,27	40,12	39,97	39,32	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
15	Return on Asset (ROA) BUMD	%	-0,045	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	
16	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	-4,91	-4,81	-4,71	-4,61	-4,51	-4,41	-4,31	
17	Realisasi investasi (Triliun Rupiah)	triliun rupiah	0,432	0,437	0,443	0,452	0,463	0,477	0,494	
18	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	6,46	6,47	6,47	6,48	6,48	6,49	6,49	
19	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,64	0,70	0,71	0,72	0,73	0,74	0,75	
II	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) Kumulatif	TON CO2 EQ	650775,46	663790,97	677066,79	690608,12	704420,29	718508,69	732878,87	
2	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	80,80	80,81	81,56	82,31	83,06	83,81	84,56	
3	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	98,01*	28,22	29,3	30,38	31,46	32,54	33,62	
4	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,47	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,47	
5	Indeks Kualitas Udara	Indeks	89,79	79,59	79,69	79,79	79,89	79,99	80	
6	Indeks Kualitas Air	Indeks	56,11	69,47	69,57	69,67	69,77	69,87	69,97	
7	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	34,13	39,55	39,56	39,56	39,56	39,56	39,56	
8	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	5,42	4,99	4,79	4,59	4,39	4,19	3,99	
9	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,450	0,447	0,422	0,397	0,372	0,347	0,322	
10	Rasio Penduduk	%	99,00	99,47	99,52	99,57	99,62	99,67	99,72	
11	Kepadatan Penduduk	Orang/km ²	4835	4712	4589	4466	4343	4220	4097	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
12	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	14,00	14,12	14,20	14,30	14,50	14,70	15,30	
13	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	11,99	12,23	12,46	12,69	12,93	13,16	13,39	
14	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	90,5	91,0	91,2	91,5	91,7	92,0	92,2	
15	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	8,45	18,66	23,51	28,35	33,2	38,04	42,89	
16	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	71,90	72,00	72,34	72,77	73,01	73,24	73,54	
III	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	59,33	60,01	60,65	61,33	62,01	63,69	64,37	
2	Indeks Pelestarian Budaya	Indeks	Data belum pernah dirilis	50,29	86,14	86,98	87,83	88,67	89,52	
3	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	Indeks	0.699 (Rilis data 2018)	0,699	0,700	0,720	0,725	0,730	0,735	
4	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	70,33	72,83	75,33	77,83	80,33	82,83	85,33	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
5	Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	85,77	86,87	87,97	89,07	90,17	91,27	92,37	
6	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	59,00	61,90	64,80	67,70	70,60	73,50	76,40	
7	Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	71,24	72,74	74,24	75,74	77,24	78,74	80,24	
8	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	59,67	62,65	65,63	68,61	71,59	74,57	77,55	
9	Indeks Pembangunan Olahraga	Indeks	Data belum pernah dirilis	0,569	0,583	0,609	0,621	0,641	0,660	
10	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	70,57	71,06	71,98	73,42	74,88	76,38	77,91	
11	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 kelahiran hidup	173.99	173,99	173,99	130,49	130,49	130,49	86,99	
12	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	tahun	10,85	11,01	11,09	11,18	11,32	11,39	11,41	
13	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,198	0,185	0,175	0,170	0,165	0,159	0,154	
14	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	%	100	100	100	100	100	100	100	
15	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Poin	0,40	0,44	0,48	0,52	0,56	0,60	0,64	
16	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis	%	82,61	83,0	83,5	84,0	84,5	85,0	85,5	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
17	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis	%	73,91	74,44	74,97	75,49	76,02	76,55	77,08	
18	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	%	85,49	84,93	85,64	85,71	85,8	85,95	86	
19	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	16,59	11,86	11,92	12,02	12,12	12,43	13,56	
20	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	47,43	48	49	50	51	52	53	
21	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	59,23	59,72	60,21	60,69	61,18	61,67	62,16	
22	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	48,41	48,41	50,74	54,56	56,9	60,72	63,47	
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Rasa Aman	Angka	Data belum pernah dirilis	76,60	76,65	76,70	76,75	76,80	76,85	
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Terdefinisi (3,026)	Terdefinisi (3,030)	Terdefinisi (3,034)	Terdefinisi (3,038)	Terdefinisi (3,042)	Terdefinisi (3,046)	Terdefinisi (3,050)	
3	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	99,15 (Metode perhitungan lama)	77,70	78,57	80,28	82,00	83,71	85,42	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
4	Indeks Pemerintahan Digital Indonesia	Indeks	Data belum pernah dirilis	-	1,70	1,70	1,90	1,90	2,20	
5	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	59,09	63,64	68,18	72,73	77,27	77,27	81,82	
6	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	4,11	4,11	2,00	2,00	2,80	2,80	3,60	
7	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	97,57	97,65	97,70	97,85	98,00	98,15	98,30	
8	Persentase Capaian Aksi HAM	%	94,70	94,80	95,00	95,30	95,60	95,90	96,20	
9	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,52	4,54	4,56	4,58	4,60	4,62	4,64	
V	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)									
	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
1	Persentase warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (APS)	%	83,75	86,54	89,33	92,13	94,67	97,22	99,77	
2	Persentase warga negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	99,96	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	%	41,06	43,87	46,67	49,48	52,29	55,09	57,9	
4	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	70,33	72,83	75,33	77,83	80,33	82,83	85,33	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
5	Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional	Nilai	85,77	86,87	87,97	89,07	90,17	91,27	92,37	
6	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	59,00	61,90	64,80	67,70	70,60	73,50	76,40	
7	Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional	Nilai	71,24	72,74	74,24	75,74	77,24	78,74	80,24	
8	Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	82,07	82,48	82,89	83,30	83,71	84,12	84,54	
9	Proporsi guru PAUD formal dengan kualifikasi S 1 / D IV	%	87,07	92,62	93,12	93,62	94,12	94,62	95,12	
10	Iklim Keamanan SD	Nilai	81,95	82,85	83,75	84,65	85,55	86,45	87,35	
11	Iklim Keamanan SMP	Nilai	78,26	79,76	81,26	82,76	84,26	85,76	87,26	
12	Iklim Kebhinekaan SD	Nilai	80,58	81,58	82,58	83,58	84,58	85,58	86,58	
13	Iklim Kebinekaan SMP	Nilai	77,68	78,68	79,68	80,68	81,68	82,68	83,68	
14	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	65,29	67,79	70,29	72,79	75,29	77,79	80,29	
15	Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	68,21	70,61	73,01	75,41	77,81	80,21	82,61	
	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	173,99	173,99	173,99	130,49	130,49	130,49	86,99	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
12	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
14	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	11,4	9,69	9,69	9,24	8,74	8,19	7,60	
	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	%	97,84	97,84	98,03	98,23	98,43	98,62	98,82	
2	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	%	63,56	63,56	64	64,5	65	65,5	66	
3	Persentase Kondisi irigasi	%	63,56	63,56	64,00	64,50	65,00	65,50	66,00	
4	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan	%	99,54	99,54	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota									
5	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	8,45	8,45	9,00	10,50	12,00	13,50	15,00	
6	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Tingkat Kemantapan Jalan	%	92,35	92,35	93,35	94,35	95,35	96,35	97,35	
8	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/analisis	%	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	55,00	56,00	57,00	58,00	59,00	60,00	61,00	
10	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah	Hari	78,00	78,00	75,00	70,00	65,00	60,00	55,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	59,09	63,64	68,18	72,73	77,27	77,27	81,82	
3	Jumlah PPNS pada Satpol PP	Orang	4	5	6	7	8	9	10	
4	Presentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	%	65,63	60,00	67,50	75,00	82,50	90,00	97,50	
7	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	52	52	53	54	55	56	
8	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh	%	100	58	58	58	59	59	60	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana									
9	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	-	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase penanganan pra bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase Penanganan Pasca Bencana	%	-	-	100	100	100	100	100	
13	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
14	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	
	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
1	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	%	13,25	14,5	30	32,5	35	37,5	40	
5	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti	%	-	4,88	14,63	14,63	14,63	14,63	14,63	
8	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
9	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	
10	Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	%	100	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
14	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	97,49	97,49	97,59	97,64	97,69	97,74	97,79	
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,198	0,185	0,175	0,170	0,165	0,159	0,154	
3	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	33,80	33,80	33,81	33,82	33,83	33,84	33,85	
4	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100	
	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
1	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	-	1	1	1	0,9	0,9	0,9	
2	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	%	12,5	12,7	12,9	13,1	13,3	13,5	13,7	
3	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	88,87	88,9	89,13	89,26	89,39	89,52	89,56	
	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									
1	Persentase Tersesainya Kasus Tanah Garapan Belum	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan	%	99,63	99,81	99,85	99,89	99,93	99,97	100	
5	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	18,6	30	30	30	30	30	30	
6	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	99,11	99,17	99,24	99,30	99,37	99,43	99,50	
7	Jumlah data profil kependudukan yang disusun	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	
	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
1	Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kelurahan (LKK)	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat									
	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	
2	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	8,11	8,1	8,09	8,07	8,05	8,00	7,95	
3	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	17,30	17,20	17,10	16,75	16,30	15,80	15,10	
4	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	65,89	65,96	66,23	66,54	67,01	68,41	69,56	
5	Angka prevalensi kontrasepsi modern/Modern Contraceptive Rate (mCPR)	%	64,75	64,87	64,95	65	65,2	65,3	65,56	
	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
1	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	%	88,31	88,31	88,38	88,42	88,50	89,10	89,40	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	70,00	70,00	72,73	75,00	83,33	91,67	100	
	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
1	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	%	20	20	23,23	26,67	30,00	33,33	36,67	
3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100	100	
	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
1	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	9,28	9,93	10,39	10,85	11,31	11,77	12,23	
2	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	18,80	18,85	19,01	19,25	19,51	19,76	19,81	
3	Pertumbuhan Wirausaha	%	4,20	4,21	4,79	6,86	8,56	9,86	10,77	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	Persentase produksi perikanan budidaya	%	100,57	100	100	100	100	100	100	
	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
1	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	%	-	0,17	0,35	0,52	0,69	0,87	1,04	
2	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	0,5	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	
3	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	%	-	3,75	3,97	4,17	4,33	4,47	4,59	
	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
1	Peningkatan Produksi Hortikultura	%	0,1	0,14	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
2	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	%	4,19	3	3	3	3	3	3	
3	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	-38,03	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
4	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI	%	-	5	5	10	15	20	25	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan									
	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	48,17	47,88	48,26	48,65	49,23	49,62	50,29	
2	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota	%	Tidak menghitung	100	100	100	100	100	100	
	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
1	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal "Baik" dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan	%	0	75	80	85	90	95	100	
2	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan	%	0	75	80	85	90	95	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan									
3	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	%	11,2	11,3	11,4	11,5	11,6	11,7	12	
4	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	%	0	100	100	100	100	100	100	
5	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	%	75	76	77	78	79	80	81	
	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH									
1	Tingkat Kematangan UKPBJ	Level	8:9	9:9	9:9	9:9	9:9	9:9	9:9	
2	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Poin	27,49	27,50	27,60	27,70	27,80	27,90	28,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
3	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Poin	15	15	21	21	21	21	22	
4	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai	98,19	98,20	98,23	98,25	98,27	98,29	98,31	
	4.02 - SEKRETARIAT DPRD									
1	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	%	100	100	100	100	100	100	100	
	5.01 - PERENCANAAN									
1	Persentase program prioritas nasional yang didukung program daerah	%	-	46,26	46,26	49,15	52,04	54,93	57,83	
	5.02 - KEUANGAN									
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	18,04	18,04	22,10	22,20	22,30	22,40	22,50	
2	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	94,85	95	95,10	95,20	95,30	95,40	95,50	
3	Persentase Penurunan SILPA	%	-27,76	-5	-10	-10,05	-10,10	-10,15	-10,20	
4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	-5,31	1,00	1,00	1,05	1,10	1,15	1,20	
5	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	%	30,51	30,35	30,20	30,00	29,99	29,98	29,97	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
6	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	33,13	36,00	39,90	40,00	40,01	40,02	40,03	
	5.03 - KEPEGAWAIAN									
1	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	Indeks	77,49	78	78,50	79	79,50	80	80,50	
	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	%	40	50	50	50	50	50	50	
2	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	Rasio	35	37,5	37,5	38,1	38,64	39,13	39,58	
	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH									
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	
2	Indeks Manajemen Risiko (IMR)	Indeks	2,966	2,966	2,966	2,967	2,968	2,969	2,970	
3	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	
4	Tindakanlanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	93,75	93,75	93,8	93,85	93,9	93,95	94	
5	Opini Laporan Keuangan	%	5	5	5	5	5	5	5	

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar 2025, data diolah

Metadata Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bitar Tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada alamat <https://q.me-qr.com/HNuB1z4k> atau dengan memindai QR Code sebagai berikut :



BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 – 2029 merupakan perencanaan pembangunan yang bersifat jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagai operasionalisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 – 2045. Kerangka waktu perencanaan yang tertulis 2025 – 2029 tidak sama dengan kerangka waktu Masa Bhakti Walikota 2025 – 2030. Hal ini disebabkan adanya penyeragaman secara nasional terkait RPJMD oleh Kementerian Dalam Negeri, dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029.

Dalam konteks rencana pelaksanaannya, RPJMD secara operasional sudah dapat dipedomani sejak Perubahan APBD 2025. Untuk mengantisipasi kekosongan dasar penyusunan APBD 2030, maka Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 memerintahkan RPJMD 2025 – 2029 juga merencanakan target untuk tahun 2030.

RPJMD 2025 – 2029 menjadi pedoman perencanaan pembangunan tahunan dalam bentuk RKPD sampai dengan penetapan APBD yang terbagi dalam 6 (enam) periodisasi :

1. Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
2. RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2026
3. RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2027
4. RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2028
5. RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2029
6. RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2030

5.1. Pedoman Transisi

Pedoman Transisi memuat berbagai hal yang perlu dilakukan pada saat masa transisi dokumen perencanaan pembangunan. Hal ini merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dokumen pada saat masa transisi antara dokumen perencanaan yang lama dan dokumen perencanaan yang baru.

Berbagai hal yang perlu diatur antara lain sebagai berikut:

1. Pada saat penyusunan Perubahan RKPD 2025 dan RKPD 2026 masih berlaku RPJMD 2021-2026 dan RPJMD 2025 – 2029 belum ditetapkan. Akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan daerah melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, mengatur bahwa Perubahan APBD mengakomodir kebijakan visi dan misi Walikota terpilih.
2. Pada saat menyusun RKPD 2030 yang akan dimulai pada bulan November 2028 sampai dengan Juli 2029, target dan rencana dalam RPJMD 2025 -2029 dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunannya. Dengan catatan dapat dilakukan perubahan jika ada perubahan kondisi yaitu perubahan visi dan misi walikota hasil pemilihan 2029

atau kondisi yang lainnya yang akan berpengaruh pada tahun 2030.

3. Mengingat pembangunan tahun 2025 masih berpedoman pada RPJPD 2005 – 2025 dan RPJMD 2021-2026, maka hasil pembangunan tahun 2025 tidak bisa sepenuhnya langsung dibandingkan dengan target dalam RPJPD 2025-2045 atau produk perencanaan turunannya.
4. Apabila RPJMD 2025 -2029 dapat ditetapkan sebelum Perubahan APBD 2025 maka APBD 2025 dapat disesuaikan dengan program dan kegiatan dalam RPJMD 2025 - 2029 dalam Perubahan APBD.
5. Dalam hal direncanakan penyesuaian sebagaimana point 3, maka penyusunan Perubahan RKPD 2025 dapat didasarkan pada draft RPJMD 2025 -2029.
6. Dalam hal dilakukan atau tidak dilakukan Perubahan APBD 2025, maka hasil capaian pembangunan tahunan 2025 dapat sebagian atau seluruhnya dipergunakan sebagai capaian target RPJMD 2025 – 2029 dan atau RPJPD 2025 -2045.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah Pelaksanaan bertujuan untuk menciptakan petunjuk umum pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi lintas Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan arah kebijakan RPJPD secara efektif dan efisien. Koordinasi, sinkronisasi dan integrasi tersebut bertujuan untuk mengelola sumber daya pembangunan secara optimal serta dapat dilakukan dengan pembagian tugas secara tepat agar mencapai tujuan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan. Adapun kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan RKPD 2026 berpedoman pada RPJMD 2025 -2029
2. Semua Perangkat Daerah pengampu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) harus membuat kertas kerja rencana pencapaian selama 5 (lima) tahun dalam bentuk Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kinerja Perangkat Daerah.
3. Perangkat Daerah pengampu urusan Perencanaan Daerah mengkoordinasikan seluruh Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, agar semua perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (renstra) memperhatikan Arah kebijakan dan Sasaran pokok Pembangunan lima tahunan
4. Apabila terjadi perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar, maka penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan menyesuaikan dengan peraturan daerah tentang Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang baru dan memastikan seluruh urusan dapat tertangani dengan baik.

5.3. Kerangka Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Evaluasi dilakukan terhadap pencapaian hasil pembangunan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan tahap berikutnya.

Pengendalian dan evaluasi diatur sebagai berikut :

1. Pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mengampu urusan perencanaan daerah
2. Pengendalian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar dilaksanakan melalui pengendalian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disertai dengan identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.
3. Pengendalian perencanaan juga dilakukan terhadap perencanaan Perangkat Daerah dalam jangka menengah (Rentsra PD) dan jangka pendek (Renja PD).
4. Pengendalian pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui koordinasi pada saat penetapan anggaran belanja tahunan dengan perangkat daerah terkait.
5. Evaluasi hasil pembangunan jangka menengah dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mengampu urusan perencanaan daerah. Hasil pembangunan dipergunakan sebagai pengendalian progres pencapaian target, yang hasilnya disampaikan kepada Kepala Daerah.
6. Evaluasi terhadap kondisi yang berpengaruh pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) baik di tingkat kota, provinsi, nasional dan global dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah pengampu IKU dan IKD yang hasilnya dipergunakan sebagai bahan pertimbangan penetapan target IKU dan IKD.

5.4. Mekanisme Perubahan

Mengingat adanya faktor faktor yang tidak dapat dikendalikan maka RPJMD Kota Blitar 2025 – 2029 dapat ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan dengan ketentuan :

1. Hasil Evaluasi Tahunan dan atau hasil evaluasi perangkat daerah pengampu IKU dan IKD menunjukkan adanya capaian target meleset lebih dari 20% dari asumsi dasar.
2. Terjadi perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, atau perubahan kebijakan nasional yang mengakibatkan perubahan kondisi lebih dari 10% atas asumsi dasar.
3. Perubahan dapat dilakukan maksimal 2 (dua) kali perubahan yaitu tahun 2027 dan 2029. Mekanisme perubahan RPJMD mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.

5.5. Pembiayaan Pembangunan

Upaya mewujudkan visi dan misi memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Mengingat keterbatasan kemampuan pembiayaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka perlu dilakukan upaya kerjasama dengan berbagai pihak baik pemerintah pusat, provinsi, pemerintah daerah sekitar atau pihak pihak lain. Maka selain upaya peningkatan PAD baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi diharapkan pembiayaan pembangunan Kota Blitar juga didukung oleh sumber pembiayaan APBN, APBD Provinsi, BUMN, BUMD, Swasta, Filantropi, Lembaga Donor, serta sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Hal yang utama dilakukan adalah pengalokasian biaya pembangunan yang didasarkan pada prioritas, efektifitas dan efisiensi yang didukung dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan yang baik.

Akhirnya, RPJMD 2025 -2029 merupakan bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dan upaya peningkatan kesejahteraan itu dapat diwujudkan hanya jika RPJMD 2025 – 2029 dipergunakan sebagai pedoman bagi semua pihak dalam membangun Kota Blitar. Dimana kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kota Blitar harus berpedoman pada RPJMD 2025 – 2029. Demikian juga semua kegiatan dunia usaha dan masyarakat yang didukung oleh para akademisi dan media massa harus berpedoman pada RPJMD 2025 – 2029. Sebab keberhasilan pembangunan daerah bergantung pada kebersamaan para pihak yang saling mendukung untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan daerah.

WALIKOTA BLITAR

ttd

SYAUQUL MUHIBBIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008